



PROFIL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

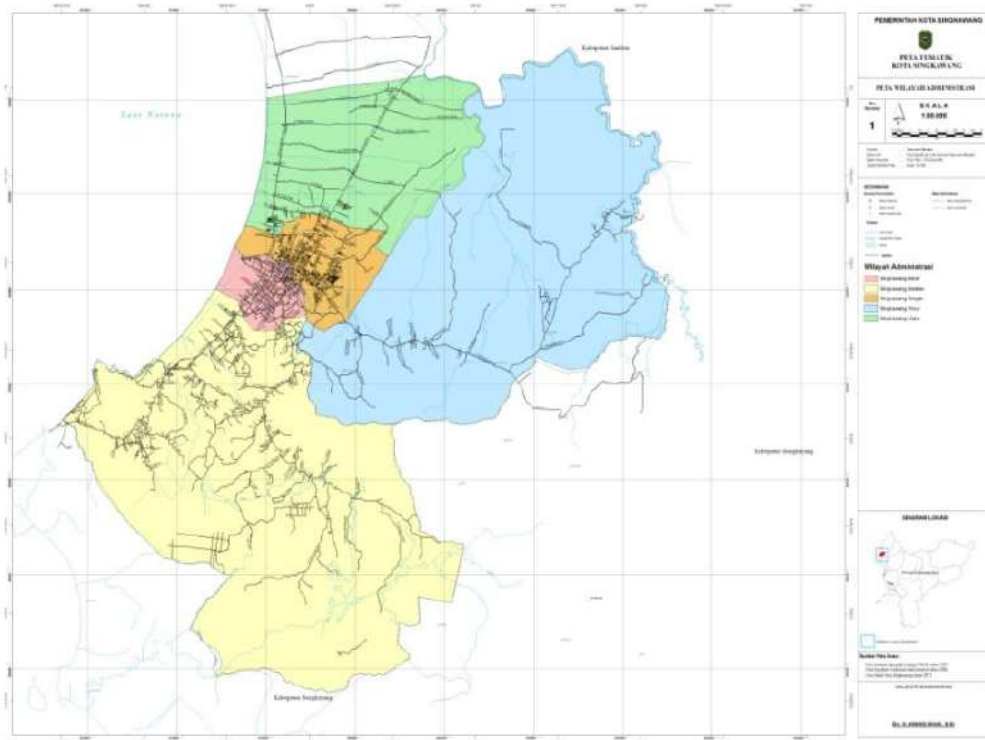
Kota Singkawang merupakan salah satu Pemerintahan Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Terletak diantara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Dibandingkan dengan luas wilayah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, Kota Singkawang merupakan yang terkecil luas wilayahnya setelah Kota Pontianak. Kota Singkawang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 dengan Ibukota Singkawang merupakan pecahan dari Kabupaten Bengkayang. Secara umum Kota Singkawang merupakan wilayah yang dinamis, berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.

Kota Singkawang terletak pada $0^{\circ}44'55,85''$ - $01^{\circ}01'21,51''$ Lintang Utara dan $108^{\circ}51'47,6''$ - $109^{\circ}10'19''$ Bujur Timur di antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Luas wilayah Kota Singkawang 504 Km^2 (50.400 Ha) atau sekitar 0,43 persen dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Batas-batas wilayah selengkapnya untuk Kota Singkawang adalah:

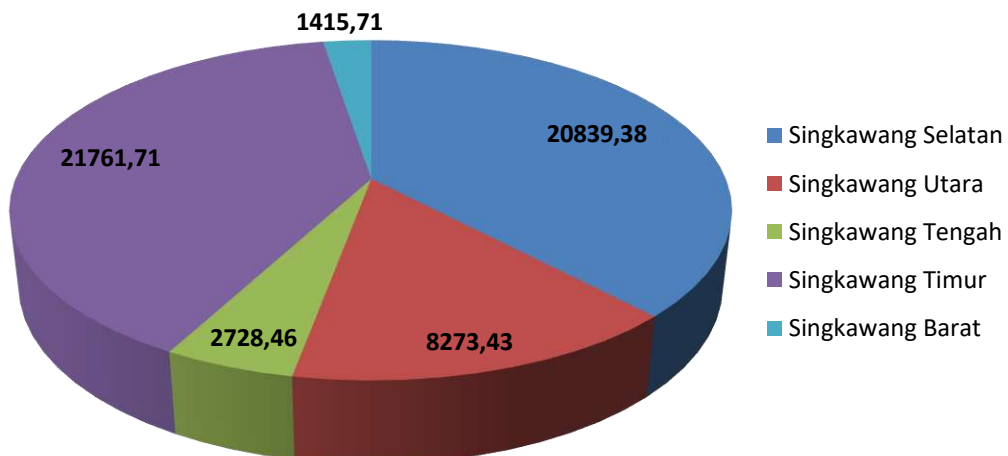
- Utara : Kabupaten Sambas
- Selatan : Kabupaten Bengkayang
- Timur : Kabupaten Bengkayang
- Barat : Laut Natuna

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kota Singkawang



Secara administratif, Kota Singkawang terdiri dari 5 kecamatan dan 26 kelurahan. Kecamatan Singkawang Timur merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 21.761,71 Ha, sedangkan Kecamatan Singkawang Barat merupakan wilayah terkecil yaitu 1.415,71 Ha dari wilayah Kota Singkawang.

Grafik 2.1.
Luas Wilayah Kota Singkawang (dalam Ha)



2.1.1.1. Geologi

Dari Lima jenis tanah yang terdapat di Kota Singkawang sebagian besar merupakan tanah Aluvial (25.338 Ha) sedangkan yang terkecil adalah tanah Latasol (2.988 Ha). Beberapa jenis tanah yang terdapat di Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

- ✓ **Organosol** yaitu tanah yang tersusun dari bahan organik/campuran bahan mineral dan bahan organik. Jenis tanah ini mudah mengeruttak balik dan bila kering pekat terhadap erosi serta mudah terbakar. Terdapat seluas 3.752 ha atau sekitar 7,44 persen dari total wilayah kota.
- ✓ **Alluvial** yaitu jenis tanah yang berwarna kelabu, coklat sampai hitam, mempunyai sifat tidak peka terhadap erosi dan cocok digunakan untuk usaha budidaya pertanian, dan terbentuk dari endapan laut, sungai dan danau. Terdapat seluas 25.338 ha atau 50,27 persen dari total wilayah kota.
- ✓ **Podsol** yaitu tanah yang bersifat basa dengan tingkat kejenuhan yang rendah, berwarna kuning putih, pada umumnya bertekstur kasar karena terbentuk dari batuan endapan serta termasuk miskin unsur hara. Terdapat 14.276 ha atau 28,33 persen dari total wilayah kota.
- ✓ **Latasol** yaitu jenis tanah yang memiliki solusi tanah yang tebal antara 130-200 cm, berwarna coklat, merah sampai kekuning-kuningan. Tanah ini sangat peka terhadap erosi tetapi sangat potensial dikembangkan sebagai usaha pertanian. Terdapat seluas 2.988 ha atau 5,93 persen dari total wilayah kota.
- ✓ **PMK (Podsolid Merah Kuning)** yaitu jenis tanah ini berwarna kuning merah, bereaksi masam dengan tingkat kejenuhan basa rendah, sebagian telah dibudidayakan untuk perkebunan karet dan ladang dengan luas 4.046 ha atau 8,03 persen dari total luas wilayah kota.

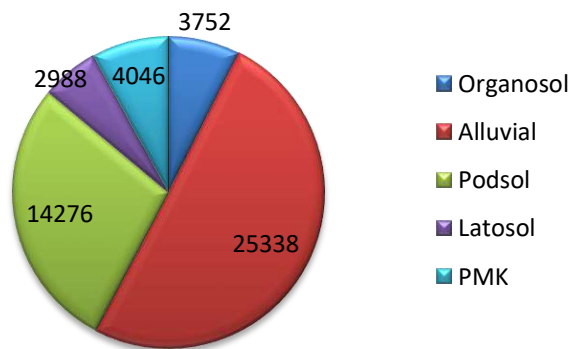
Tabel 2.1.
Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas Area		Jenis Tanah				
		(Ha)	(%)	Organosol	Alluvial	Podsol	Latasol	PMK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Singkawang Selatan	22.448	45	1.052	11.784	2.880	2.988	3.744
2.	Singkawang Timur	16.626	33	2.200	3.926	10.500	-	-
3.	Singkawang Utara	6.665	13	500	6.165	-	-	-

No.	Kecamatan	Luas Area		Jenis Tanah				
		(Ha)	(%)	Organosol	Alluvial	Podsol	Latasol	PMK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Singkawang Barat	1.504	3	-	904	600	-	-
5.	Singkawang Tengah	3.157	6	-	2.559	296	-	302
Jumlah		50.400	100,00	3.752	25.338	14.276	2.988	4.046
Persentase (%)		100,00		7,44	50,27	28,33	5,93	8,03

Sumber: KDA Kota Singkawang 2023

Grafik 2.2
Luas (Ha) Menurut Jenis Tanah Tahun 2022



Sumber: KDA Kota Singkawang 2023

2.1.1.2. Topografi

Berdasarkan topografi, wilayah kota di Singkawang sebagian besar merupakan wilayah dataran dan selebihnya wilayah bukit dan gunung. Wilayah dataran mencapai 31.904 hektar tersebar di 5 kecamatan, sedang bukit dan gunung seluas 18.496 hektar sebagian besar di wilayah Singkawang Timur dan Singkawang Selatan, sedikit di sebelah Barat dan Tengah, sedangkan di Singkawang Utara tidak terdapat wilayah pegunungan dan perbukitan. Luas wilayah tergenang mencapai 14.147 hektar (28,07 persen dari total luas wilayah) tersebar diseluruh kecamatan. Untuk daerah tergenang, Kecamatan Singkawang Timur merupakan kecamatan yang paling luas tergenang (6.126 hektar), sedangkan Kecamatan Singkawang Barat wilayahnya paling sedikit tergenang (1.206 hektar). Luas wilayah yang tidak tergenang mencapai 36.253 hektar (71,93 persen dari total wilayah), dari 36.253 hektar yang tidak tergenang 8,32 persen jenis porous dan sisanya 91,68 persen bukan porous.

Dilihat dari tekstur tanah, maka sebagian besar luas wilayah Kota Singkawang

terdiri dari jenis tanah halus yang meliputi areal 24.238 hektar (48,09 persen), berikutnya jenis tanah sedang 18.496 hektar (36,70 persen), jenis tanah kasar 3.168 hektar (6,29 persen), jenis tanah gambut 3.940 hektar (7,82 persen), jenis tanah rawa 256 (0,51 persen) dan jenis tanah lainnya 302 (0,60 persen). Jika berdasarkan kelas lereng, maka sebagian besar luas wilayah Kota Singkawang berada pada kelas kurang dari 2 persen (37.236 hektar atau 73,88 persen), dan luas wilayah paling kecil berada pada kelas diatas 40 persen (812 hektar atau 1,61 persen). Berdasarkan penggunaan tanah, sebagian besar luas tanah di Kota Singkawang adalah perkebunan (45,60 persen), hutan (15,19 persen) dan sawah irigasi non teknis (12,92 persen).

2.1.1.3. Penggunaan Lahan

Berdasarkan penggunaan lahan, sebagian besar luas tanah di Kota Singkawang adalah perkebunan (45,60 persen), hutan (15,19 persen) dan sawah irigasi non teknis (12,92 persen). Dari 50.400 hektar luas wilayah Kota Singkawang, areal untuk pemukiman hanya 358,0 hektar (0,71 persen), sementara areal untuk industri merupakan yang areal yang paling kecil yaitu hanya sekitar 10 hektar (0,02 persen). Areal-areal yang lain adalah berupa padang/semak (10,73 persen), hutan belukar (6,51 persen), kebun campuran (5,22 persen), pertambangan (2,61 persen), dan lain-lain (0,50 persen).

Tabel 2.2.
Penggunaan Lahan Kota Singkawang

No	Uraian	Luas Areal (Ha)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Permukiman	358,00	0,71
2	Industri	10,00	0,02
3	Pertambangan	1.317,00	2,61
4	Sawah Irigasi Non Teknis	6.512,00	12,92
7	Perkebunan	16.990,00	45,60
8	Hutan	8.165,00	15,19
9	Padang/Semak	5.408,00	10,73
10	Perairan Darat	-	-
11	Tanah Terbuka	-	-
12	Lain-lain	250,00	0,50
JUMLAH/TOTAL		50.400,00	100,00

Sumber : KDA Kota Singkawang 2023

2.1.2. Aspek Demografi

Kota Singkawang merupakan salah satu daerah berpenduduk multi etnis, dengan keragaman corak budayanya. Kemajemukan penduduk ini berdampak pada terjadinya pembauran (asimilasi) budaya dan sosial. Asimilasi terjadi diantaranya melalui perkawinan, hubungan kerja, dan interaksi hubungan bertetangga yang kemudian melahirkan model kehidupan berkeluarga dan sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Data demografi Kota Singkawang tahun 2022 berdasarkan BPS Kota Singkawang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Jumlah Kelurahan, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kota Singkawang Tahun 2022

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Km)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk Per Km ²
1	Singkawang Selatan	4	224,48	56.511	251
2	Singkawang Timur	5	166,26	24.318	146
3	Singkawang Utara	7	66,65	33.607	504
4	Singkawang Barat	4	15,04	53.584	3.562
5	Singkawang Tengah	6	31,57	72.307	2.290
Jumlah/ Total		26	504,00	240.327	476

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, 2023

Tabel 2.4.
Banyaknya RT dan RW Menurut Kecamatan di Kota Singkawang Tahun 2022

No	Kecamatan	Kelurahan	RT	RW
1	Singkawang Selatan	4	124	25
2	Singkawang Timur	5	62	20
3	Singkawang Utara	7	89	38
4	Singkawang Barat	4	140	36
5	Singkawang Tengah	6	172	42
Jumlah/ Total		26	587	161

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, 2023

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

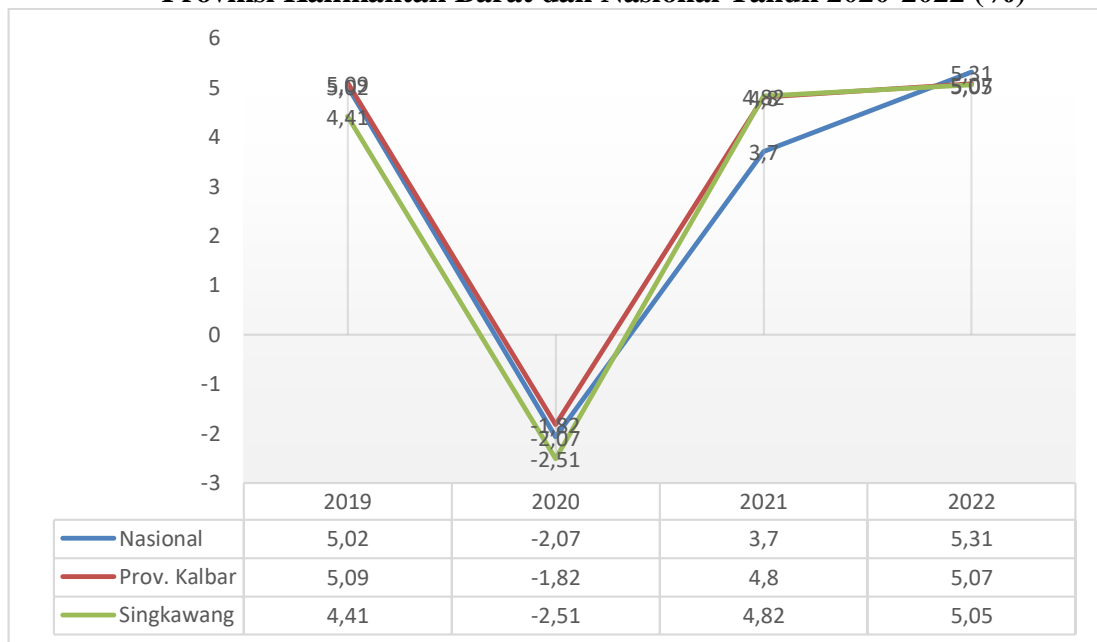
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang dapat diketahui dengan menganalisis nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi yang ada pada nilai Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Selama tahun 2019-2022 terjadi perubahan nilai laju pertumbuhan PDRB ADHK yang meningkat. Hal yang sama dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional.

Grafik Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Singkawang pada tahun 2019-2022 rendah dibanding Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat. Namun pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk Kota Singkawang lebih tinggi dibanding dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional yaitu 4,82%, Provinsi Kalimantan Barat sebesar 4,80%, dan Nasional sebesar 3,70%. Untuk tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi baik Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional bahkan dunia mengalami guncangan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Grafik 2.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang,
Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2020-2022 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020-2022

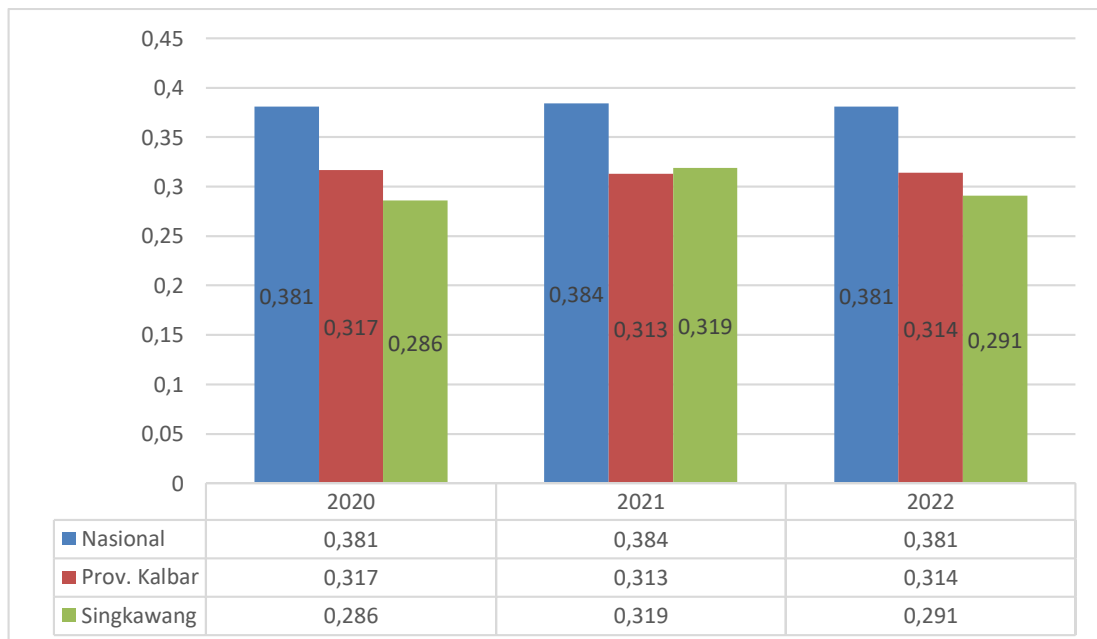
2. Indeks Gini

Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan penduduk adalah rasio gini atau indeks gini. Indeks gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk semakin tinggi, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 tingkat ketimpangan pendapatan semakin rendah, atau mendekati pemerataan sempurna. Badan Pusat Statistik (BPS) mengkategorikan Indeks Gini menjadi tiga tingkat, yaitu rendah (Indeks Gini < 0,3), sedang ($0,3 < \text{Indeks Gini} < 0,4$) dan tinggi (Indeks Gini > 0,4).

Indeks gini Kota Singawang dari tahun 2020-2022 menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Tercatat indeks gini tertinggi (kategori sedang) pada tahun 2021 sebesar 0,3190. Dan kategori rendah pada tahun 2020 sebesar 0,2860. Namun indeks gini Kota Singawang selalu berada di bawah indeks gini nasional. Sedangkan jika dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Kalimantan Barat, juga berada di bawah hanya pada tahun 2021 Kota Singawang berada di atas Provinsi Kalimantan Barat.

Data Indeks Gini Kota Singawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional pada tahun 2020-2021 berdasarkan BPS ditampilkan sebagai berikut:

Grafik 2.4.
Indeks Gini Kota Singawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional
Tahun 2020-2022 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

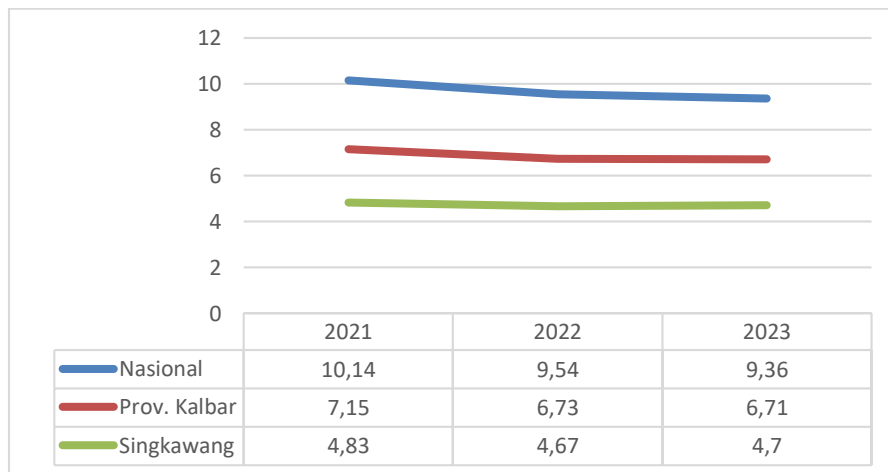
3. Angka Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kesejahteraan ekonomi. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Persentase Penduduk Miskin di Kota Singkawang tahun 2021-2023 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin Kota Singkawang sebesar 4,83%, tahun 2022 turun sebesar 0,16% menjadi 4,67%, dan naik kembali pada tahun 2023 sebesar 0,03% menjadi 4,70%. Dalam tiga tahun, pada tahun 2021 cenderung lebih besar dari tahun 2022 dan 2023, dan juga terjadi di Provinsi Kalimantan Barat hingga Nasional. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19, yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pendapatannya menjadi berkurang. Tahun 2022 dan 2023 kondisi perekonomian mulai membaik karena masyarakat sudah mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi dan program pemerintah berjalan dengan baik.

Data persentase penduduk miskin Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional dari tahun 2021-2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 2.5.
Persentase Penduduk Miskin Kota Singkawang,
Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional
Tahun 2021-2023 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

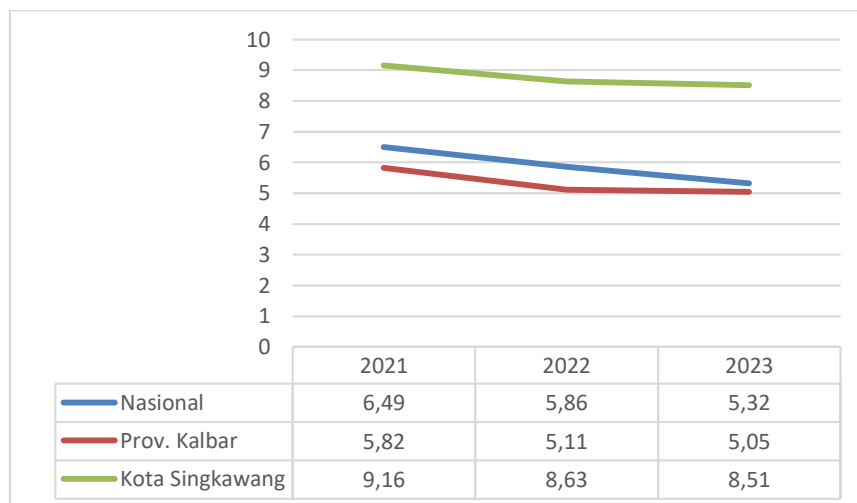
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja – 15 tahun ke atas). Menurut BPS, pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi dalam status mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Singkawang pada tahun 2021-2023 mengalami penurunan. Tahun 2021 nilai TPT Kota Singkawang sebesar 9,16% , nilainya turun pada tahun 2022 sebesar 0,53% menjadi 8,63%, dan tahun 2023 turun sebesar 0,12% menjadi 8,51%. Tahun 2021 lebih besar dibandingkan tahun 2022, dan 2023. Hal ini disebabkan tahun 2021 adanya pandemi Covid-19 dan banyak karyawan perusahaan yang diberhentikan. Tetapi berangsur membaik pada tahap pemulihan ekonomi tahun 2022 dan 2023.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Singkawang masih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 2.6.
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2021-2023 (%)



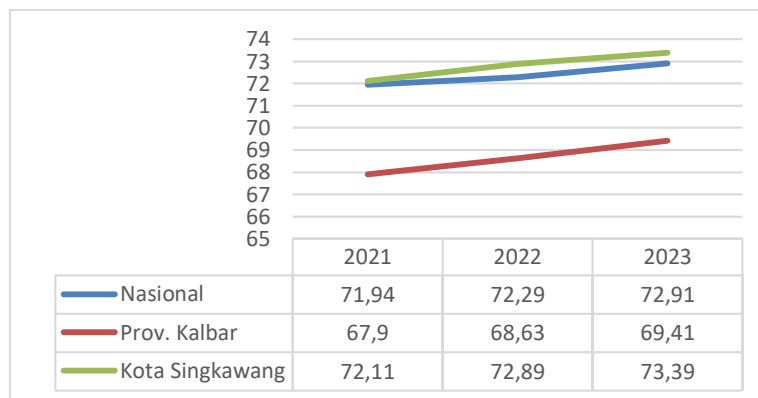
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/ keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia yaitu: umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Serta dimensi standar hidup layak diwakili dengan indikator pengetahuan per kapita. BPS mengelompokkan capaian IPM mejadi empat kategori yaitu Rendah ($IPM < 60$); Sedang ($60 \leq IPM \leq 70$); Tinggi ($70 \leq IPM \leq 80$), dan Sangat Tinggi ($IPM \geq 80$).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Singkawang terus meningkat dari tahun 2021-2023. Pada tahun 2021 nilai IPM Kota Singkawang sebesar 72,11%. Mengalami peningkatan sebesar 0,78% di tahun 2022 menjadi 72,89%. Dan pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 0,5% menjadi 73,39%. Dengan capaian ini status pembangunan manusia di Kota Singkawang sudah berada di level tinggi. IPM Kota Singkawang berada di atas Provinsi Kalimantan Barat, bahkan Nasional. IPM Provinsi Kalimantan Barat berada dikategori sedang. Dan Nasional berada dikategori tinggi. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.7.
Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2021-2023 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

2.2.1. Kesejahteraan Sosial Budaya

1. Indeks Keluarga Sehat

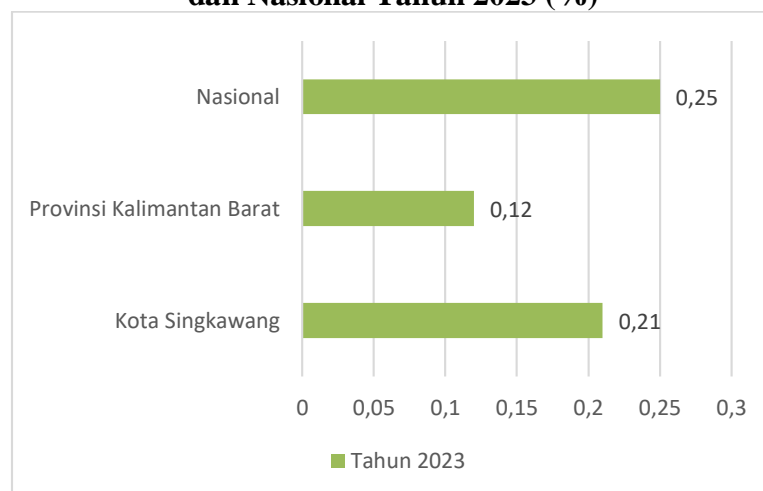
Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. Keluarga yang sehat merupakan

pondasi bagi masa depan bangsa. Keluarga yang sehat adalah keluarga kesejahteraan fisik, mental, sosial dan spiritual yang optimal. IKS merupakan suatu perhitungan untuk mengetahui apakah keluarga tersebut termasuk keluarga sehat, prasehat, atau tidak sehat dengan ketentuan nilai IKS Sehat $> 0,80$, IKS Prasehat $0,50-0,80$, dan IKS Tidak Sehat $< 0,5$.

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menerapkan 12 indikator keluarga sehat. 12 Indikator yang menyusun IKS, yaitu: Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB); Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; Bayi mendapat imunisasi dasar yang lengkap; Bayi mendapat ASI eksklusif; Balita mendapat pemantauan pertumbuhan; Penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar; Penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan; Penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan; Anggota keluarga tidak ada yang merokok; Keluarga merupakan anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Keluarga memiliki akses ke sarana air bersih; dan Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih.

Data Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Singkawang yang tersedia hanya pada tahun 2023 sebesar 0,21. Sedangkan nilai IKS Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 sebesar 0,12, dan Nasional sebesar 0,25. Data IKS Kota Singkawang lebih tinggi dibanding Provinsi Kalimantan Barat, namun lebih rendah dibanding Nasional. Secara keseluruhan IKS Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional pada tahun 2023 masuk dalam IKS Tidak Sehat. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.8.
Indeks Keluarga Sehat Kota (IKS) Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2023 (%)



Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, 2023

2. Indeks Kualitas keluarga

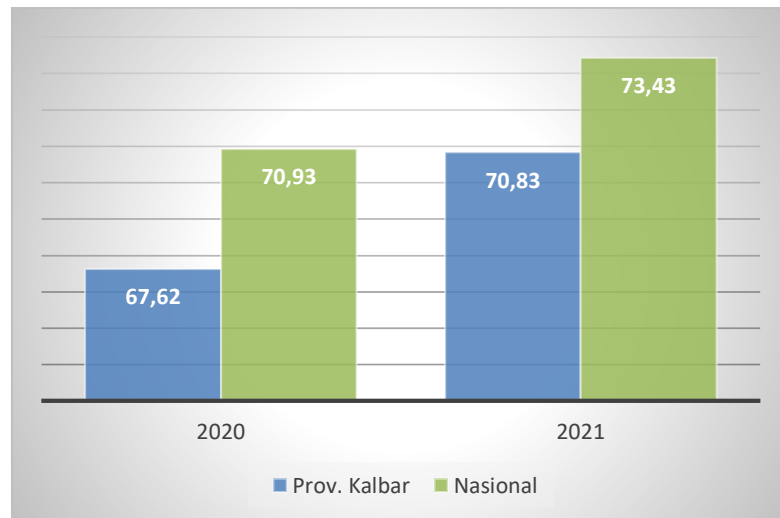
Indeks Kualitas Keluarga (IKK) adalah suatu pengukuran pencapaian kualitas keluarga. IKK diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. IKK menjadi tolak ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di tingkat pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dengan kategori indeks antara 0,00 sampai 100 dengan kategori indeks IKK < 50 (Kurang Responsif Gender dan Hak Anak), IKK 50-75 (Cukup Responsif Gender dan Hak Anak), dan IKK > 75 (Responsif Gender dan Hak Anak).

Terdapat 25 indikator dan 5 (lima) dimensi pembentukan IKK, antara lain: (1) Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS) terdiri dari 2 indikator yaitu akta kelahiran anak dan keluarga tinggal bersama; (2) Dimensi Kualitas Keluarga Fisik (KKF) terdiri atas 6 indikator yaitu makan makanan sehat bergizi untuk keluarga, keluhan kesehatan keluarga, prevalensi kurang gizi anggota keluarga, tempat tidur terpisah antara orang tua dan anak, anak merokok, dan anggota keluarga sakit hingga terganggu; (3) Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) terdiri atas 6 indikator yaitu memiliki rumah, tidak miskin, memiliki rekening tabungan, memiliki asuransi kesehatan, anak putus sekolah, dan perempuan bekerja; (4) Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) terdiri atas 5 indikator yaitu kekerasan terhadap anak, menjadi korban kejahatan, bepergian, dan kegiatan bersama anak dan orang tua (indikator dobel); dan (5) Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB) terdiri atas 6 indikator yaitu perkawinan usia anak, memiliki tempat cuci tangan, melakukan kegiatan sosial, tinggal bersama lansia, melakukan kegiatan keagamaan, dan adanya akses internet.

Data Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Kota Singkawang tidak tersedia. Hanya IKK Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional yang tersedia. Untuk IKK Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020-2021 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 nilai IKK Provinsi Kalimantan Barat sebesar 67,62 yang kemudian mengalami pertumbuhan sebesar 3,21 persen menjadi 70,83. Peningkatan nilai IKK juga terjadi pada skala nasional, dimana nilai IKK Nasional mengalami pertumbuhan sebesar 2,50% dari 70,93 pada tahun 2020 menjadi 73,43 pada tahun 2021. Berdasarkan nilai IKK tersebut, Indonesia masuk ke dalam kategori negara yang cukup responsif terhadap gender dan

hak anak. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.9.
Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2020-2021 (%)



Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

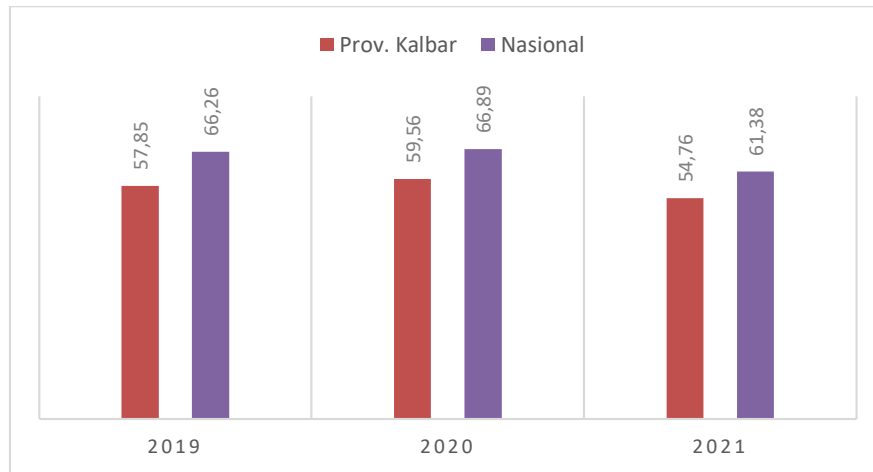
3. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. IPA dibentuk dari Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang berdasarkan 5 (lima) klaster hak anak dalam Konvensi Hak Anak. Lima klaster yang menjadi dasar pembentukan IPA adalah Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus. Selanjutnya IPKA merupakan indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar.

Data IPA untuk Kota Singkawang tidak tersedia. Nilai IPA Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2019-2021 nilai IPA Provinsi Kalimantan Barat mengalami perkembangan positif namun pada tahun 2021 terjadi penurunan IPA. Nilai IPA tertinggi Provinsi Kalimantan Barat terjadi pada tahun 2020 sebesar 59,56, yang kemudian turun pada tahun 2021 menjadi 54,76. Kondisi serupa juga terjadi pada nilai IPA Nasional. Nilai IPA Nasional mengalami tren kenaikan pada periode tahun 2020 sebesar 66,89, dan turun pada tahun 2021 menjadi 61,38. Namun secara

keseluruhan IPA Provinsi Kalimantan Barat dibawah nilai IPA Nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.10.
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2021 (%)



Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019-2021

4. Indeks Gender

Upaya pembangunan manusia diperuntukkan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, tanpa harus memandang adanya perbedaan jenis kelamin. Capaian pembangunan manusia berbasis gender dilihat diantaranya dari nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Selain itu digunakan pula Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai indikator pendukung dalam pembangunan manusia berbasis gender.

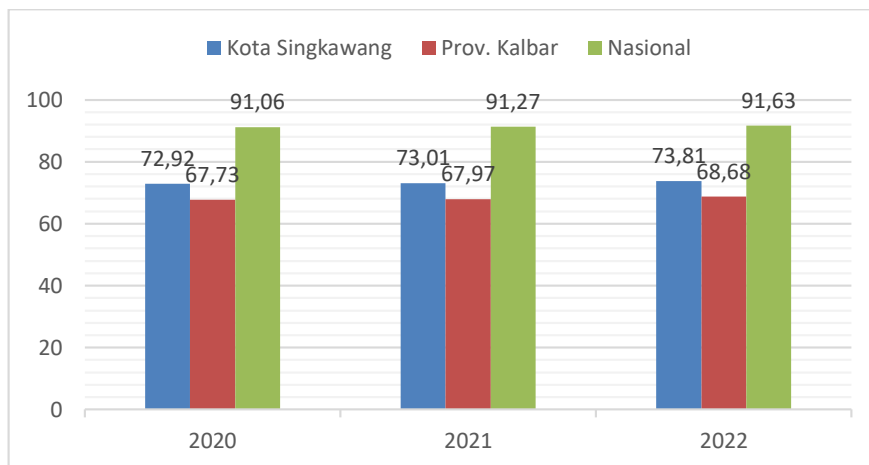
a. Indeks Pembangunan Manusia-Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Manusia-Gender biasa disingkat IPG merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antara gender dalam pencapaian pembangunan manusia. Nilai IPG yaitu perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM laki-laki. Adapun hasil indeks ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 menjadi patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka 100 merupakan nilai rasio paling sempurna. Menurut Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), IPG dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu kategori rendah (IPG < 90,00) dan tinggi (IPG > 90,00).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional pada tahun 2020-2022 menunjukkan kenaikan. Namun untuk IPG kota Singkawang dan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020-2022 masuk dalam kategori rendah, sedangkan Nasional masuk dalam kategori tinggi pada tahun 2020-2022. Secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan IPG Nasional, IPG Kota Singkawang dan Provinsi Kalimantan Barat beradajauh di atas IPG Nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.11.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2020-2022 (%)



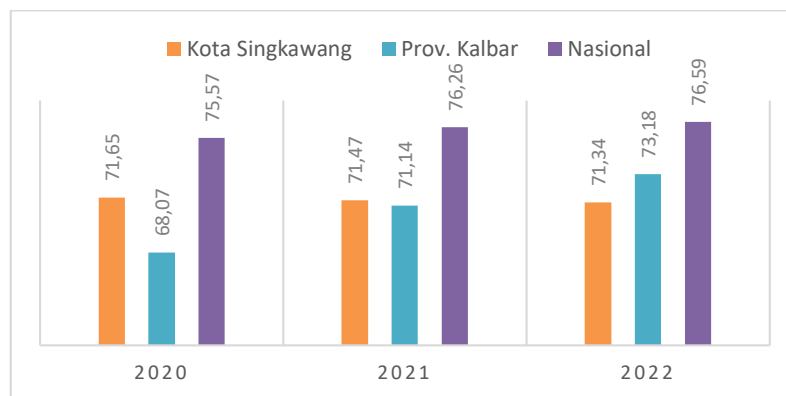
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. IDG dihitung melalui rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Badan Pusat Statistik merumuskan hasil analisis ke dalam skor 0-100 poin, dengan kategori pilihan Rendah (IDG < 50); Sedang ($50 \leq \text{IDG} < 60$); Tinggi ($60 \leq \text{IDG} \leq 80$); dan Sangat Tinggi (IDG > 80).

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Singkawang cenderung menurun dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional pada tahun 2020-2022. Nilai IDG Kota Singkawang dibawah Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional. Hanya pada tahun 2020 dan 2021 nilai IDG Kota Singkawang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Namun secara garis besar nilai IDG Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional masuk kedalam kategori tinggi, keterlibatan perempuan di politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi masuk dalam kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.12.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2020-2022 (%)



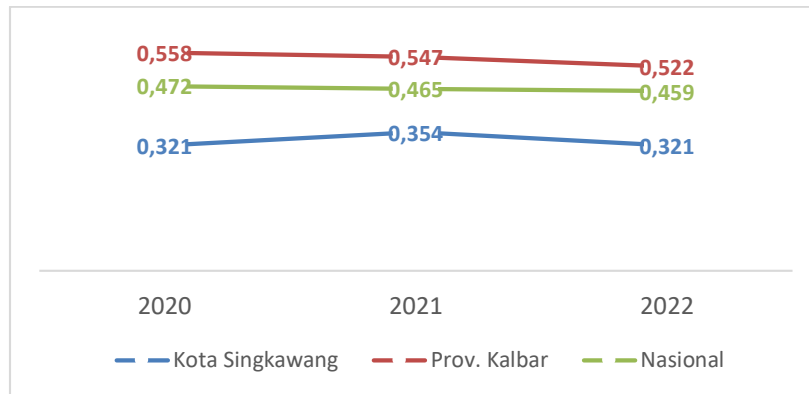
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

c. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian atau kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Pengukuran IKG dilakukan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian pembangunan menurut gender, dan memformulasikan kebijakan yang lebih tepat.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Singkawang pada tahun 2020-2022 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Nilai IKG Kota Singkawang tahun 2020 dan 2022 sebesar 0,321, dan tahun 2021 sebesar 0,354. Dan Nilai IKG Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional cenderung menurun dari tahun 2020-2022. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender semakin kecil atau kesetaraan semakin membaik. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.13.
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Singkawang,
Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2020-2022 (%)



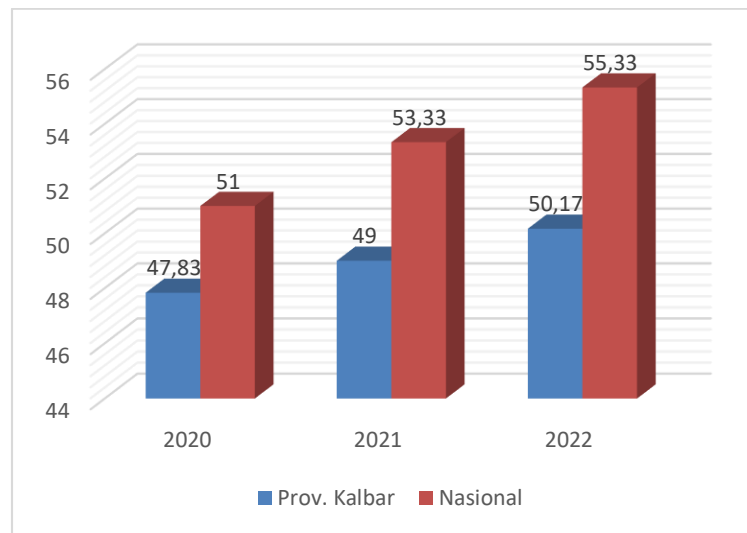
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

5. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrument untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP digunakan sebagai tolok ukur pembangunan berdasarkan tiga lapisan, yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan yang dipetakan dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunan. 5 (lima) domain tersebut antarlain: Pendidikan (dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah; APK Seklah Menengah; APK Perguruan Tinggi), Kesehatan dan Kesejahteraan (dengan indikator Angka Kesakita Pemuda; Persentase Korban Kejahatan; Persentase Pemuda yang Merokok; Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil); Lapangan dan Kesempatan Kerja (dengan indikator Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih; Tingkat Pengangguran Terbuka), Partisipasi dan Kepemimpinan (dengan indikator Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan; Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi; Persentase pemuda yang memberikan saran / pendapat dalam rapat), Gender dan Diskriminasi (dengan indikator Angka perkawinan usia anak; Persentase pemuda perempuan berusia 16-24 tahun yang sedang menempuh pendidikan Tingkat SMA ke atas; dan Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

Kondisi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Singkawang tidak tersedia. Nilai IPP Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional pada tahun 2020-2022 mengalami peningkatan. Namun Nilai IPP Provinsi Kalimantan Barat masih dibawah nilai nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.14.
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Singkawang,
Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2020-2022 (%)



Sumber : Kementerian Pemuda dan Olahraga,

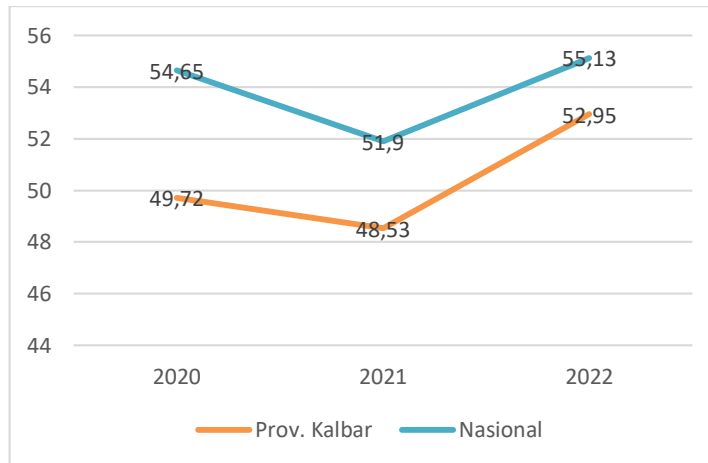
[https://ipp.sarikata.com/#:~:text=Indeks%20Pembangunan%20Pemuda%20\(IPP\)%20adalah,kemajkem%20pembangunan%20pemuda%20di%20Indonesia.](https://ipp.sarikata.com/#:~:text=Indeks%20Pembangunan%20Pemuda%20(IPP)%20adalah,kemajkem%20pembangunan%20pemuda%20di%20Indonesia.)

6. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrument yang disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK terdiri dari 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global. Ketujuh dimensi tersebut mencakup dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Kriteria capaian IPK adalah $IPK \leq 20$ (Kurang), $20 < IPK \leq 40$ (Sedang), $40 < IPK \leq 60$ (Cukup), $60 < IPK \leq 80$ (Baik), $80 < IPK \leq 100$ (Amat Baik).

Data IPK untuk Kota Singkawang tidak tersedia. Nilai IPK Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional pada tahun 2020-2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, yaitu untuk Provinsi Kalimantan Barat sebesar 48,53, sedangkan Nasional sebesar 51,90. Nilai IPK Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional masuk kategori Cukup ($40 < IPK \leq 60$). Dan Nilai IPK Provinsi Kalimantan Barat masih di bawah Nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.15.
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2020-2022 (%)



Sumber : Kementerian Pendidikan, Kementerian PPN/ Bappenas, Badan Pusat Statistik, 2020-2022

2.3. Aspek Daya Saing

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah pada satu periode waktu tertentu. Nilai PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan nilai output dari seluruh sektor produksi. Perhitungan PDRB dilakukan dengan menggunakan dasar atas harga berlaku dan atas harga konstan.

PDRB yang dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) atau PDRB nominal disusun menggunakan harga pada tahun berjalan sehingga mampu menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada periode tersebut. Pada umumnya PDRB ADHB digunakan untuk melihat kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

PDRB ADBH merupakan jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (*region*). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun berjalan. Persentase distribusi PDRB ADHB menunjukkan struktur perekonomian di suatu wilayah.

Metode perhitungan PDRB yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), antarlain:

1) Pendekatan Produksi

Komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi lapangan usaha. Pendekatan ini sering dikenal dengan PDRB menurut lapangan usaha;

2) Pendekatan Pengeluaran

Komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut komponen penggunaannya. Pendekatan ini sering dikenal dengan PDRB menurut pengeluaran.

Metode pendekatan perhitungan PDRB, antarlain:

1) Pendekatan produksi;

2) Pendekatan pendapatan;

3) Pendekatan pengeluaran

Struktur perekonomian Kota Singkawang dapat ditinjau dari nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi yang ada pada PDRB ADHB. Nilai distribusi tersebut dapat menunjukkan besaran kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB Kota Singkawang. Dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, maka dapat diketahui seberapa besar peran suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah.

Distribusi PDRB menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor lapangan usaha dalam suatu wilayah. Sektor lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. Selama tahun 2010-2022, distribusi PDRB Kota Singkawang terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Kontruksi; Industri; Pengolahan; Pertanian Kehutanan dan Perikanan.

Pada tahun 2022, struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Singkawang didominasi lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu sebesar 19,8%. Sumbangan terbesar berikutnya pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Kontruksi sebesar 16,4%; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 14,4%; dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 11,8%. Selain itu sumbangan PDRB lapangan usaha lainnya masih di bawah 7%.

Nilai kontribusi di atas menunjukkan bahwa perekonomian Kota

Singkawang sudah tidak bergantung pada sektor primer, melainkan sudah bergeser pada sektor sekunder. Selama tahun 2020-2022, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi sektor utama yang membentuk struktur perekonomian dan menjadi sektor unggulan di Kota Singkawang.

2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

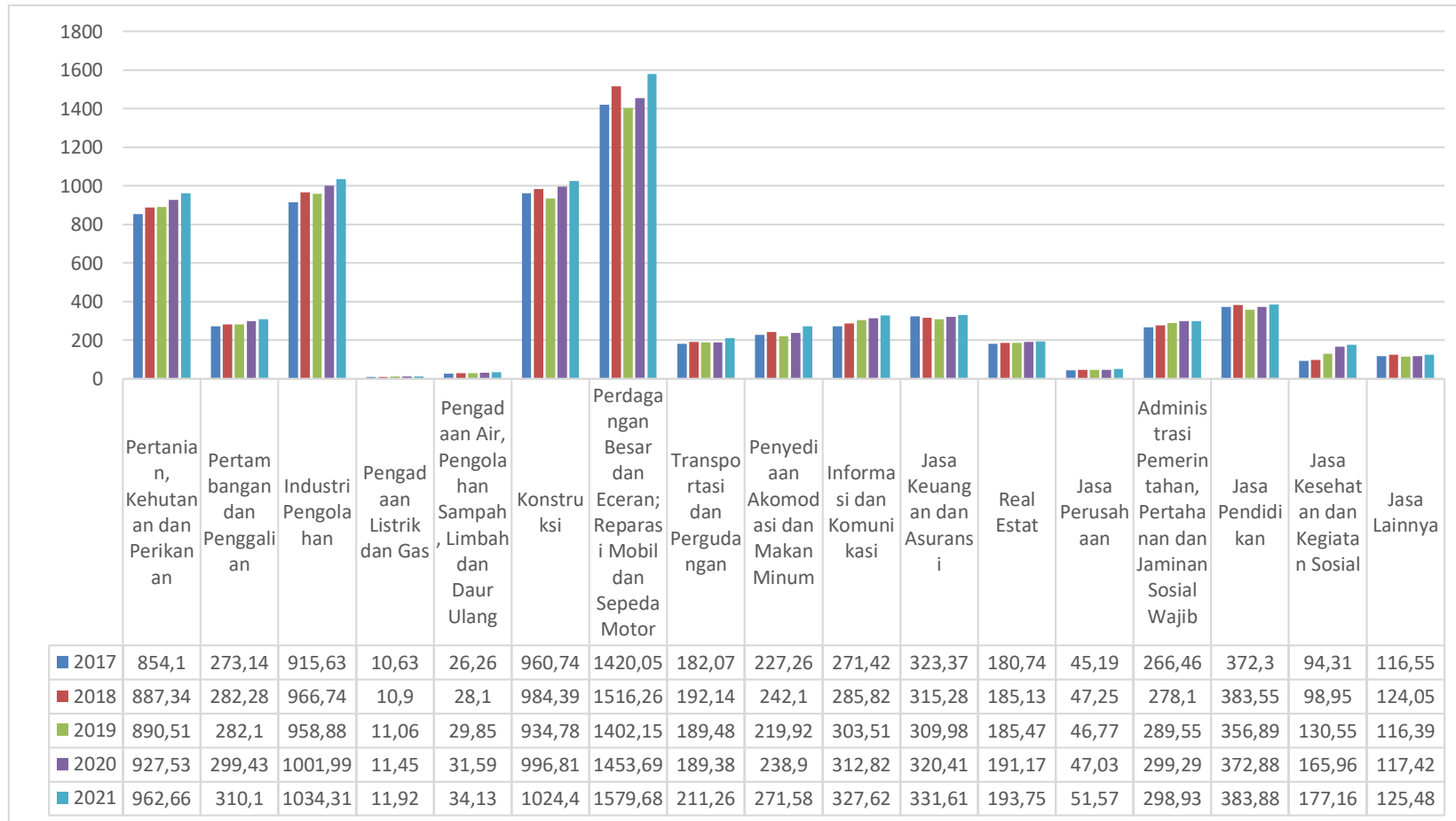
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah pada satu periode waktu tertentu. Nilai PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan nilai output dari seluruh sektor produksi. Perhitungan PDRB dilakukan dengan menggunakan dasar atas harga berlaku dan atas harga konstan.

PDRB yang dihitung Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) atau PDRB riil disusun menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHK digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.5.
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Singkawang
Tahun 2017-2022

No	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	854.1	2.91	887.34	3.89	890.51	0.36	927.53	4.16	962.66	3.79	962.66	3.79
2	Pertambangan dan Penggalian	273.14	4.19	282.28	3.35	282.1	-0.06	299.43	6.14	310.1	3.56	310,10	3,56
3	Industri Pengolahan	915.63	14.01	966.74	5.58	958.88	-0.9	1001.99	4.58	1034.31	3.22	1034,31	3,22
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10.63	0.16	10.9	2.61	11.06	1.46	11.45	3.46	11.92	4.18	11,92	4,18
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26.26	0.41	28.1	7	29.85	6.21	31.59	5.85	34.13	8.03	34,13	8,03
6	Konstruksi	960.74	14.68	984.39	2.46	934.78	-5.04	996.81	6.64	1024.4	2.77	1024,40	2,77
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1420.05	21.74	1516.26	6.78	1402.15	-7.53	1453.69	3.68	1579.68	8.67	1579,68	8,67
8	Transportasi dan Pergudangan	182.07	2.78	192.14	5.53	189.48	-1.39	189.38	-0.05	211.26	11.55	211,26	11,55
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	227.26	3.47	242.1	6.53	219.92	-9.16	238.9	8.63	271.58	13.68	271,58	13,68
10	Informasi dan Komunikasi	271.42	4.07	285.82	5.31	303.51	6.19	312.82	3.07	327.62	4.73	327,62	4,73
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	323.37	4.94	315.28	-2.5	309.98	-1.68	320.41	3.37	331.61	3.49	331,61	3,49
12	Real Estat	180.74	2.77	185.13	2.43	185.47	0.19	191.17	3.07	193.75	1.35	193,75	1,35
13	Jasa Perusahaan	45.19	0.69	47.25	4.57	46.77	-1.03	47.03	0.57	51.57	9.64	51,57	9,64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	266.46	4.07	278.1	4.37	289.55	4.12	299.29	3.36	298.93	-0.12	298,93	-0,12
15	Jasa Pendidikan	372.3	5.69	383.55	3.02	356.89	-6.95	372.88	4.48	383.88	2.95	383,88	2,95
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	94.31	1.44	98.95	4.92	130.55	31.93	165.96	27.13	177.16	6.75	177,16	6,75
17	Jasa Lainnya	116.55	1.81	124.05	6.43	116.39	-6.18	117.42	0.89	125.48	6.86	125,48	6,86
	PDRB	6540.22	100	6828.39	4.41	6657.05	-2.51	6977.77	4.82	7330.03	5.05	7330,03	5,05

Grafik 2.16.
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Singkawang
Tahun 2017-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Singkawang

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,68%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi terendah dicapai oleh laoangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -0,12%. PDRB ADHK Kota Singkawang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan setelah oenurunan di tahun 2019 disebabkan covid-19, kemudian meningkat lagi di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Singkawang mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik.

3. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

Indikator lain berhubungan dengan PDRB yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB Perkapita. PDRB perkapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB perkapita adalah indikator penting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan.

Grafik 2.17.
PDRB Perkapira Kota Singkawang Tahun 2018-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2023

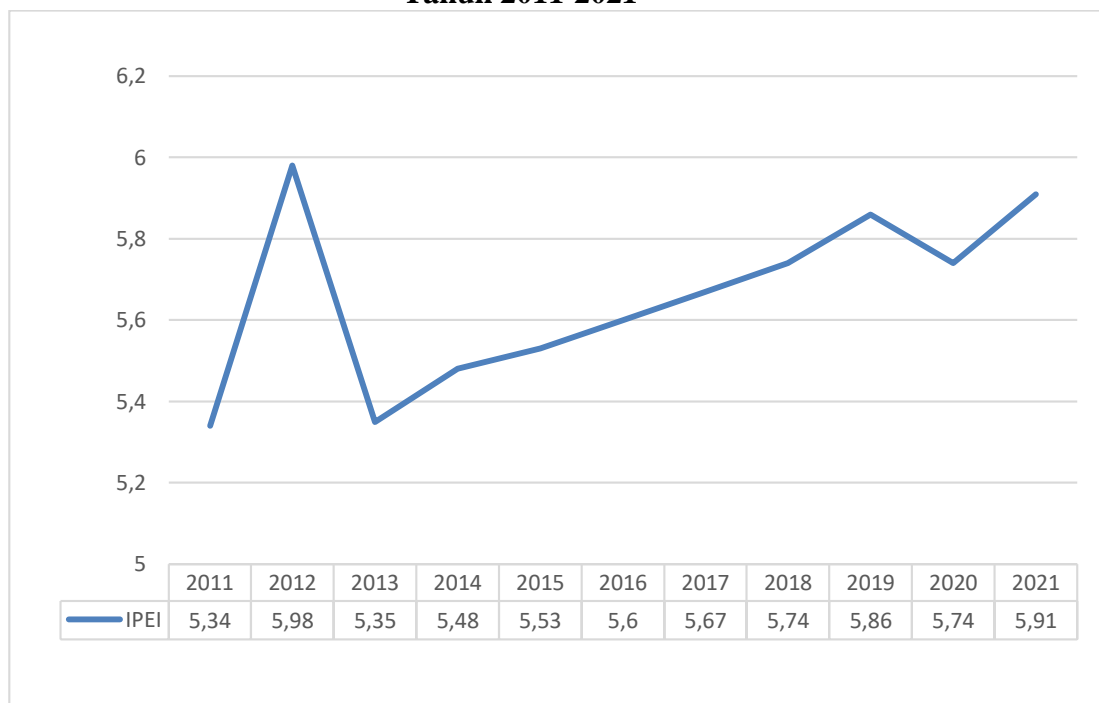
PDRB perkapita Kota Singkawang dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami peningkatan, di tahun 2018 mencapai Rp44.240,57 dan meningkat hingga mencapai Rp49.413,04 di tahun 2022.

4. Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks Ekonomi Inklusif atau Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level Nasional, Provinsi dan Kabupaten / Kota dengan tujuan menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

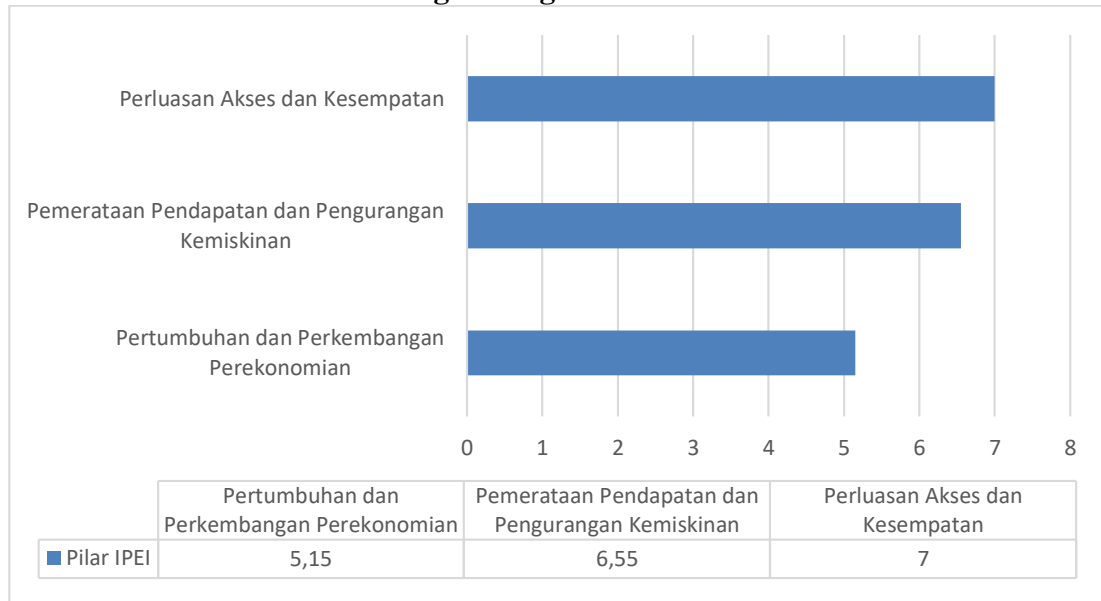
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan dengan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Kriteria capaian IPEI adalah IPEI 1-3 (tidak memuaskan), IPEI 4-7 (memuaskan), IPEI 10 (sangat memuaskan).

Grafik 2.18.
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Singkawang
Tahun 2011-2021



Sumber: Kementerian PPN / Bappenas, 2023

Grafik 2.19.
Nilai Pilar Pembentuk Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
Kota Singkawang Tahun 2021



Sumber: Kementerian PPN / Bappenas, 2023

Indeks pembangunan ekonomi inklusif Kota Singkawang pada tahun 2018 sebesar 5,74 meningkat di tahun 2019 sebesar 5,86 dan turun di tahun 2020 yang disebabkan covid-19.

2.3.2. Daya Saing SDM

1. Indeks Pendidikan

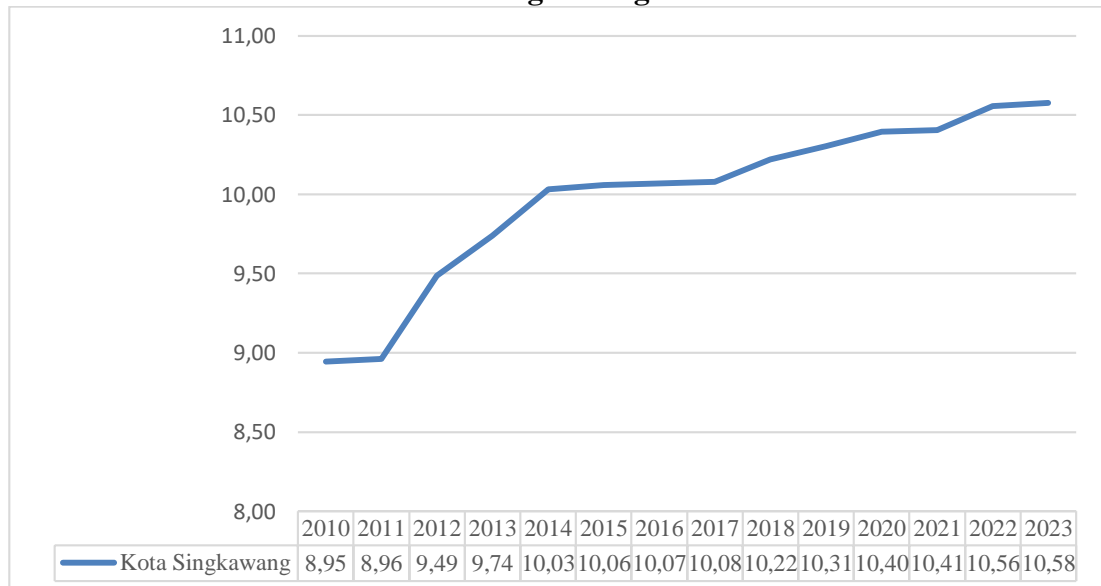
Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin didalamnya sangat menentukan produktivitas suatu bangsa. Indeks pendidikan digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan sebagai salah satu variabel pembangunan manusia. Indeks pendidikan ini merupakan penggabungan dua indikator pendidikan yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Populasi yang digunakan dalam penghitungan rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk berumur 25 tahun ke atas, dengan asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

Indeks Pendidikan Kota Singkawang dihitung menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Singkawang pada tahun 2010-2023 menunjukkan perkembangan yang positif, dimana nilainya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, Indeks Pendidikan Kota Singkawang sebesar 8,95. Dalam kurun waktu 13 tahun nilainya meningkat poin dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,63%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di Kota Singkawang semakin membaik dan terjadi peningkatan kualitas.

Grafik 2.20.
Indeks Pendidikan Kota Singkawang Tahun 2010-2023

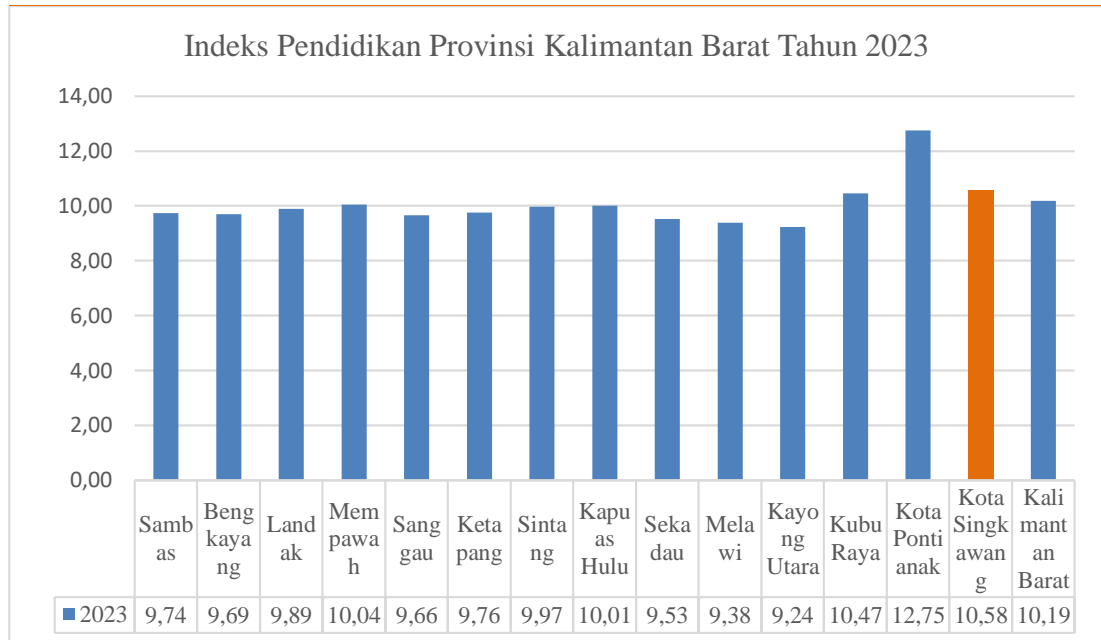


Sumber : BPS Kota Singkawang, 2010-2023

Apabila dibandingkan dengan indeks pendidikan kota di Provinsi Kalimantan Barat, indeks pendidikan Kota Singkawang cenderung tinggi. Pada tahun 2023 indeks pendidikan Kota Singkawang adalah 10,58 dan berada di peringkat ketiga. Pada peringkat kedua ada Kabupaten Kubu Raya dengan nilai

indeks pendidikan sebesar 10,47 dan peringkat pertama Kota Pontianak dengan nilai Indeks Pendidikan sebesar 12,75.

Grafik 2.21.
Indeks Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Kota Singkawang, 2023

2. Angka Literasi / Numerasi

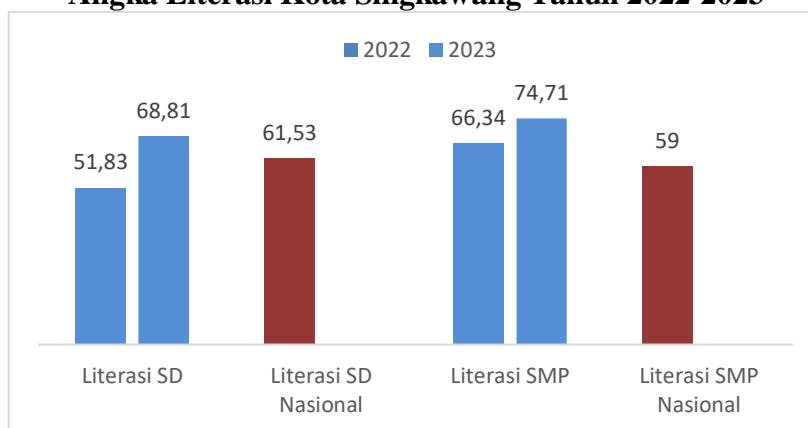
Literasi Numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Menggunakan informasi yang ditampilkan dalam berbagai grafik, tabel, bagan, dan menggunakan interpretasi hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Rata-rata nilai peserta didik berdasarkan kompetensi membaca teks informasi dan teks sastra.

Kemampuan Literasi direfleksikan dengan persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksikan, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Rata-rata nilai peserta didik berdasarkan kompetensi membaca teks informasi dan teks sastra.

Kemampuan Numerasi ialah Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Rata-rata nilai peserta didik berdasarkan kompetensi pada domain Bilangan, Aljabar, Geometri, Data dan Ketidakpastian.

Angka literasi numerasi Kota Singkawang mengalami peningkatan cukup baik dari tahun 2022 penerapan pertama perhitungan literasi numerasi pada sistem pendidikan Kota Singkawang. Literasi Sekolah Dasar (SD) Umum dengan predikat sedang tahun 2023 mencapai 68,81, naik 16,98 dari 2022 (skor 51,83), sedangkan untuk literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Singkawang tahun 2023 memperoleh predikat baik dengan skor mencapai 74,71, naik 8,37 dari 2022 (skor 66,34).

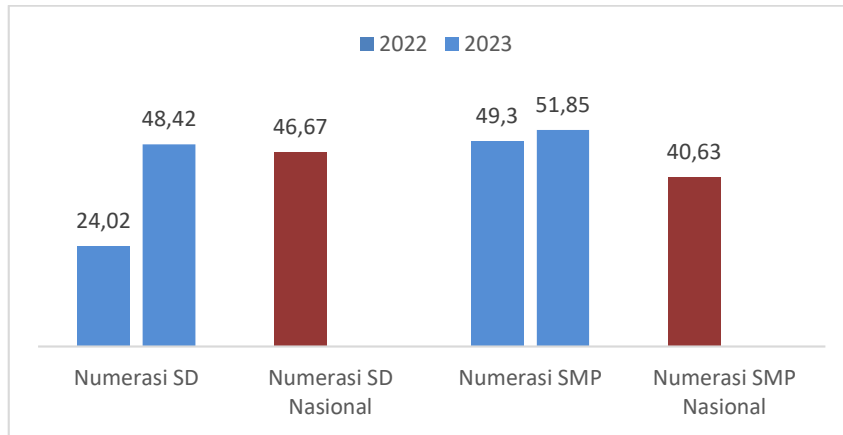
Grafik 2.22.
Angka Literasi Kota Singkawang Tahun 2022-2023



Sumber : Rapor Pendidikan, 2023

Pada numerasi SD Kota Singkawang tahun 2023 memperoleh predikat Sedang dengan skor 48,42, naik 24,4 dari 2022 (skor 24,02) , sedangkan untuk SMP tahun 2023 dengan predikat Sedang dengan skor 51,85, naik 2,55 dari 2022 (skor 49,3). Dibandingkan daerah lain, Kota Singkawang termasuk Peringkat menengah atas (21 - 40%) secara Nasional.

Grafik 2.23.
Angka Numerasi Kota Singkawang Tahun 2022-2023



Sumber : Rapor Pendidikan, 2023

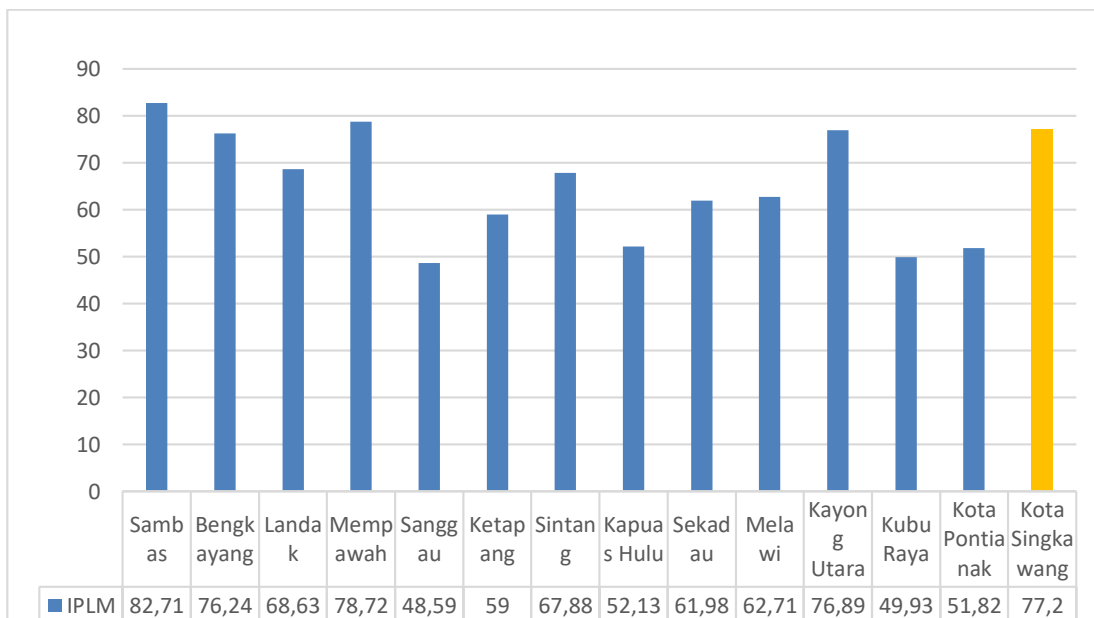
3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat diukur dengan 7 unsur yang mencakup : Pemerataan Layanan Perpustakaan; Ketercukupan Koleksi Perpustakaan; Ketercukupan Tenaga Perpustakaan; Tingkat Kunjungan Masyarakat Per Hari; Perpustakaan ber-SNP; Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi dan Promosi; dan Anggota Perpustakaan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Singkawang tahun 2022 mencapai 77,2% berada di urutan ke 3 setelah Kabupaten Mempawah (78,72) dan Kabupaten Sambas (82,71).

Grafik 2.24.

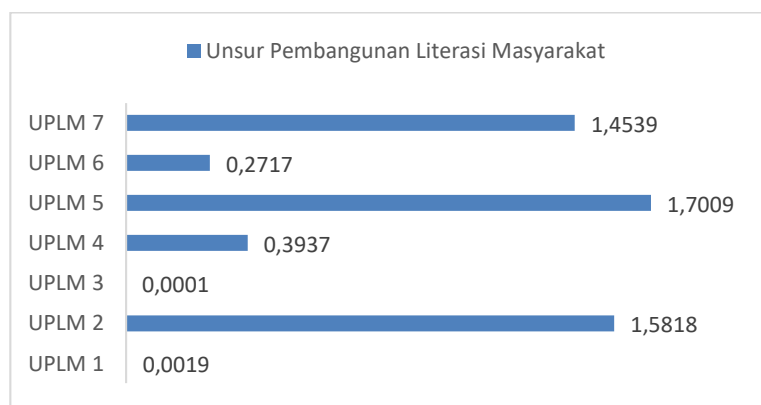
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kalimantan Barat Tahun 2022



Sumber : Satu Data Indonesia, 2022

Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Singkawang didorong oleh UPLM 5 Perpustakaan ber-SNP mencapai 1,7. UPLM 7 : Anggota Perpustakaan mencapai 1,45 dan UPLM 2 : Ketercukupan Koleksi Perpustakaan 1,58.

Grafik 2.25.
Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Singkawang Tahun 2022



Sumber : Satu Data Indonesia, 2022

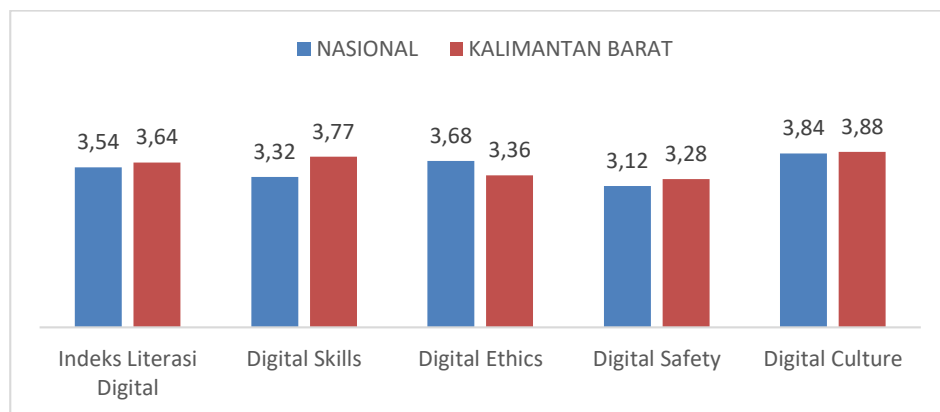
4. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital adalah pengukuran untuk pengetahuan serta kecakapan masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan media digital,

seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lainnya. Indeks Literasi Digital bentuk dari 4 pilar utama yaitu Digital Skill, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture.

Indeks Literasi Digital Nasional tahun 2022 adalah sebesar 3,54. Pilar Digital Culture merupakan pilar dengan skor indeks tertinggi (3,84), sedangkan Digital Safety merupakan pilar dengan skor indeks terendah (3,12). Sedangkan, skor Indeks Literasi Digital Kalimantan Barat mendapatkan skor indeks 3,64. Pilar Digital Culture tahun 2022 adalah sebesar (3,88), sedangkan Digital Safety merupakan pilar dengan skor indeks yang paling rendah (3,28).

Grafik 2.26.
Indeks Literasi Digital Nasional dan Kalimantan Barat Tahun 2022



Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022

5. Indeks Masyarakat Digital

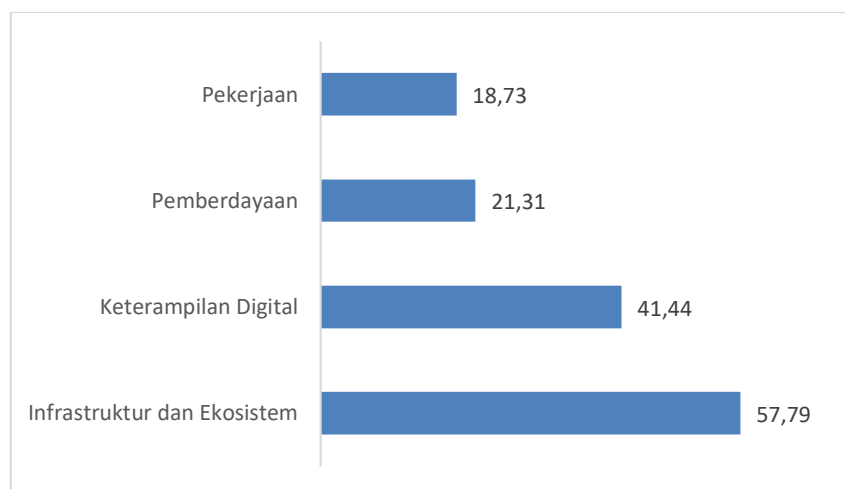
Masyarakat Digital adalah sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (paperless) menjadi suatu hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, di mana semua lini kehidupannya sangat bergantung pada TIK, mulai dari penciptaan, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya.

Indeks Masyarakat Digital merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Masyarakat digital sendiri diartikan sebagai sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang

dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (paperless) menjadi suatu hal yang biasa. Terdapat empat pilar utama pembentuk Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan, Pemberdayaan, serta Pekerjaan.

Nilai Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kota Singkawang pada tahun 2023 sebesar 35,47 yang berasal dari rata-rata skor 4 pilar yaitu pilar infrastruktur dan ekosistem (57,80), pilar keterampilan digital (41,45), pilar pemberdayaan (21,31) dan pilar pekerjaan (18,739). Secara lebih rinci, pilar infrastruktur dan ekosistem memiliki poin paling tinggi yang merupakan pondasi utama dalam menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital yang artinya sebagian besar dari masyarakat Kota Singkawang telah memiliki akses infrastruktur yang baik namun adopsi teknologi digital di sektor pendidikan dan bisnis masih belum merata. Sedangkan nilai terendah ada pada pilar pemberdayaan, hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik dalam kegiatan masyarakat. Sehingga meskipun masyarakat Kota Singkawang memiliki keterampilan digital yang baik, masyarakat belum memanfaatkannya untuk kegiatan sehari-hari.

Grafik 2.27.
Nilai Pilar Indeks Masyarakat Digital Kota Singkawang Tahun 2023



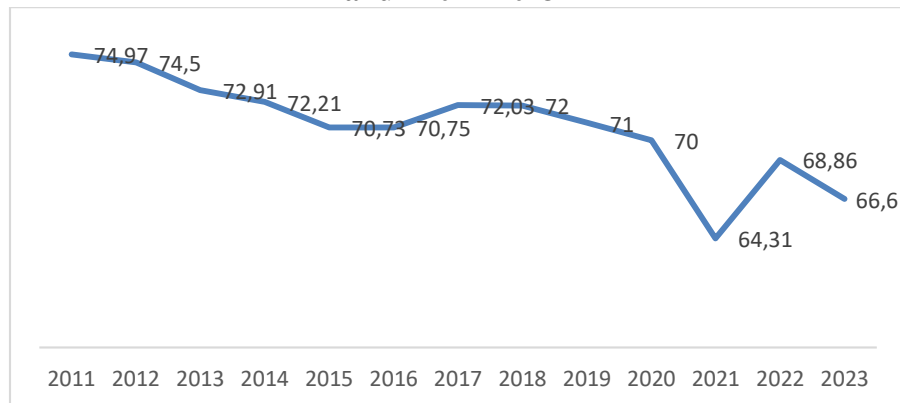
Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023

6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Angka TPAK digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif bekerja ataupun mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPAK maka semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif. BPS mengelompokkan nilai TPAK menjadi 3 yaitu tinggi ($TPAK \geq 70$), sedang ($50 < TPAK < 70$), rendah ($TPAK \leq 50$) yang mana Kota Singkawang tergolong pada klasifikasi sedang ($50 < TPAK < 70$).

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Singkawang tahun 2011-2023 mengalami tren yang fluktuatif namun cenderung turun. Pada tahun 2011, TPAK Kota Singkawang sebesar 74,97%. Pada periode tahun 2011-2016 terus mengalami penurunan hingga 70,03%. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan hingga 72,03% akan tetapi sejak 2017 hingga 2020 terus mengalami penurunan mencapai angka 70%. Penurunan cukup drastis terjadi pada tahun 2021 yang menyentuh angka 64,31% dan naik turun hingga 2023 mencapai angka 66,6%.

Grafik 2.28.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang (%)
Tahun 2011-2023

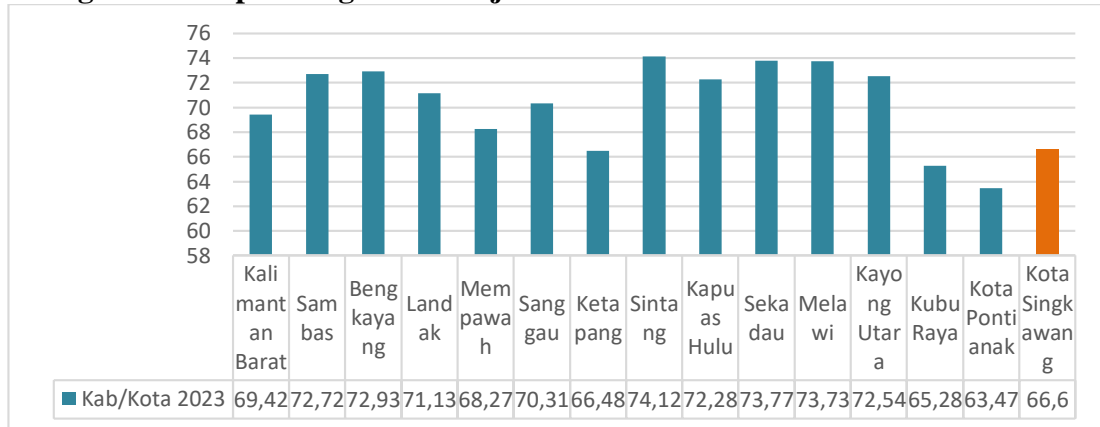


Sumber : BPS Kota Singkawang, 2011-2023

Apabila dibandingkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, TPAK Kota Singkawang masih

berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2023, nilai TPAK Kota Singkawang sebesar 66,6 berada pada urutan ke 11 dari total 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

Grafik 2.29.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023



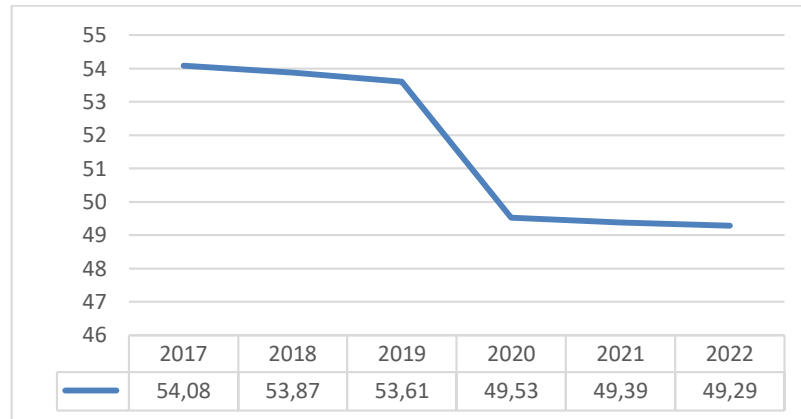
Sumber : SAKERNAS, 2023

7. Rasio Ketergantungan

Angka Ketergantungan atau Rasio Ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase angka ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka ketergantungan Kota Singkawang pada tahun 2017-2022 menunjukkan penurunan terus menerus. Pada periode tahun 2017-2019, angka ketergantungan Kota Singkawang menurun stabil dari 54,08 menjadi 53,1. Kemudian nilai turun drastis pada tahun 2020 menjadi 49,53. Angka ketergantungan kembali mengalami penurunan stabil hingga tahun 2022 sebesar 49,29.

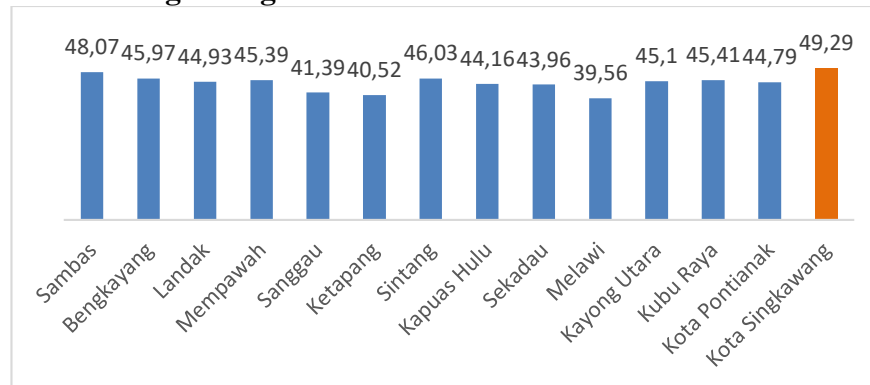
Grafik 2.30.
Rasio Ketergantungan Kota Singkawang Tahun 2017-2022



Sumber : BPS Kota Singkawang, 2017-2022

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2022 angka ketergantungan Kota Singkawang berada di peringkat pertama, dengan angka ketergantungan sebesar 49,29. Pada peringkat kedua ada Kabupaten Sambas dengan angka ketergantungan sebesar 48,07 dan peringkat ketiga adalah kabupaten Sintang sebesar 46,03.

Grafik 2.31.
Rasio Ketergantungan se-Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022



Sumber : BPS Kota Singkawang, 2023

2.3.3. Daya Saing Fasilitas / Infrastruktur Wilayah

1. Indeks Infrastruktur Daerah (IID)

Indeks Infrastruktur merupakan salah satu indikator yang membentuk Indeks Pembangunan Kota atau City Development Index (CDI) yang digunakan untuk mengukur kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas dasar. Fasilitas dasar yang menyusun Indeks Infrastruktur Daerah adalah akses air bersih, jalan mantap, drainase dan akses sanitasi.

Indeks infrastruktur yang semakin tinggi menunjukkan bahwa tingkat pembangunan disuatu kota semakin baik. Secara lebih lengkap data capaian

Indeks Infrastruktur Daerah Kota Singkawang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.6.
Indeks Infrastruktur Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022

Indikator IID	Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penduduk berakses air minum	38,11	39,74	39,17	40,9	49,08
Persentase Jalan Mantap	50,24	51,36	53,54	58,67	60,257
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	38,38	39,55	19,92	10,45	73,52
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	93,44	93,78	94,11	94,02	94,22

Sumber : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026

2. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna atas layanan infrastruktur yang tersedia. IKLI merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur berkaitan dengan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Indeks ini disusun berdasarkan indeks kepuasan layanan infrastruktur yang memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Terdapat 6 unsur utama untuk mengukur IKLI, antarlain: ketersediaan fisik (*availability*); kualitas fisik (*quality*); kesesuaian (*appropriateness*); efektifitas pemanfaatan (*utility*); penyerapan tenaga kerja (*job creation*); dan kontribusi pada perekonomian. Secara lebih lengkap data indeks kualitas layanan infrastruktur untuk Kota Singkawang belum tersedia.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

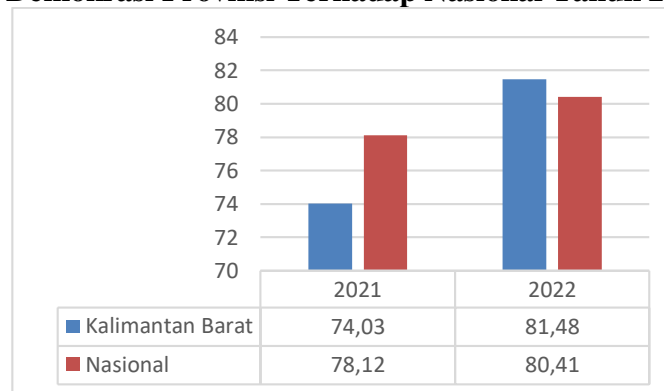
1. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi (IDI) merupakan alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di

Pusat maupun di Daerah. Tingkat capaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Untuk saat ini pengukuran IDI baru dilaksanakan pada tingkat Nasional dan Provinsi, sehingga data IDI untuk Kota Singkawang belum tersedia. Analisis yang dilakukan akan menggunakan data IDI Nasional dan Kalimantan Barat.

Indeks Demokrasi Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021-2022 meningkat cukup signifikan. Dimana pada tahun 2021, IDI Provinsi Kalimantan Barat sebesar 74,03 kemudian mengalami peningkatan sebesar 6,45 poin menjadi 80,48 pada tahun 2022. Kondisi serupa juga terjadi pada IDI Nasional. Pada tahun 2021 IDI Nasional sebesar 78,12 dan naik menjadi 80,41 pada tahun 2022.

Grafik 2.32.
Indeks Demokrasi Provinsi Terhadap Nasional Tahun 2021-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021-2022

2. Indeks Toleransi

Indeks Toleransi (Indeks Kota Toleran) adalah indeks yang memperlihatkan bagaimana praktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia, dengan memeriksa seberapa besar kebebasan beragama/berkeyakinan dijamin dan dilindungi melalui regulasi dan tindakan serta disandingkan dengan realitas perilaku sosial kemasyarakatan dalam tata kelola keberagaman kota, khususnya dalam isu agama/keyakinan. Toleransi adalah pikiran, perasaan dan tindakan yang berhilir pada kedamaian, menghormati yang berbeda, bijaksana dalam memandang nilai-nilai kemanusiaan serta keberanian untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan itu.

IKT ditujukan untuk memberikan *baseline* dan status kinerja pemerintah

kota dalam mengelola kerukunan, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial. Studi ini ditujukan untuk mempromosikan pembangunan dan pembinaan ruang-ruang toleransi di kota yang dilakukan oleh pemerintah kota setempat dan/atau didukung serta berkolaborasi bersama elemen masyarakat secara umum.

Tabel 2.7.
Kota dengan Skor Tertinggi Indeks Kota Toleran Tahun 2022

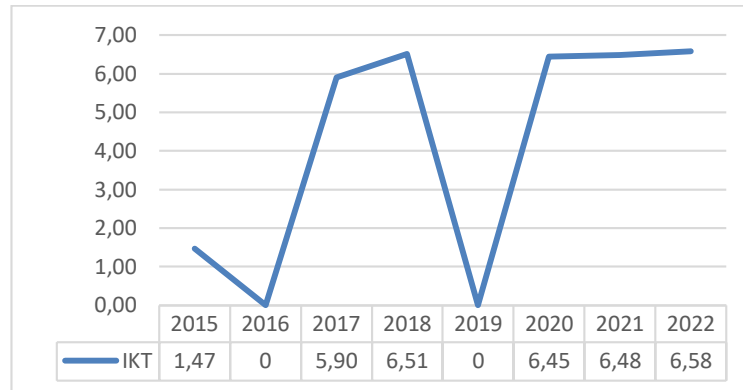
Rangking	Kota	Ind 1	Ind 2	Ind 3	Ind 4	Ind 5	Ind 6	Ind 7	Ind 8	Skor Akhir
1	Singkawang	6,33	7,00	7,00	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,583
2	Salatiga	6,17	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,417
3	Bekasi	5,00	6,40	7,00	5,00	6,00	7,00	5,00	5,00	6,080
4	Surakarta	5,83	7,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,883
5	Kediri	4,50	6,50	6,50	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,850
6	Sukabumi	5,00	6,80	7,00	5,00	5,00	6,00	3,00	5,00	5,810
7	Semarang	4,83	7,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,783
8	Manado	4,67	7,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,767
9	Kupang	5,67	6,85	7,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	5,687
10	Magelang	6,00	6,35	7,00	4,00	4,00	6,00	4,00	5,00	5,670

Sumber : Siaran Pers SETARA Institute, 2022

Kota Singkawang menempati posisi pertama Indeks Toleransi tahun 2022 dengan skor 6,583, di ikuti Kota Salatiga pada peringkat ke dua dengan skor 6,417 dan Kota Bekasi pada peringkat ke tiga dengan skor 6,080.

Indeks Toleransi Kota Singkawang pada tahun 2015-2022 menunjukkan kenaikan yang baik. Secara bertahap, kenaikan indeks toleransi tersebut mengantarkan Kota Singkawang sebagai kota tertoleran 3 tahun berturut- turut oleh Setara Institute sejak tahun 2020–2022 dengan skor akhir pada tahun 2022 mencapai 6,583. Dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.33.
Indeks Toleransi Kota Singkawang Tahun 2015-2022



Sumber : SETARA Institute, 2015-2022

3. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

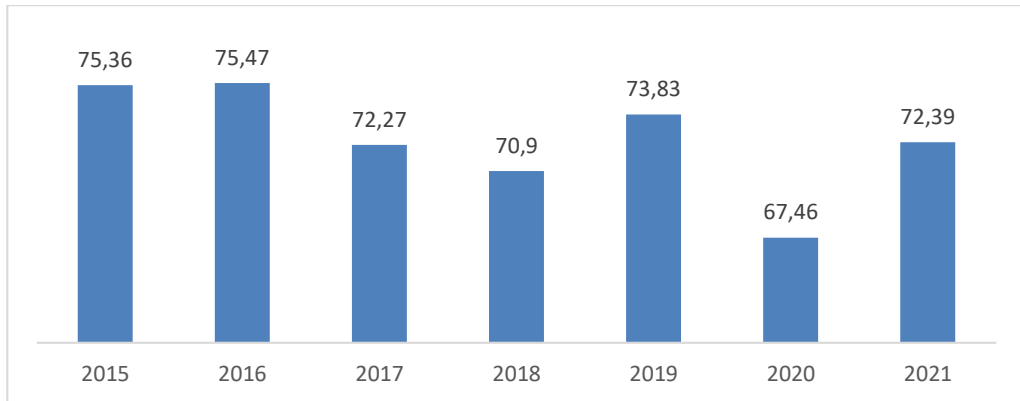
Indeks Ketentraman dan Ketertiban merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mencerminkan stabilitas keamanan suatu daerah. Dimana stabilitas keamanan tersebut berkaitan dengan frekuensi terjadinya masalah ketertiban seperti demonstrasi yang kemudian berdampak pada masalah ketentraman masyarakat. Indeks ini digunakan sebagai salah satu parameter yang digunakan oleh investor ketika akan melakukan penanaman modal di suatu daerah. Secara lebih lengkap Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Singkawang belum tersedia.

4. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan instrumen utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program kerukunan. IKUB diukur dengan mengacu pada tiga dimensi utama yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Kriteria capaian IKUB adalah IKUB Sangat Rendah (0-20), IKUB Rendah (21-40), IKUB Sedang (41-60), IKUB Tinggi (61-80), IKUB Sangat Tinggi (80-100). Data IKUB Kota Singkawang tidak tersedia. Sehingga yang dianalisis adalah IKUB Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional.

Grafik 2.34.

Indeks Kerukunan Umat Beragama Nasional Tahun 2015-2021



Sumber : Kementerian Agama, 2015-2021

Nilai IKUB Nasional pada tahun 2015-2021 menunjukkan perubahan yang fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015, IKUB Nasional sebesar 75,36 dan masuk kedalam kategori IKUB Tinggi. Kemudian nilainya mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020, dimana nilai IKUB Nasional turun menjadi 67,46. Kemudian pada tahun 2021 nilainya kembali naik cukup signifikan menjadi 72,39 namun kenaikan tersebut belum mampu menyamai kondisi IKUB pada tahun 2015. Secara keseluruhan nilai IKUB Nasional masuk dalam kategori IKUB Tinggi. Sedangkan untuk nilai IKUB Kalimantan Barat pada tahun 2021 sebesar 77,61 dan masuk dalam IKUB Tinggi.

Grafik 2.35. 10 Provinsi Terbaik dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021



Sumber : Kementerian Agama, 2021

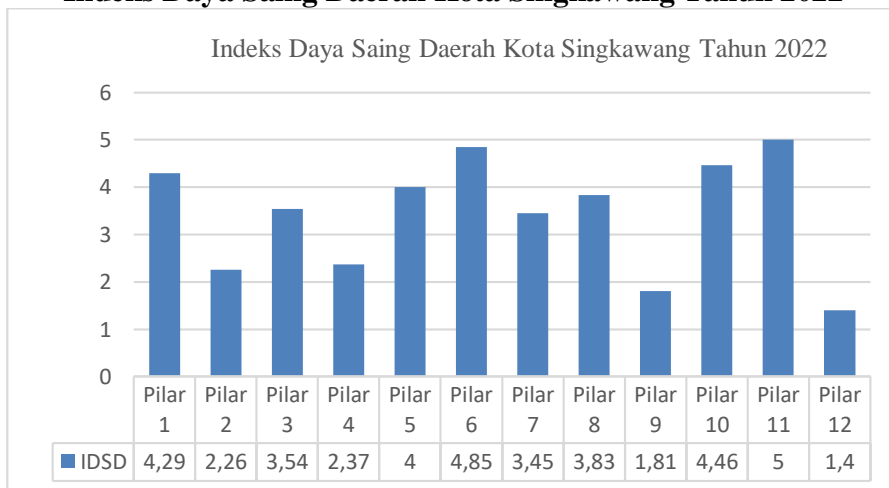
5. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh suatu ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing.

Komponen lingkungan pendukung ditopang oleh pilar institusi, infrastruktur, adopsi TIK, dan kestabilan ekonomi makro. Komponen sumber daya manusia ditopang oleh pilar kesehatan dan keterampilan. Komponen pasar ditopang oleh pilar pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar. Komponen ekosistem inovasi ditopang oleh pilar dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Singkawang sebesar 2,94 sama dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Kalimantan Barat. Jika dibandingkan dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Nasional yang berada pada 3,26 maka Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Singkawang masih berada di bawah nasional.

Grafik 2.36.
Indeks Daya Saing Daerah Kota Singkawang Tahun 2022



Sumber : *Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2022*

Keterangan:

- Pilar 1 : Instansi
- Pilar 2 : Infrastruktur
- Pilar 3 : Adopsi TIK
- Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro
- Pilar 5 : Kesehatan
- Pilar 6 : Keterampilan
- Pilar 7 : Pasar Produk
- Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja
- Pilar 9 : Sistem Keuangan
- Pilar 10 : Ukuran Pasar
- Pilar 11 : Dinamisme Bisnis
- Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan wajib dasar, layanan urusan wajib non dasar, layanan urusan pilihan dan penunjang urusan. Masing-masing layanan urusan tersebut dapat disampaikan melalui penjelasan berikut ini.

2.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

2.4.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sesuai nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Indikator yang digunakan untuk melihat aspek pelayanan umum dalam bidang pendidikan Kota Singkawang secara ringkas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pendidikan Kota Singkawang
Tahun 2017/2018-2021/2022

No	Uraian	Tahun				
		2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)					

No	Uraian	Tahun				
		2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)	12,91	13,20	11,75	11,65	11,22
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%) :					
	a. APK SD/MI/Paket A	102,38	102,51	104,80	102,25	100,05
	b. APK SMP/MTs/Paket B	89,27	94,52	104,37	105,33	105,55
3.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) (%) :					
	a. APT SD/MI/Paket A	59,69	58,82	57,15	56,37	55,87
	b. APT SMP/MTs/Paket B	33,53	33,24	32,69	33,85	33,05
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) (%) :					
	a. APM SD/MI/Paket A	86,54	87,38	90,98	89,24	89,69
	b. APM SMP/MTs/Paket B	66,18	67,50	74,32	76,98	82,25
5.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%) :					
	a. APS SD/MI/Paket A	95,61	94,91	97,84	96,42	95,94
	b. APS SMP/MTs/Paket B	93,45	96,90	95,50	87,05	91,11
6.	Angka Putus Sekolah (%) :					
	a. Angka Putus Sekolah SD/MI	0,09	0,34	0,44	0,14	0,04
	b. Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,03	1,06	0,64	0,16	0,17
7.	Angka Kelulusan (AL) (%) :					
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Angka Melanjutkan (AM) (%) :					
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	104,27	107,79	110,92	106,39	112,15
9.	Fasilitas Pendidikan (%) :					
	a. Ruang Kelas SD dalam Kondisi Baik	90,19	89,21	96,64	97,95	98,48
	b. Ruang Kelas SMP dalam Kondisi Baik	80,22	84,13	96,47	95,38	98,19
10.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (per 10.000):					
	a. Rasio Ketersediaan SD/MI/ Penduduk Usia 7-12 thn	39	39	39	39	39,35
	b. Rasio Ketersediaan SMP/MTs/ Penduduk Usia 13-15 thn	32	33	36	37	36,73
11.	Rasio Guru/Murid (per 10.000):					
	a. Rasio Guru SD/MI /Murid SD/MI	494	465	438	483	510
	b. Rasio Guru SMP/MTs /Murid SMP/MTs	624	589	583	622	584
	e. Rasio Guru SD/MI /Murid SD/MI/ Kelas	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05
	f. Rasio Guru SMP/MTs /Murid SMP/MTs /Kelas	0,14	0,13	0,14	0,14	0,13
12.	Guru yang memenuhi kualifikasi S.1/D.IV (%)					

No	Uraian	Tahun				
		2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	a. SD/MI	71,85	82,64	86,49	85,07	88,51
	b. SMP/MTs	87,34	96,15	95,91	93,66	91,51

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, 2022

Angka Partisipasi Kasar (APK) rasio jumlah siswa (berapapun usianya) pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA sederajat dibagi jumlah penduduk berusia 3-18 tahun. APK merupakan indikator sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan. Secara umum nilai APK pada tahun ajaran 2017/2018 hingga 2021/2022 menunjukkan trend fluktuatif. Peningkatan APK SD dan SMP relatif tidak terlalu besar, namun dari segi angka cukup bagus yaitu diatas 100%. Sedangkan capaian APK PAUD lebih rendah dibanding SD dan SMP, karena kurangnya anak usia dini yang mengenyam pendidikan anak usia dini, baik itu Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK).

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) adalah angka yang menunjukkan status pendidikan terakhir yang telah ditamatkan penduduk suatu wilayah pada tahun tertentu, yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. APT merupakan persentase jumlah penduduk menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, terhadap total jumlah penduduk dalam tahun tertentu.

APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. Dalam empat tahun terakhir (2017/2018 - 2021/2022) lebih dari 40% penduduk yang tidak menamatkan pendidikan SD dan lebih dari 60% penduduk yang tidak menamatkan pendidikan SMP. Hal ini disebabkan oleh banyaknya usia penduduk diatas 25 tahun yang tidak memiliki minat untuk melanjutkan pendidikannya melalui pendidikan kesetaraan paket.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Secara umum nilai APM menunjukkan tren fluktuatif

untuk semua jenjang pendidikan. APM sudah melampaui target merupakan gambaran bahwa anak usia sekolah sudah bersekolah sesuai dengan jenjang usia, sehingga tidak ada permasalahan yang signifikan.

Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan Kota Singkawang selanjutnya dapat dilihat dari rasio ketersediaan sekolah, yaitu jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan tertentu. Dalam empat tahun terakhir (2017/2018 - 2021/2022) rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar setara SD/MI masih belum tercapai, berdasarkan usia penduduk 7-12 tahun disebabkan belum adanya tambahan pembangunan sekolah di Kota Singkawang. Namun berdasarkan capaian angka tersebut bukan permasalahan yang terlalu signifikan karena selisih angka capaian hanya 1%.

Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan Kota Singkawang dilihat dari ketersediaan tenaga pengajar dan ukuran jumlah ideal murid untuk satu guru untuk mencapai mutu pengajaran dapat digambarkan dengan rasio guru terhadap murid yaitu jumlah guru tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah murid jenjang pendidikan tersebut. Dalam empat tahun terakhir (2017/2018 - 2021/2022) rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD dan SMP masih terdapat kekurangan pendidik, hal ini disebabkan banyaknya tenaga pendidik yang pensiun.

2.4.1.2. Kesehatan

Data aspek pelayanan umum dalam bidang kesehatan Kota Singkawang tahun 2018-2022 yang menggambarkan kinerja pembangunan daerah di Kota Singkawang dapat ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.18
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan Kota Singkawang
Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	7,42	5,37	7,67	7,70	8,37
2.	Angka Kelangsungan Hidup bayi (AKHB) per 1.000 kelahiran hidup	n/a	n/a	992,23	992,03	991,63

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3.	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	8,57	7,2	7,91	7,96	1,49
4.	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	6,95	5,8	6,43	6,90	5,30
5.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	115,87	96,34	98,93	159,36	111,60
6.	Rasio Posyandu per 100 Balita	0,71	0,70	0,79	0,79	0,67
7.	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per 100.000 penduduk	20	20	20	20	96,67
8.	Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	3,19	3,14	2,5	2,5	5,0
9.	Rasio Dokter per 100.000 penduduk	32	32	56	55	72
10.	Rasio Tenaga Medis per 100.000 penduduk	5	7	18	27	9
11.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%)	67,36	78,00	69,66	71,22	52,95
12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	91,02	88,60	85,88	88,04	72,45
13.	Cakupan Kelurahan UCI (%)	30,77	38,46	42,3	50	n/a
14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	64,51	60,80	80	82,5	35,50
16.	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	0	0	3	3	2
17.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	50,23	25,00	50,4	12,5	24,6
18.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%)	100,00	100,00	79,9	58,9	65,5
19.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	Penderita diare yang ditangani (%)	78,00	49,60	35,84	12,00	32,7
21.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
22.	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	96,17	99,9	47,46	50,05	48,28
23.	Cakupan Puskesmas (%)	180,00	200,00	100,00	100,00	100,00
24.	Cakupan Puskesmas Pembantu (%)	69,00	69,00	70,00	70,00	94,12
25.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	94,33	96,30	90,68	89,97	75,74
26.	Cakupan pelayanan nifas (%)	86,73	85,20	82,23	86,03	70,62
27.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	50,66	51,20	43,27	52,04	40,40
28.	Cakupan pelayanan anak balita (%)	36,76	42,80	37,58	24,80	22,26
29.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	42,05	45,40	97,33	100	99,60
30.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	94,48	98,60	3,88	22,65	41,00
31.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33.	Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, 2023

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang diperlukan untuk

membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, pemerintah terus mengembangkan sarana dan prasarananya. Upaya tersebut dilakukan melalui penambahan dokter, tenaga medis/paramedis, puskesmas dan sarana/prasarana pada pusat pelayanan kesehatan.

Posyandu, Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Rumah Sakit merupakan pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Singkawang. Lokasi posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai karena idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita yang berguna untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Dokter dan Tenaga Medis di Kota Singkawang merupakan tenaga kesehatan yang memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ketersediaan jumlah dokter dan tenaga medis menunjukkan tingkat pelayanan yang diberikan dalam bidang kesehatan terhadap jumlah penduduk di Kota Singkawang.

2.4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang

Indikator pelayanan umum bidang pekerjaan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.19
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
A.	Pekerjaan Umum					
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	51,38	16,12	36	38,5	40,967
2.	Persentase jalan mantap	50,24	51,36	53,54	58,67	60,257
3.	Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk (km/jiwa)	0,21	0,20	0,20	0,18	3,592
4.	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam) (%)	15,05	16,12	36	38,5	40,967
5.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (min. 1,5m) (%)	1,82	1,82	n/a	n/a	1,95

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
6.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	5,17	5,17	n/a	n/a	9,87
7.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	93,44	93,78	94,11	94,02	94,22
8.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	8,98	8,98	n/a	n/a	4,622
9.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	38,38	39,55	19,92	10,45	81,61
10.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	6,38	6,95	n/a	n/a	8,86
11.	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik (%)	40	45	50,29	n/a	64,27
12.	Rasio Jaringan Irigasi	0,02	0,02	n/a	n/a	0,54
13.	Persentase penduduk berakses air minum (%)	38,11	39,74	39,17	40,9	49,08
14.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	n/a	n/a	n/a	73,17	49,08
15.	Rasio tempat ibadah per 1.000 penduduk	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
16.	Luas kawasan genangan banjir	2.268	2.198	59,84	62,06	73,52
B.	Penataan Ruang					
1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	45,44	45,51	n/a	n/a	8,96
2.	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)	4,9	4,8	n/a	n/a	n/a
3.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	0,70	0,70	n/a	n/a	0,42
4.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	90,5	90,7	n/a	n/a	90,84

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, 2023

Penataan ruang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang efektif dan efisien dengan melibatkan masyarakat dan swasta sebagai upaya mencapai terwujudnya penataan ruang dan pengembangan wilayah secara terpadu. Luas wilayah Kota Singkawang yang sempit menjadi salah satu faktor yang bisa mendorong proses penataan lahan cukup efektif.

2.4.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman meliputi upaya penanganan kawasan kumuh dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Upaya penanganan kawasan kumuh di Kota Singkawang masih perlu untuk ditingkatkan. Berikut ini merupakan indikator

pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.19
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 -2022

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio rumah layak huni	0,1816	0,2044	0,2060	0,2070	0,2072
2.	Rasio permukiman layak huni	0,9720	0,9874	0,9986	0,9987	0,973
3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	89,47	89,68	90,51	91,17	91,42
4.	Cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau (%)	88,09	94,06	98,69	99,53	99,60
5.	Persentase permukiman yang tertata (%)	66,29	67,53	69,56	69,80	69,96
6.	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	0,061	0,029	0,023	0,017	0,109
7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang ditangani (%)	44,77	80,63	84,68	88,73	52,20
8.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%)	74,81	75,96	76,50	77,35	78,27
9.	Persentase rumah layak huni (%)	89,47	89,68	90,51	91,17	91,42
10.	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di Kawasan perkotaan	44,77	80,63	84,68	88,73	6,03

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, 2023

Capaian ketersediaan rumah layak huni di Kota Singkawang relatif meningkat setiap tahun, walaupun realisasi belum mencapai target pada tahun 2021. Adapun beberapa kendala umum yang dihadapi dalam penanganan rumah tidak layak huni yaitu belum adanya penyusunan dokumen database jumlah rumah, Rumah Layak Huni (RLH), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan belum optimalnya penataan, perencanaan, pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan kawasan permukiman yang tidak layak huni.

2.4.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat selama periode 2018-2022 rata-rata mengalami peningkatan pada cakupan pelayanan bencana kebakaran kota dan tingkat waktu

tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran sebesar 100%.

Gambaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	100	100	n/a	n/a	n/a
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	92,31	100	90	90	100
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	80	90	n/a	100	100
4.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	68,30	70,50	n/a	100	90,48
5.	Persentase penegakan Perda	92,31	100	90	90	100
6.	Persentase pelanggaran Perda yang ditindak (%)	80	85	90	90	100
7.	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani (%)	n/a	n/a	95	95	100
8.	Rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk	n/a	n/a	3,3	3,3	3,5
9.	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	n/a	n/a	0,9	0,9	0,9

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang, 2023

Secara umum capaian pelayanan guna mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Singkawang sudah cukup baik. Beberapa indikator yang menggambarkan Kota Singkawang cukup kondusif antara lain penurunan jumlah pelanggaran perda, penegakan perda, penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan (K3) serta beberapa indikator lainnya.

2.4.1.6.Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan pelayanan sosial guna untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya. Pelayanan sosial tersebut terdiri dari 4 pilar yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan sosial dilakukan bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan sosial selama periode 2018-2022 pada masing-masing indikator dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial Kota Singkawang

Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial) yang memperoleh bantuan sosial (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial) yang tertangani (%)	64,86	67,95	69,94	70,19	96,17
3.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100
4.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	100	100	100	100
5.	Persentase rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti (%)	26,21	12,60	22,89	22,95	8,20
6.	Persentase rehabilitas sosial dasar anak terlantar di luar panti (%)	3,65	24,10	34,72	34,74	3,25
7.	Persentase rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti (%)	56,52	36,94	40	40,08	21,51
8.	Persentase rehabilitas sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti (%)	0,00	66,67	100	100	100
9.	Persentase perlindungan dan jaminan sosial melampaui pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	100
10.	Persentase penanganan kemiskinan dalam sesuai pemenuhan kebutuhan dasar (%)	96,68	77,57	78,30	79,95	70,87
11.	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial melampaui (LKS) dan SDM yang terlibat dalam pembangunan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, 2023

Berdasarkan tabel diatas, aspek pelayanan umum dalam bidang sosial Kota Singkawang selama periode 2018-2022 cenderung fluktuatif. Namun interpretasi beberapa aspek sudah sesuai dan melampaui target, bahkan untuk persentase PPKS yang tertangani relatif meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk persentase rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlantar di luar panti masih rendah walaupun cenderung menurun setiap tahunnya. Hal ini di karenakan jumlah penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlantar lebih besar dari yang tertangani. Terkait permasalahan tersebut diantaranya disebabkan oleh persoalan tuntutan kehidupan yang semakin berat, disamping persoalan kemiskinan. Oleh karena itu penanganan persoalan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

2.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.4.2.1. Tenaga Kerja

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketenagakerjaan selama periode 2017-2019 dapat disampaikan pada berikut ini.

Tabel 2.22

**Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan
Kota Singkawang Tahun 2017-2019**

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun (per 1.000)	43,00	20,00	13,00
2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	25,58	55,00	23,08
3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	36,10	8,14	19,68
4.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	29,96	n/a	0,10
5.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	0,77	0,00	9,09
6.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	18,97	0,00	37,70
7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	100,00	0,00	100,00
8.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	100,00	0,00	100,00
9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	0,00	0,00	100,00
10.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk	283,17	306,82	321,40

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, 2020

2.4.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan aspek serius dalam pembangunan manusia. Permasalahan pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan urusan yang cukup kompleks karena dianggap sebagai salah satu indikator berdayanya masyarakat suatu daerah. Gambaran kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Singkawang selama periode tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	8,21	6,12	10,98	10,81	12,55
2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	10,00	23,33	23,33	23,33	23,33
3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	16,55	11,88	n/a	13,76	10,30
4.	Rasio KDRT (%)	0,06	0,01	0,02	0,01	0,02
5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	32,55	10,96	19,42	19,04	52,72
6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	54,55	100,00	100,00	100,00	100

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	97,67
8.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	74,36	100,00	100,00	100,00	100
9.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	63,93	62,96	100,00	89,66	76,09
10.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	88,52	67,50	100,00	89,66	76,09
11.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100
12.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	76,19	65,52	100,00	100,00	100
13.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
14.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

Pada tabel diatas, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar -2,09%. Namun ditahun 2019-2020 mengalami kenaikan sebesar 4.86%. Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 13,33% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kapasitas dan kesadaran perempuan dalam kegiatan politik. Sedangkan untuk partisipasi perempuan di lembaga swasta tertinggi ditahun 2018 yaitu sebesar 16,55%.

Berdasarkan data diatas, persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Singkawang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya sosialisasi, advokasi dan edukasi dalam membangun rumah tangga yang sehat, sehingga pemerintah mampu menekan angka kekerasan. Sedangkan untuk beberapa indikator cakupan lainnya sudah berakhir pada tahun 2014, sehingga persentase sudah melampaui target.

2.4.2.3. Pangan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pangan salah satunya ditunjukkan dengan angka ketersediaan pangan utama. Ketersediaan pangan utama menggambarkan ketersediaan pangan yang dapat dikonsumsi oleh penduduk (per kapita) pada suatu daerah dalam satu tahun. Berdasarkan data

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, pada tahun 2021 ketersediaan pangan utama Kota Singkawang sebesar 457,25 kg/kapita/tahun. Artinya pada tahun 2021 jumlah ketersediaan pangan utama yang dapat dikonsumsi setiap penduduk Kota Singkawang dalam satu tahun sebanyak 457,25 kg.

Tabel 2.24
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pangan Kota Singkawang
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Ketersediaan pangan utama (kg/kap/tahun)	222,73	375,63	435,48	457,25	n/a
2.	Ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	1.185	1.438	1.747	1.834,35	n/a
3.	Ketersediaan protein (gram/kap/hari)	50,60	63,70	90,89	95,52	n/a

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, 2022

2.4.2.4. Pertanahan

Persentase luas lahan bersertifikat setiap tahun dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Upaya masyarakat untuk mensertifikatkan lahannya perlu didorong agar semua lahan yang dimiliki masyarakat, dan swasta dapat teregistrasi dengan baik. Hal tersebut tentunya akan memudahkan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya. Adapun gambaran umum kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanahan di Kota Singkawang selama periode 2018-2022 dapat ditunjukkan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2.25
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan Kota Singkawang
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	59,31	59,58	61,26	51,10	62,92
2.	Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Penyelesaian izin lokasi (%)	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, 2023

2.4.2.5. Lingkungan Hidup

Upaya penanganan sampah relatif stabil namun lebih mengarah pada penurunan. Persentase penanganan sampah maupun TPS per satuan penduduk cenderung tetap. Hal ini disebabkan oleh jumlah tenaga dan sarana pengelola kebersihan di Kota Singkawang relatif tetap, sementara jumlah penduduk dan produksi sampah terus meningkat. Untuk jangka panjang, pemerintah perlu mempertimbangkan penambahan armada pengangkutan sampah mengingat jumlah penduduk terus meningkat.

Dalam rangka menjaga kelestarian dan daya dukung lingkungan maka dilakukan penataan kawasan pemukiman dan pengawasan pencemaran. Dalam hal ini diupayakan semaksimal mungkin untuk menegakkan hukum lingkungan.

Gambaran perkembangan pelayanan bidang lingkungan hidup sebagaimana ditampilkan tabel berikut :

Tabel 2.26
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Tersusunnya RPPLH Kota	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat kota	Ada	ada	ada	tidak ada	tidak ada
4.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air:	52,11	83,33	80,00	80 (58,00)	82,50 (61,67)
	a. Sungai Hangmoy	22,11	21,67	20	20	20
	b. Sungai Singkawang	14,74	20	20	20	20,833
	c. Sungai Semelagi	7,89	21,67	20	20	20,833
	d. Sungai Sedau	7,37	20	20	20	20,833
5.	Indeks kualitas udara (%)	85,4	88,89	85,85	87,77	87,22
6.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota (%)	100	101,62	52,63	103	126,27
7.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
8.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kota	100,00	71,00	100,00	100,00	100,00
9.	Timbulan sampah yang ditangani (%)	35,54	20.043,28	25.373,44	17.965,26	25.882,88
10	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	0,057	49,27	37,20	41,88	75,46
11.	Indeks tutupan lahan (%)	n/a	26,62	30,21	33,80	34,42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, 2023

2.4.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja pembangunan pada pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil selama 5 tahun (2018-2022) dapat tergambar dari cakupan pelayanan administrasi kependudukan. Data mengenai kinerja ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.27
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,86	0,91	0,98	0,98	0,98
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	0,90	0,92	0,96	0,98	0,85
3.	Rasio pasangan berakte nikah	0,31	0,36	0,43	0,49	0,53
4.	Ketersediaan database kependudukan skala kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	86,00	91,00	98,03	98,58	98,78
7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	90,00	92,00	88,69	89,16	93,21

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, 2023

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rasio penduduk ber-KTP terus meningkat mencapai angka 0,98 dari jumlah penduduk wajib KTP pada tahun 2020-2022, dibandingkan dengan tahun 2018 hanya 0,86. Kinerja pembangunan pada pelayanan kependudukan dan catatan sipil juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan serta belum optimalnya pemberlakuan sanksi bagi penduduk yang melanggar administrasi kependudukan.

2.4.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kota Singkawang cenderung aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Sejak 2018 semua kelompok PKK didorong terus sehingga semuanya aktif kembali dari tingkat kecamatan sampai tingkat kota. Posyandu yang selama ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk pelayanan kesehatan bagi balita juga aktif semuanya.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan di Kota Singkawang selama periode 2018-2022 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.28
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)	100,00	81,25	100,00	100,00	100,00
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	100,00	96,88	100,00	100,00	100,00
3.	Persentase LSM aktif (%)	55,00	50,00	100,00	100,00	100,00
4.	Persentase PKK aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Persentase Posyandu aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, 2023

2.4.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama periode 2018-2022 dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)	2,03	2,03	1,95	1,61	n/a
2.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.	Rasio akseptor KB (%)	56,50	56,39	n/a	n/a	67,58
5.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	n/a	43,47	n/a	n/a	17,56
6.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)	0	0	0	0	0
7.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	4,2	6,3	7,2	8,3	8,34
8.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	n/a	n/a	100	100	53,85
9.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap kelurahan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
10.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	100,00	100,00	n/a	n/a	58.76
11.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	n/a	n/a	100,00	100,00	100

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, 2023

2.4.2.9. Perhubungan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perhubungan di Kota Singkawang jika dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum selama 5 tahun (2018-2022), mengalami fluktuatif disebabkan oleh makin banyaknya kepemilikan kendaraan pribadi. Rasio ijin trayek terus menurun karena jumlah ijin trayek berkurang sedangkan jumlah penduduk terus bertambah. Jumlah penumpang angkutan umum pada Tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan adanya peningkatan adanya penggunaan kendaraan pribadi dan munculnya angkutan umum *online*. Gambaran mengenai kinerja pelayanan umum dalam bidang perhubungan sebagai berikut.

Tabel 2.30
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	47.798	36.159	5.986	12.559	15.113
2.	Rasio ijin trayek	0	0	0	0	0
3.	Jumlah uji KIR angkutan umum	325	231	285	277	330
4.	Jumlah Pelabuhan Laut	2	2	2	2	2
5.	Jumlah Terminal Bis	2	2	2	2	2
6.	Persentase layanan angkutan darat (%)	0,065	0,060	0,084	0,040	0,060
7.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	94%	94%	100%	100%	79%
8.	Pemasangan rambu-rambu (%)	90%	90%	70%	0%	25%
9.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,08	0,08	0,0058	0,0058	0,0061
10.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	47.798	36.159	5.986	12.559	15.113

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
11.	Jumlah barang melalui dermaga per tahun (ton)	47.798	36.159	5.986	12.559	15.113
12.	Jumlah orang melalui terminal per tahun	47.798	36.159	5.986	12.559	15.113
13.	Jumlah Bandar Udara	n/a	n/a	1	1	1
14.	Rasio panjang kota yang mendapatkan penerangan	n/a	n/a	41,50	41,90	42,7

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Singkawang, 2023

2.4.2.10. Komunikasi dan Informasi

Gambaran umum kinerja pembangunan pada pelayanan urusan komunikasi dan informatika di Kota Singkawang selama periode 2017-2019 dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2017-2019

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Komunikasi Publik (%)	n/a	83,3	84,09	85,47	86,33
2.	Persentase penggunaan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) dalam pelayanan publik (%)	50	100	100	100	100
3.	Persentase terpenuhinya infrastruktur TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) penunjang pelayanan publik dan pemerintahan Kota Singkawang (%)	70	70	89	100	100
4.	Persentase terwujudnya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan Kota Singkawang (%)	50	50	75	75	100
5.	Persentase jumlah <i>upload</i> berita dan informasi melalui <i>website</i> , media cetak, media elektronik dan sosial (%)	n/a	40	50	60	70
6.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi pengaduan (%)	n/a	0	20	35	50
7.	Cakupan pelayanan informasi dan dokumentasi melalui PPID Kota Singkawang (%)	n/a	0	20	35	50
8.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	n/a	20	35	55	20
9.	Persentase peningkatan SDM persandian (%)	n/a	0	10	10	20
10.	Cakupan tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah (%)	n/a	0	10		

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, 2022

2.4.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Persentase koperasi aktif pada tahun 2018-2022 menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Untuk UKM Non BPR/LKM aktif dan Usaha Mikro dan Kecil pada tahun 2018-2022 menunjukkan hampir 100%. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah selama periode 2018-2022 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.32
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase koperasi aktif (%)	61,22	64,00	65,38	74,29	75,20
2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	98,59	98,72	99,74	99,76	98,80
3.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	97,29	97,21	97,04	99,96	72,45

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang, 2023

2.4.2.12. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penanaman modal selama periode 2018-2022 pada setiap indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.33
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	114	366	255	2.720	2.474
2.	Jumlah nilai realisasi investasi (PMDN/PMA) (Milyar Rp.)	110,57	505,70	830,28	610,36	651,89
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	2,97	3,40	6,39	3,11	2,48
4.	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)	33,64	395,13	324,58	-219,92	41,53

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, 2023

2.4.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kepemudaan dan olahraga selama periode 2018-2022 dapat disampaikan melalui tabel berikut.

Tabel 2.34
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	87,00	75,00	70,00	75,00	79,4
2.	Persentase wirausaha muda (%)	n/a	n/a	n/a	0,59	98,06
3.	Cakupan pembinaan olahraga (%)	50	58	0	10	
4.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%)	53,68	53,68	n/a	n/a	n/a
5.	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	75	80	n/a	n/a	n/a
6.	Jumlah atlet berprestasi	110	11	0	3	140
7.	Jumlah prestasi olahraga	17	5	0	3	38

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, 2022

Secara umum terjadi penurunan dalam urusan kepemudaan dan olahraga dari tahun 2020-2021, hal ini terjadi karena adanya wabah pandemi Covid-19, yang membuat kegiatan kepemudaan dan olahraga dibatalkan atau dilarang untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak.

2.4.2.14. Statistik

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik selama periode 2018-2022 tergambar pada indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.35
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Buku "Daerah Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku "PDRB Daerah"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, 2023

Dari tabel urusan statistik di atas tergambar bahwa dokumen-dokumen statistik tersedia dari tahun 2018-2022. Data-data tersebut agar senantiasa diupdate sesuai perkembangan dan kebutuhan. Namun untuk sistem data dan statistik yang terintegrasi sampai tahun 2018 masih belum terbangun.

2.4.2.15. Kebudayaan

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Singkawang dalam lima tahun terakhir (2018-2022) cenderung fluktuatif. Sementara untuk jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi menunjukkan kenaikan yang sangat pesat. Gambaran kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kebudayaan selama periode 2018-2022 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali/tahun)	6	5	2	1	3
2.	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	76,30	73,20	80,33	81,30	74,23
3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	13	14	64	64	136
4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, 2023

2.4.2.16. Perpustakaan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan selama periode 2018-2022 melalui beberapa indikator dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	19.562	17.932	9.016	9.196	15.998
2.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	32.950	36.440	36.440	37.050	37.310
3.	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	0,960	0,830	1,09	1,08	1,20
4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/bulan	1.630	1.494	751	766	1.333
5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	9.040	9.738	9.738	10.460	10.282
6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	5	5	5	5	6

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang, 2023

2.4.2.17. Kearsipan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kearsipan selama

periode 2018-2022 tergambar pada indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.38
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan Kota Singkawang
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	62,07	72,41	62,07	79,31	60,51
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kegiatan)	58	58	-	58	58

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang, 2023

Secara umum pengelolaan kearsipan mengalami fluktuatif dari tahun 2018-2022. Hanya ditahun 2020 tidak adanya peningkatan SDM dalam pengelolaan kearsipan.

2.4.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.4.3.1. Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan perikanan selama periode 2018-2022 dapat tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Produksi perikanan (%)	216,94	53,20	n/a	85,35	n/a
2.	Konsumsi ikan (%)	98,40	97,70	n/a	95	n/a
3.	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	25,60	22,60	n/a	41,35	n/a
4.	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	38,90	48,27	n/a	80	n/a

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, 2022

Tabel 2.40
Produksi Perikanan Laut, Perairan Umum dan Budidaya di Kota
Singkawang (ton) Tahun 2017-2021

No	Nilai Produksi Perikanan	Produksi Perikanan (Ton)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Perikanan Laut	1244,91	4293,48	4213,50	3283,33	3605,97
2	Perikanan Umum	118,96	-	72,60	79,91	70,92

3	Perikanan Budidaya	1126,10	2019,36	1910,20	1713,11	1973,25
	Jumlah	2589,97	6312,85	6196,30	5076,35	5650,14

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, 2022

Kota Singkawang yang merupakan kota pesisir mempunyai potensi besar dalam produksi perikanan dan hasil laut lainnya. Jumlah produksi ikan selama 5 tahun cenderung fluktuatif, dan produksi ikan kelompok nelayan juga sama cenderung fluktuatif ditahun 2017-2021.

Konsumsi ikan di Kota Singkawang selama 5 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Masa hidup komoditas ikan segar cenderung pendek, mengakibatkan kualitas ikan akan menurun dan konsumsi ikan akan terkena imbasnya.

2.4.3.2. Pariwisata

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata selama periode 2018-2022 dapat dilihat melalui indikator pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Kota Singkawang
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	684.793	722.853	529.647	642.114	1.008.607
2.	Lama kunjungan wisata	1,9	2,2	0,33	2	2,09
3.	PAD sektor pariwisata (%)	9,49	10,36	n/a	n/a	9,77
4.	Cakupan Ekonomi Kreatif (%)	41,76	75	100	100	100

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, 2023

Kunjungan wisatawan ke Kota Singkawang dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan yang pesat pada tahun 2022, dikarenakan berakhirnya kondisi Pandemi dalam 2 (dua) tahun terakhir. Kontribusi PAD sektor pariwisata didekati dengan PAD yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Kontribusi PAD sektor pariwisata dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang masih relatif kecil terhadap total PAD.

2.4.3.3. Pertanian

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanian selama periode 2018-2022 secara ringkas tergambar melalui indikator pada tabel berikut ini.

Tabel 2.42
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	11,71	11,34	11,86	11,89	11,81
2.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (kw/ha)	32,06	33,76	n/a	38,05	36,60
3.	Cakupan bina kelompok petani (%)	47	13	n/a	13,4	n/a

Dinas PKPP Kota Singkawang, Tahun 2022 dan KDA Kota Singkawang 2023

2.4.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan energi dan sumber daya mineral periode 2018-2022 pada masing-masing indikator ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase RT yang menggunakan listrik	96,88	97,86	99,51	98,76	n/a
2.	Pertambangan tanpa ijin (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Singkawang, 2020; BPS Kota Singkawang 2022

2.4.3.5. Perdagangan

Cakupan bina kelompok pedagang cukup tinggi, lebih dari setengah kelompok pedagang/usaha informal mendapat bantuan binaan pemda. Data cakupan bina kelompok pedagang selama periode 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan Pemda	8	8	12	12	13
2.	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	13	13	13	13	14
3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	61,54	65,54	92,3	92,3	92,8

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang, 2023

2.4.3.6. Perindustrian

Cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2018-2019 sama yaitu sebesar 83,33 persen, yaitu 5 dari 6 kelompok pengrajin yang ada di Kota Singkawang mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Singkawang. Data cakupan bina kelompok pengrajin selama periode 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binan pemda	5	5	4	4	8
2.	Jumlah kelompok pengrajin	6	6	20	20	20
3.	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	83,33	83,33	20	20	40

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang, 2023

2.4.4. Penunjang Urusan

2.4.4.1. Perencanaan Pembangunan

Setiap tahun anggaran pemerintah Kota Singkawang secara rutin melakukan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk penyusunan RKPD Kota Singkawang tahun 2023 mengacu pada RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025 yang dikomparasikan dengan usulan masyarakat hasil musrenbang tingkat Kota Singkawang dan pokok-pokok pikiran DPRD. Dokumen RKPD tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Walikota setiap tahun. Gambaran pelayanan umum dalam bidang perencanaan pembangunan dapat disampaikan berikut ini.

Tabel 2.46
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Pembangunan
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	Ada	ada
2.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	Ada	ada

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	Ada	ada
4.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100	100
5.	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang, 2023

2.4.4.2. Keuangan

Kinerja pembangunan pada penunjang urusan keuangan periode 2018-2022 pada masing-masing indikator ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keuangan
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini Blm Keluar
2.	Persentase SILPA terhadap APBD (Penerimaan Daerah) (%)	2,98	4,49	9,30	4,99	13,87
3.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.	Persentase belanja pendidikan (%)	36,94	24,90	20,79	22,84	23,46
5.	Persentase belanja kesehatan (%)	24,60	30,37	47,07	12,35	27,69
6.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)	57,63:42,37	59,34:40,65	n/a	n/a	n/a
7.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, 2023

2.4.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja pembangunan pada penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan periode 2018-2022 pada masing-masing indikator ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 2.48
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3,91	4,69	25,5	39,7	42,23
2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	6,84	5,55	2,58	4,28	3,54
3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	26,49	49,54	89,22	36,60	58,38
4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (orang)	23	21	24	28	27
5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah (orang)	1.428	1.345	1.475	1.411	1.063
6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (orang)	1.949	1.997	1.997	1.877	2.069

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang, 2023

2.4.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja pembangunan pada penunjang urusan penelitian dan pengembangan periode 2018-2022 pada masing-masing indikator ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1.49
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	0
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	50,00	12,00	100,00	100,00	100,00
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	3,45	24,14	0	13,79	6,89
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	0	0	0	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang, 2023

2.4.4.5. Pengawasan

Kinerja pembangunan pada penunjang urusan pengawasan periode 2018-2022 terjadi peningkatan pada masing-masing indikator. Namun hanya Maturasi

SPIP pada tahun 2018 yang tidak diketahui hasilnya atau tidak dapat dihitung. Gambaran pengawasan di Kota Singkawang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pengawasan
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK	285	292	307	324	337
2.	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	697	716	756	799	835
3.	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (%)	85,80	88,12	89,68	90,99	92,22
4.	Maturasi SPIP	n/a	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Singkawang, 2023

2.4.4.6. Sekretariat Dewan

Setiap tahun Sekretariat DPRD secara rutin melakukan rencana kerja tahunan baik pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kota Singkawang maupun pada program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsinya. Sehingga kegiatan anggora DPRD, Rapat Kerja antara Eksekutif dan Legislatif dapat terlaksana. Gambaran ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sekretariat Dewan
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota	Ada	ada	Ada	ada	ada
2.	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	ada	Ada	ada	ada
3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada	ada	Ada	ada	ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Singkawang, 2023

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Evaluasi Pencapaian RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025 disampaikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5.
Tabel Evaluasi Pencapaian RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025

PERIODE	:	2008-2012
PERENCANAAN		
ARAH KEBIJAKAN	:	<p>Pengembangan perekonomian Kota Singkawang pada tahap ini difokuskan pada peningkatan kegiatan sektor riil melalui pengembangan kegiatan investasi swasta dan masyarakat. Kegiatan agribisnis semakin ditumbuhkan dalam upaya memunculkan produk unggulan daerah. Pertumbuhan ekonomi pada periode ini ditargetkan rata-rata 5,70% per tahun, dengan kontribusi tertinggi berasal dari pertumbuhan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, bangunan, dan sektor transportasi/komunikasi. Menekan laju pertumbuhan penduduk yang relatif kecil dan terkendali, namun berusaha untuk menghindari terjadinya struktur usia penduduk semakin menua (<i>aging population</i>). Perluasan dan Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas tinggi bagi masyarakat, termasuk pendirian Universitas Negeri. Peningkatan kemampuan akademik dan profesionalisme diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Peningkatan kualitas dan pemberdayaan lembaga pendidikan (sekolah dan luar sekolah). Peningkatan kualitas maupun jangkauan cakupan program yang berdampak pada penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan peningkatan status gizi balita. Pemberdayaan penduduk dan keluarga miskin, fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan lainnya sehingga jumlah Penduduk Miskin dan jumlah keluarga berstatus KS 1 (keluarga miskin) semakin berkurang.</p>

<p>URAIAN PENCAPAIAN</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pertumbuhan ekonomi yang efisien, produktif dan berkelanjutan ditunjukkan dengan indikasi tumbuhnya perekonomian di Kota Singkawang. Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang di tahun 2008 sebesar 4,72% kemudian naik menjadi sebesar 6,46% pada tahun 2012 diikuti dengan indikator kinerja Angka Kemiskinan Kota Singkawang pada periode 2008-2012 mengalami penurunan sebesar 32,70% atau berada diangka 5,31%. 2. Keberhasilan dalam membangun SDM berkualitas ditunjukkan dengan naiknya indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari kondisi di awal periode pada tahun 2008 sebesar 68,02% menjadi sebesar 69,77% di akhir periode atau naik sebesar 2,57%. Meningkatnya IPM didukung oleh meningkatnya capaian komponen IPM yaitu RLS dan AHH di Kota Singkawang. RLS dari kondisi awal sebesar 7,30% menjadi sebesar 7,59% atau naik sebesar 103,97%, dan AHH dari kondisi awal sebesar 66,95% tahun 2008 menjadi sebesar 67,46% ditahun 2012 atau naik sebesar 100,76%. Selain itu keberhasilan dalam membangun SDM berkualitas juga ditunjukkan dengan naiknya angka melek huruf Kota Singkawang, dari sebesar 89,62% ditahun 2008 menjadi sebesar 90,25% ditahun 2012 atau naik sebesar 100,70%. 3. Pencapaian peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki daya saing ditunjukkan dengan indikator kinerja Angka Pengangguran. Capaian Angka Pengangguran di Kota Singkawang pada tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 55,72% atau masuk dalam kriteria rendah, hal ini dikarenakan adanya penurunan angka pengangguran di Kota
------------------------------	---

		<p>Singkawang. Pada tahun 2008 Angka Pengangguran sebesar 6,73% kemudian turun menjadi sebesar 3,75% pada tahun 2012.</p> <p>4. Pengembangan pertumbuhan ekonomi yang efisien, produktif dan berkelanjutan ditunjukkan dengan indikasi tumbuhnya perekonomian di Kota Singkawang. Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang di tahun 2008 sebesar 4,72% kemudian naik menjadi sebesar 6,46% pada tahun 2012 atau capaian kinerjanya naik sebesar 136,86% dan masuk dalam kriteria sangat tinggi. Dan keberhasilan dalam menurunkan Angka Kemiskinan Kota Singkawang pada periode 2008-2012 sebesar 32,70% atau berada diangka 5,31%.</p>
PERIODE PERENCANAAN	:	2013-2017
ARAH KEBIJAKAN	:	<p>Pada tahap ini, mempertahankan angka laju pertumbuhan penduduk Kota Singkawang yang stabil dengan laju pertumbuhan antara 1,35-1,45% pertahun. Perekonomian Kota Singkawang ditargetkan tumbuh rata-rata sebesar 5,95% per tahun. Daya ungkit pertumbuhan terutama dikarenakan adanya peningkatan investasi swasta dan masyarakat di sektor agribisnis pada periode sebelumnya. Perluasan dan Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas tinggi bagi masyarakat. Peningkatan kualitas maupun jangkauan cakupan program yang berdampak pada penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan peningkatan status gizi balita. Bidang Transportasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dengan target sepanjang ± 300 Km, pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan sebanyak 20 unit, pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang ± 75 Km, pembangunan dan peningkatan jembatan ± 10 unit. Realisasi pembangunan</p>

	<p>infrastruktur Bandar Udara Singkawang. Terjadi peningkatan arus barang dan orang pada Pelabuhan Laut Singkawang. Bidang Sumber Daya Air, pemeliharaan jaringan distribusi air bersih dan pengembangan jaringan distribusi semakin meningkat dan mengurangi tingkat kebocoran pada jaringan distribusi.</p>
<p>URAIAN PENCAPAIAN</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Singkawang umumnya sudah baik. Hal ini dapat dikendalikannya pertumbuhan penduduk, sehingga pada akhir tahun capaian yaitu pada tahun 2022 berada dibawah angka yang telah ditargetkan sebesar 1,24%. Namun ke depannya tetap perlu diperhatikan sebab prediksi pada tahun 2020-2035 akan terjadi bonus demografi dimana jumlah usia produksi Indonesia diproyeksikan berada pada grafik tertinggi sejarah bangsa Indonesia, yaitu mencapai 64% dari total penduduk Indonesia sebesar 297 juta jiwa. 2. IPM Kota Singkawang pada Periode akhir periode tahun 2017 adalah sebesar 70,25% dengan capaian pertumbuhan sebesar 101,62% dibandingkan tahun 2012. IPM ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata IPM Indonesia. Meskipun demikian Angka Harapan Hidup (APP) Kota Singkawang sebesar 71,07%, Angka Melek Huruf (MYS) sebesar 92,56%, Rata-rata Lama Sekolah (EYS) sebesar 7,35%, dan Harapan Lama Sekolah sebesar 12,86% dengan rata-rata capaian melebihi 100% dibandingkan pada awal periode tahun 2012. Dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang menunjukkan bahwa peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pembangunan ekonomi Kota

	<p>Singkawang. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan pendidikan formal Kota Singkawang juga menunjang pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Dalam hubungannya dengan tingkat kemiskinan Kota Singkawang menunjukkan bahwa peningkatan IPM disebabkan oleh adanya penurunan tingkat kemiskinan sebesar 16,62%, sehingga akses terhadap kegiatan ekonomi tidak mengalami hambatan yang berarti. Dampaknya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan tidak terlalu mengalami kesulitan. Demikian juga untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya tidak menjadi terhambat yang berarti. Implikasinya tidak terlalu mengalami kesulitan untuk mencapai keberhasilan pada pembangunan manusianya. Investasi swasta dalam presentase terhadap PDB cukup besar sementara presentase investasi pemerintah terhadap PDB relative</p>
--	---

	<p>kecil. Aktivitas pemerintah daerah Kota Singkawang dalam pembangunan ekonomi juga beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program bantuan kepada Ketua RT, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.</p> <p>3. Kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan Kota Singkawang umumnya sudah baik. Dampak dari didirikannya beberapa perguruan tinggi sehingga memberikan kesempatan kepada siswa lulusan SMA/SMK melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian pula mengenai peningkatan sertifikasi guru dan pengawas dan kualifikasi pendidikan Guru SD (S1) masih belum optimal. Sementara dalam pelayanan kesehatan juga belum sepenuhnya optimal terutama terhadap penurunan Angka Kematian Balita (AKABA) per-100.000KH, Persentase Balita Gizi Buruk/Kurang, dan Rasio Tenaga Dokter Per-100.000 Pddk.</p> <p>4. Pada tahun 2016 telah dibangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK 50 liter per detik Sungai Bulan, Intake 140 liter per detik Semelagi dan IPA 150 liter per detik Tirtasari Roban. Pada periode ini pelayanan air bersih untuk masyarakat Kota Singkawang masih sangat kurang, hanya sekitar 37% dari jumlah penduduk. Instalasi pengolahan air yang dimiliki PDAM Gunung Poteng, seperti IPA 1 Roban berkapasitas 80 liter per detik dan IPA 2 Roban berkapasitas 50 liter per detik. Sehingga jumlah air yang dapat diolah hanya 130 liter per detik, dirasakan masih sangat kurang.</p>
--	---

		5. Secara umum kualitas sumber daya manusia di Kota Singkawang yang dilihat dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia di bidang pendidikan dan jasa dalam arti luas yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah belum mengalami peningkatan secara optimal
PERIODE PERENCANAAN	:	2018-2022
ARAH KEBIJAKAN	:	Perekonomian Kota Singkawang ditargetkan tumbuh rata-rata sebesar 5,87% pada periode ini. Pada tahap ini, struktur ekonomi semakin kokoh dikarenakan mulai berkembangnya kegiatan industri pengolahan agribisnis dan munculnya beberapa komoditas unggulan ekspor daerah. Disamping itu, IKM semakin berperan melalui pengembangan klaster. Implikasi dari semua kemajuan di atas pada akhirnya memacu kegiatan bisnis dan perdagangan daerah. Pemberdayaan penduduk dan keluarga miskin, fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan lainnya, sehingga jumlah Penduduk Miskin berkurang menjadi 11,0% dan jumlah keluarga berstatus KS I (keluarga miskin) turun menjadi 9,7%. Peningkatan kualitas dan pemberdayaan lembaga pendidikan (sekolah dan luar sekolah). Penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan memenuhi standar. Peningkatan penyediaan dan pemerataan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Peningkatan kualitas layanan pada Rumah Sakit, Puskesmas, dan Posyandu. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan manajemen Kesehatan.

	<p>Pemberdayaan penduduk dan keluarga miskin, fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan lainnya, sehingga jumlah Penduduk Miskin berkurang menjadi 11,0% dan jumlah keluarga berstatus KS I (keluarga miskin) turun menjadi 9,7%. Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Membangun dan meningkatkan semangat multikulturalisme dalam dimensi sosial, budaya dan kehidupan beragama. Infrastruktur dan sumberdaya aparatur pemerintahan daerah yang semakin handal sejalan dengan kebutuhan manajemen pemerintahan modern.</p>
<p>URAIAN PENCAPAIAN</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mewujudkan SDM Kota Singkawang yang berkualitas dengan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbudaya ditunjukkan dengan: meningkatnya capaian IPM dari sebesar 71,08 pada tahun 2018 naik sebesar 1,81 poin menjadi sebesar 72,89% pada tahun 2022 atau naik sebesar 102,55%; meningkatnya RLS dari sebesar 7,57% tahun 2018 menjadi sebesar 8,19% tahun pada tahun 2022 atau naik sebesar 108,19%; meningkatnya HLS dari sebesar 12,87% tahun pada tahun 2018 naik sebesar 0,05 poin menjadi sebesar 12,92% pada tahun 2022 atau naik sebesar 100,39%. Selain itu peningkatan kualitas SDM juga diiringi dengan kenaikan taraf kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan kenaikan AHH Kota Singkawang, pada tahun 2018 AHH Kota Singkawang sebesar 71,35% atau naik menjadi 72,46% pada tahun 2022 atau naik sebesar 101,56%. 2. Untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Efisien, Produktif dan berkelanjutan dan mewujudkan Masyarakat Kota Singkawang Yang Sejahtera

	<p>ditunjukkan dengan naiknya Pertumbuhan Ekonomi, turunnya Angka Kemiskinan, turunnya Gini Rasio, turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka. Pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang pada periode ini mengalami kenaikan, pada awal periode terealisasi sebesar 4,64% naik menjadi sebesar 5,05% pada tahun 2022. Angka Kemiskinan Kota Singkawang pada tahun 2018 sebesar 5,12% turun menjadi 4,67% pada tahun 2022. Demikian juga dengan capaian Gini Rasio, pada tahun 2022 terealisasi sebesar 0,291, turun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang sebesar 0,307.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pembangunan bandara dimulai pada Tahun 2019, yaitu dengan melakukan proses land clearing dikawasan bandara. Proses land clearing kembali dilanjutkan pada tahun 2021. Sampai dengan saat ini, di Tahun 2022 sedang dilakukan pembangunan pagar, saluran dan apron. Pada Tahun 2023 direncanakan akan dibangun landasan pacu atau runway Tahap I sepanjang 1.400 Meter. 4. Kota Singkawang menjadi Kota Toleran peringkat pertama dengan skor Indeks Kota Toleran tahun 2021 tertinggi, yaitu 6,483. Kota Singkawang memberikan terobosan melalui kebijakan Perwako Singkawang No. 129 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat. 5. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Singkawang menerima penghargaan dari Innovative Government Award (IGA) dengan kategori Sangat Inovatif berada pada peringkat 40 dari 93 Kota seluruh Indonesia. Untuk Tahun 2021 Kota Singkawang Kembali menerima penghargaan dari Innovative Government
--	--

	<p>Award (IGA) mencapai peringkat yang fantastis yaitu peringkat 2 setelah Kota Surabaya.</p> <p>6. Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam 4 (empat) tahun (2018-2021), opini yang dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya BPK menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pada Tahun 2021 Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Singkawang mengalami peningkatan dengan mendapatkan predikat “B”. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Singkawang telah berupaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform.</p>
--	---

2.5.1. Capaian Indikator Makro Pembangunan

Untuk mengukur capaian kinerja suatu pemerintahan daerah dan membandingkannya secara nasional maka ditetapkan beberapa indikator yang berlaku secara nasional yang disebut indikator makro pembangunan. Capaian indikator makro yang dicapai Kota Singkawang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Tabel Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kota Singkawang
Tahun 2005-Tahun Berjalan

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2008)	Capaian pada tahun berjalan (2022)	Pertumbuhan / Penurunan (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Pembangunan Manusia	68,00	72,89	7,16%	
2.	Angka Kemiskinan	7,89	4,67	-40,81%	
3.	Angka Pengangguran	6,73	8,63	28,23%	
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,72	5,05	6,99%	
5.	Ketimpangan Pendapatan	0,324	0,291	-10,24%	Data awal tahun 2010
6.	PDRB Per Kapita (juta Rupiah)	11.249,00	49.413,00	339,27%	Data awal tahun 2010
7.	Pengeluaran Per Kapita (ribu Rupiah)	10.864,00	12.089,00	11,28	

Secara umum capaian indikator kinerja makro pembangunan Kota Singkawang periode tahun 2005-2025 sangat baik, dari 7 (tujuh) indikator kinerja makro yang diukur terdapat 6 (enam) indikator kinerja makro yang mengalami pertumbuhan. Secara lebih rinci capaian indikator kinerja makro dijelaskan sebagai berikut:

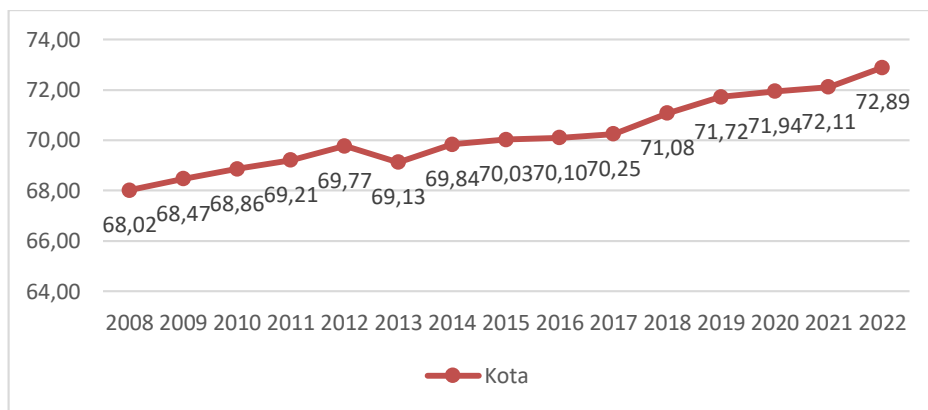
a. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Kota Singkawang dapat dinyatakan cukup berhasil, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Singkawang. Pada tahun 2022, IPM Kota Singkawang sebesar 72,89, termasuk kategori sangat tinggi atau meningkat sebesar 107,16% jika dibandingkan pada periode awal RPJPD yaitu pada tahun 2008 yang sebesar 68,02%. Kenaikan IPM ini karena didukung oleh naiknya capaian komponen IPM yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Angka Harapan Hidup (AHH). RLS Kota Singkawang pada tahun 2008 sebesar 7,30% naik menjadi 8,19% pada tahun 2022, HLS Kota Singkawang pada tahun 2010 sebesar 10,86% naik menjadi sebesar 12,92% pada tahun 2022, dan untuk

AHH pada tahun 2008 sebesar 66,95% tahun naik menjadi 72,46% tahun pada tahun 2022.

Capaian IPM Kota Singkawang pada tahun 2022 diatas dari capaian Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 68,63% dan dibawah capaian nasional yang sebesar 72,91%. Hal ini tentunya selaras dengan Misi RPJPD Kota Singkawang “Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatif berbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila”.

Grafik 2.16.
IPM Kota Singkawang tahun 2010-2022



Sumber: BPS Kota Singkawang

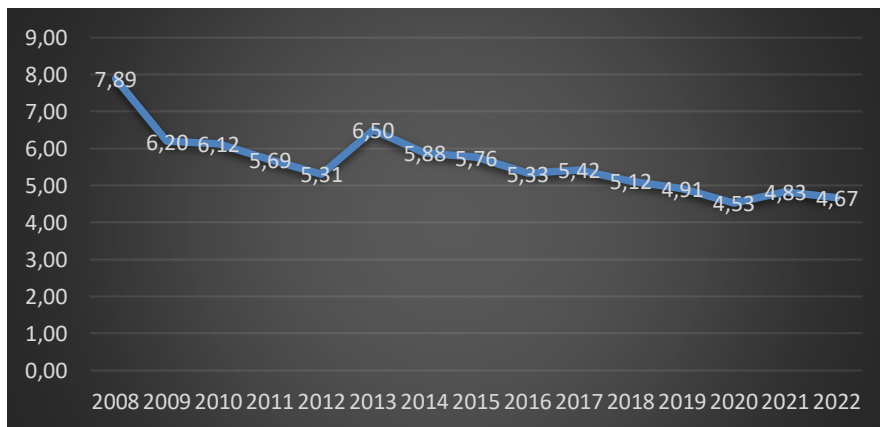
b. Angka Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Singkawang bisa dikatakan berhasil, hal ini digambarkan dengan menurunnya angka kemiskinan. Pada tahun 2022, angka kemiskinan di Kota Singkawang sebesar 4,67%, atau sejumlah 10,82 ribu jiwa, menurun sebesar 59,19% jika dibandingkan pada periode awal RPJPD yang sebesar 7,89% atau sejumlah 15,05 ribu jiwa.

Dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2019, angka kemiskinan Kota Singkawang cenderung menurun hingga mencapai 4,91%. Pada tahun 2020 hingga 2021 angka kemiskinan di Kota Singkawang mengalami kenaikan mencapai sebesar 6,62%, hal ini diakibatkan oleh dampak dari pandemic *Covid-19*. Kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka pemulihan ekonomi selama pandemi maupun pasca pandemi menjadi kunci untuk menurunkan angka kemiskinan, hal ini dapat

dilihat dari capaian pada tahun 2022 yang sebesar 4,67% atau mengalami penurunan sebesar 3,31% dibandingkan kondisi tahun 2021.

Grafik 2.17.
Angka Kemiskinan Kota Singkawang Tahun 2010-2022



Sumber: BPS Kota Singkawang

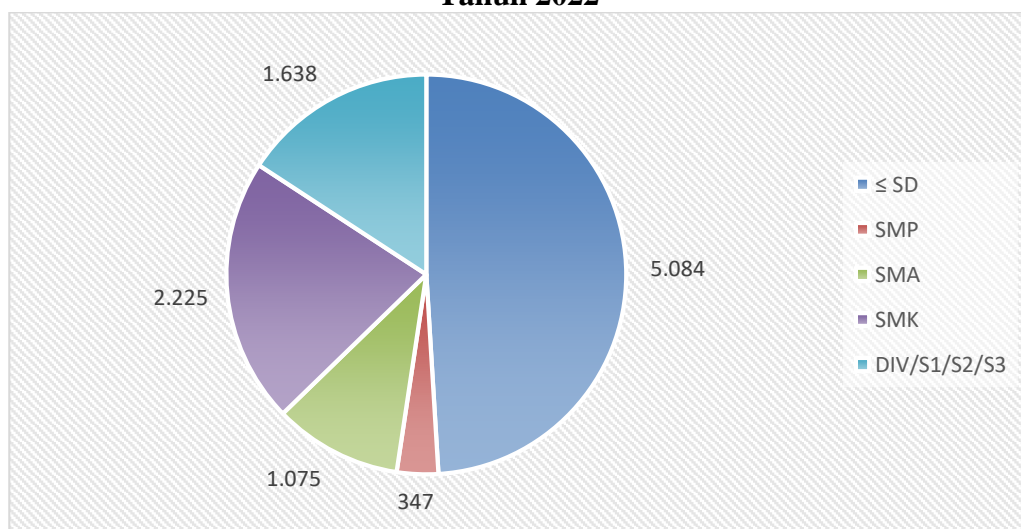
Capaian angka kemiskinan Kota Singkawang pada tahun 2022 lebih baik dari capaian angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 6,73% dan capaian angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,57%. Hal ini tentunya selaras dengan Misi RPJPD Kota Singkawang “Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat miskin”.

c. Angka Pengangguran

Untuk mengukur angka pengangguran Kota Singkawang menggunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Angka pengangguran di Kota Singkawang pada tahun 2022 sebesar 8,63%, mengalami peningkatan sebesar 28,23% jika dibandingkan pada periode awal RPJPD yaitu pada tahun 2008 yang sebesar 6,73%, hal ini selaras dengan menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Kota Singkawang. Namun demikian angka pengangguran di Kota Singkawang masih lebih tinggi dari angka pengangguran Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 5,11% dan angka pengangguran nasional yang sebesar 5,86%.

Grafik 2.18.

Jumlah Pengangguran Kota Singkawang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022



Sumber: BPS Kota Singkawang

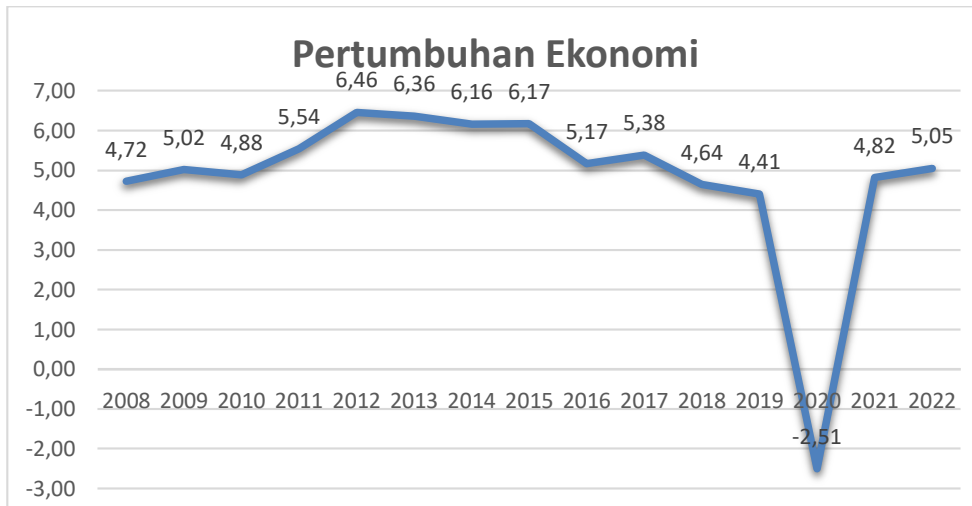
Pada Tahun 2022, jumlah pengangguran di Kota Singkawang sebesar 10.369 jiwa dan didominasi oleh lulusan setingkat Sekolah Dasar dengan jumlah 5.084 jiwa atau memiliki proporsi sebesar 49,03% dari total jumlah pengangguran. Terbesar kedua adalah lulusan Perguruan Tinggi dengan jumlah 10.369 jiwa, kemudian lulusan setingkat Sekolah Menengah Kejuruan sejumlah 2.225 jiwa dan yang terkecil adalah lulusan setingkat Sekolah Menengah Pertama sejumlah 347 jiwa atau memiliki proporsi sebesar 3,35% dari total jumlah pengangguran di Kota Singkawang. Berdasarkan proporsi persentase pengangguran tertinggi terdapat pada lulusan setingkat SD, maka untuk menurunkan angka pengangguran di Kota Singkawang diperlukan kolaborasi dengan Provinsi Kalimantan Barat terutama dalam memberikan pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang pada tahun 2022 sebesar 5,05%, atau mengalami kenaikan sebesar 106,99% jika dibandingkan pada tahun 2008 yang mencapai 4,72%. Pada rentang tahun 2008 hingga tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang cenderung fluktuatif, pada rentang tahun 2015 hingga 2019 cenderung menurun hingga mencapai 28,53%, pada tahun 2019 turun menjadi 4,41%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang turun drastis hingga -2,51% karena dampak pandemic covid-19. Berkat upaya

bersama antara Pemerintah Kota Singkawang dengan seluruh elemen masyarakat maka perekonomian Kota Singkawang berangsur pulih pada tahun 2021 hingga tahun 2022 dengan capaian sebesar 5,05%.

Grafik 2.19.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang Periode 2005-2022



Sumber: BPS Kota Singkawang diolah

Pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang pada tahun 2022 merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2018, dengan nilai sebesar 5,05% atau diatas capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 5,01% dan dibawah capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,31%.

Berdasarkan data PDRB Lapangan Usaha, perekonomian Kota Singkawang paling besar ditopang oleh Sektor Perdagangan dan Reparasi Kendaraan Bermotor dengan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 19,81 persen, kemudian di ikuti oleh sektor Konstruksi dengan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 16,43 persen, Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 14,42 persen dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, dengan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 11,81%. Pada periode tahun 2008 hingga tahun 2022, secara umum tidak terdapat pergeseran kontribusi sektor lapangan usaha yang menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Singkawang, namun dengan terus berkembangnya Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan maka untuk mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia yang ada maka Kota Singkawang mengembangkan sektor Ekonomi Kreatif.

e. PDRB Per Kapita

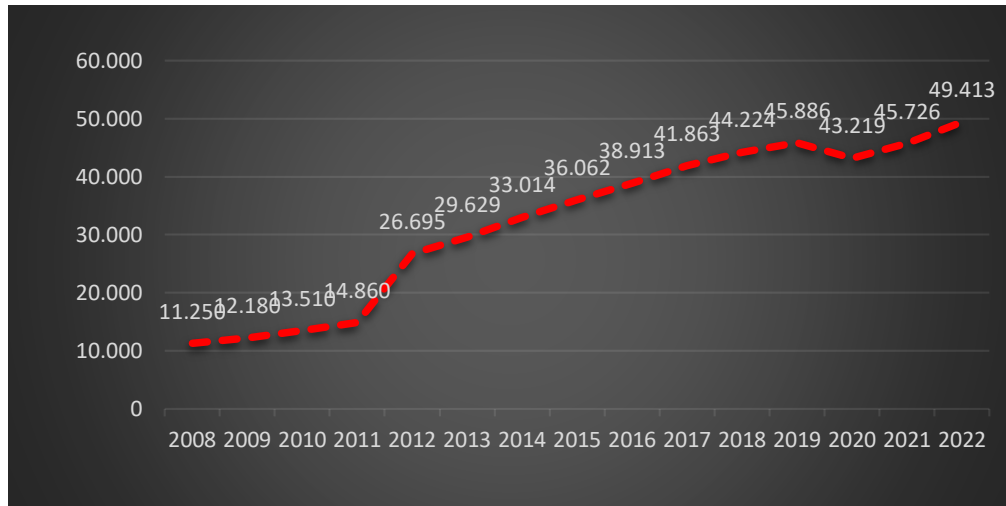
Pada tahun 2022 realisasi PDRB Per Kapita Kota Singkawang sebesar 49.413 juta Rupiah, atau tumbuh sebesar 399,98% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2008 yang sebesar 12.354 juta Rupiah. Dalam periode 2008-2022, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Singkawang adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor jasa mencakup perdagangan, hotel dan restoran, transportasi, dan jasa lainnya. Sedangkan sektor industri meliputi industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, serta konstruksi.

Peningkatan PDRB per kapita Kota Singkawang juga dapat dilihat dari indeks pertumbuhan PDRB per kapita yang mencapai 5,5% pada tahun 2019, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 4,9%. Dalam upaya meningkatkan PDRB per kapita Kota Singkawang, pemerintah dapat mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang potensial, seperti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Selain itu, sektor Konstruksi dan sektor Industri Pengolahan dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, juga dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan PDRB per kapita Kota Singkawang.

Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi Kota Singkawang. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada karyawan mereka.

Secara keseluruhan, PDRB per kapita Kota Singkawang mengalami peningkatan yang positif dalam periode 2008-2022. Namun, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan PDRB per kapita menghadapi dampak pandemi COVID-19. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang potensial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Grafik 2.20. PDRB Per Kapita Kota Singkawang Periode 2005-2022



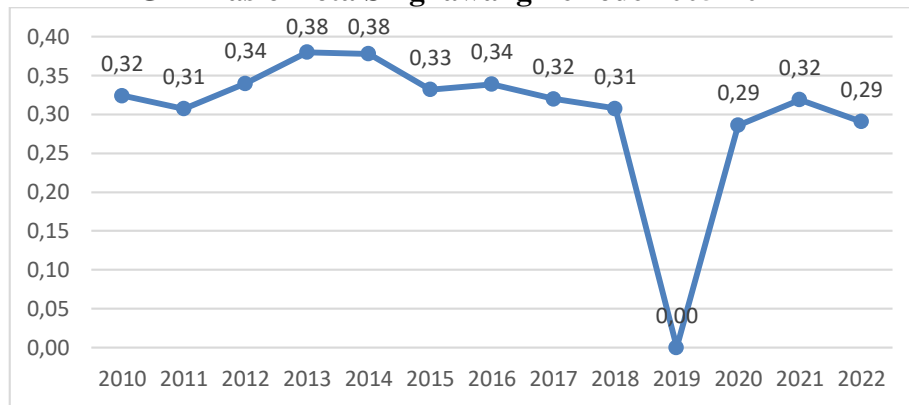
Sumber: BPS Kota Singkawang diolah

f. Ketimpangan Pendapatan

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Rasio (Indeks Gini). Semakin tinggi nilai Gini Rasio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Rasio Kota Singkawang pada tahun 2022 sebesar 0,29, atau mengalami penurunan jika dibandingkan realisasi pada tahun 2010 yang sebesar 0,32. Jika dibandingkan antara realisasi pada tahun 2022 dengan realisasi pada tahun 2010 capaiannya menurun sebesar 89,76%. Capaian Gini Rasio Kota Singkawang pada tahun 2022 masih dibawah capaian Gini Rasio Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 0,31 dan capaian Gini Rasio nasional yang sebesar 0,38.

Kesenjangan pendapatan tidak dapat dihindari, kenaikan Gini Rasio disebabkan karena besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk, yang harus terus dilakukan adalah upaya untuk mempersempit kesenjangan pendapatan antar masyarakat. Untuk menekan semakin lebarnya kesenjangan pendapatan antar masyarakat maka Pemerintah Kota Singkawang melakukan beberapa kebijakan antara lain pemberian bantuan permakanan kepada lansia nonproduktif, memberikan perlindungan kesehatan berupa Jaminan Kesehatan Nasional kepada masyarakat, memberikan akses pendidikan seluas-luasnya dengan memberikan bantuan operasional sekolah daerah kepada sekolah swasta, dan secara berkala melakukan operasi pasar untuk menekan kenaikan harga bahan makanan pokok yang melonjak.

Grafik 2.21.
Gini Rasio Kota Singkawang Periode 2005-2022



Sumber: BPS Kota Singkawang diolah

g. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran Per Kapita menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Pengeluaran rata-rata per kapita dihitung dari biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita Kota Singkawang pada tahun 2022 sebesar Rp.12.089 ribu, meningkat sebesar 11,28% jika dibandingkan realisasi tahun 2010 yang mencapai Rp.10.864 ribu. Naiknya rata-rata pengeluaran per kapita warga Kota Singkawang banyak dipengaruhi oleh ekonomi kota Singkawang tumbuh, maka pendapatan per kapita juga meningkat, yang dapat mengarah pada peningkatan pengeluaran per kapita.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Analisis Proyeksi Penduduk 2025-2045

2.6.1.1. Proyeksi Jumlah Penduduk Total Penduduk

Proses pembangunan yang berkelanjutan bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Penduduk adalah obyek dan subyek dari pembangunan, maka pembangunan harus berpusatkan pada penduduk (people-centered development), yaitu pembangunan yang berorientasi kepada potensi dan

kebutuhan sosial, ekonomi, budaya dan ketentraman lahir dan batin penduduk itu sendiri.

Jumlah penduduk merupakan data dan informasi yang utama dalam perencanaan pembangunan. Data jumlah penduduk dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja pembangunan dan acuan dalam pembangunan di masa yang akan datang. Data tersebut dapat memperkirakan kebutuhan fasilitas maupun sarana prasarana, serta dapat menjadi acuan dalam membuat strategi kebijakan di masa yang akan datang.

Berdasarkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Singkawang 2023-2045 perhitungan proyeksi penduduk yang dilakukan dalam bagian ini menggunakan Data BPS Kota Singkawang. Adapun indikator yang digunakan berupa indikator demografis seperti asumsi kelahiran, asumsi kematian dan migrasi. Beberapa aspek yang mendukung terhadap pencapaian kondisi ideal yang meliputi target terhadap Total Fertility Rate (TFR), PUS menggunakan kontrasepsi CPR, Angka Kelahiran Kasar (CBR), Angka Kematian Kasar (CDR), Angka Kematian Bayi (IMR) dan Angka harapan hidup. Sehingga proyeksi pertumbuhan penduduk atas dasar daya dukung yang tersedia akan memberikan gambaran penduduk ideal ditahun 2045.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kota Singkawang dapat diperkirakan bahwa pada akhir periode RPJPD (2045) jumlah penduduk Kota Singkawang adalah sebesar **320.113** jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 17.190 jiwa dalam periode lima tahun. Jumlah penduduk pada kelompok usia 25-29 tahun memiliki jumlah penduduk tertinggi pada akhir periode RPJPD 2045 di Kota Singkawang, yakni sebesar 24.272 jiwa. Indikator yang menjelaskan proyeksi penduduk pada tahun 2025-2045 dalam range waktu lima tahun Kota Singkawang diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 2.6.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Singkawang Tahun 2025-2045

Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
240.327	253.812	271.987	288.791	304.763	320.113

Sumber: BPS Kota Singkawang Dalam Angka, 2023

2.6.1.2. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Jumlah penduduk Kota Singkawang berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk usia balita dan usia tua. Kota Singkawang untuk tahun 2025-2045 mendapatkan bonus demografi pada rentang usia 15-64 tahun. Kelompok umur produktif lebih mendominasi dapat dilihat pada tabel proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di bawah ini:

Tabel 2.6.
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Tahun
Kota Singkawang 2025-2045

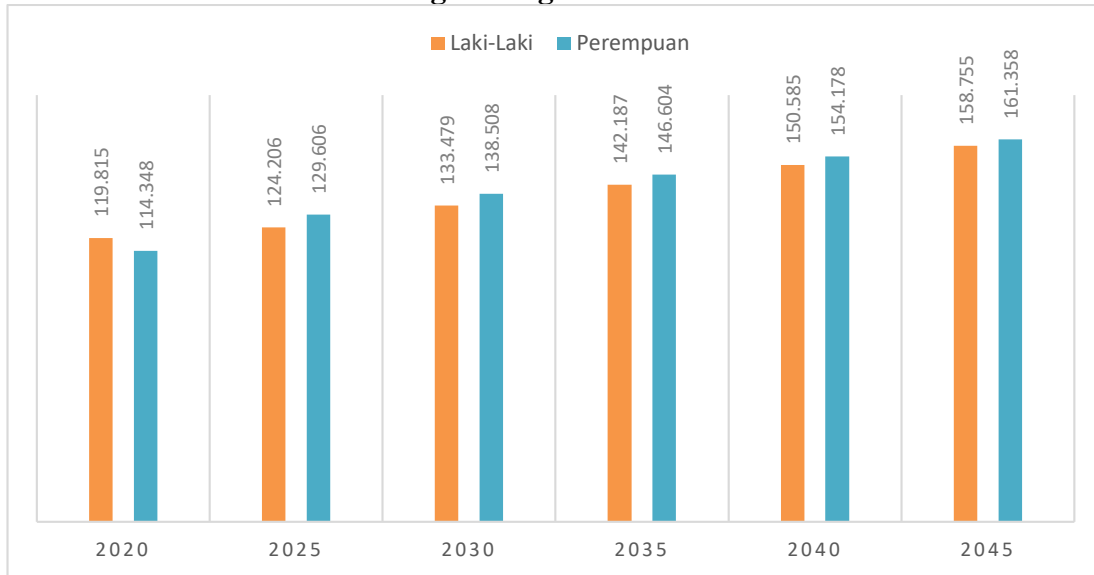
NO	KELOMPOK UMUR	BASELINE	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2020	2025	2030	2035	2040	2045
1	0-4	23.068	23.103	22.601	22.369	22.738	23.583
2	5-9	20.980	23.275	23.314	22.814	22.577	22.950
3	10-14	20.268	21.173	23.497	23.530	23.028	22.793
4	15-19	19.341	20.398	21.311	23.651	23.690	23.180
5	20-24	20.534	19.472	20.534	21.460	23.814	23.850
6	25-29	21.308	20.922	19.843	20.924	21.879	24.272
7	30-34	19.718	21.885	21.482	20.380	21.492	22.475
8	35-39	17.729	20.001	22.190	21.782	20.672	21.803
9	40-44	15.662	17.756	20.025	22.210	21.806	20.700
10	45-49	13.690	15.582	17.670	19.929	22.109	21.706
11	50-54	11.219	13.481	15.351	17.421	19.657	21.816
12	55-59	9.705	10.868	13.077	14.912	16.943	19.128
13	60-64	7.693	9.179	10.294	12.414	14.190	16.142
14	65-69	5.951	6.995	8.379	9.431	11.421	13.087
15	70-74	3.374	5.056	5.970	7.202	8.160	9.916
16	75+	3.923	4.666	6.449	8.362	10.587	12.712
	Jumlah	234.163	253.812	271.987	288.791	304.763	320.113

Sumber: BPS Kota Singkawang Dalam Angka, 2023

Kondisi proyeksi jumlah penduduk Kota Singkawang tahun 2025-2045 menunjukkan kondisi yang terus meningkat tiap tahun. Pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 19.649 jiwa, ditahun 2030 mengalami kenaikan sebanyak 18.175 jiwa, ditahun 2035 mengalami kenaikan sebanyak 16.804 jiwa, ditahun 2040 mengalami kenaikan sebanyak 15.972 jiwa dan pada tahun 2045 mengalami kenaikan sebanyak 15.350 jiwa. Jadi rata-rata kenaikan proyeksi

jumlah penduduk kota singkawang tahun 2025-2045 sebesar 17.190 jiwa. Selain itu jumlah penduduk terkecil berada pada kelompok umur 70-74 di tahun 2020 sebesar 3.374 jiwa, dan ditahun 2045 sebesar 9.916 jiwa.

Grafik 2.6
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kota Singkawang Tahun 2025-2045



Sumber: BPS Kota Singkawang Dalam Angka, 2023;

Kondisi proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan jenis kelamin Perempuan lebih besar di bandingkan dengan laki-laki pada periode 2025-2045 dengan kondisi tren yang terus meningkat dengan rata-rata perbandingan laki-laki 0,49 persen dan Perempuan sebanyak 0,51 persen.

2.6.2. Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana 2025-2045

2.6.2.1. Persampahan

Analisis kebutuhan sarana dan prasarana merupakan aspek penting untuk mengukur proyeksi kebutuhan produksi sampah ton/perhari suatu wilayah. Indikator yang menjelaskan proyeksi produksi sampah ton/perhari penduduk pada tahun 2025-2045 dalam range waktu sepuluh tahun Kota Singkawang diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 2.6.2.1
Proyeksi Kebutuhan Produksi Sampah
Kota Singkawang Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Produksi Sampah (Ton/Hari)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Singkawang Tengah	28,05					
2	Singkawang Barat	22,04					
3	Singkawang Selatan	22,05					
4	Singkawang Utara	12,52					
5	Singkawang Timur	9,30					
Jumlah		93,97	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, 2023;

Tabel 2.6.2.2
Proyeksi Fasilitas Persampahan
Kota Singkawang Tahun 2025-2045

No	Keterangan	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Produksi Sampah (L/Hari)					Jumlah (2025-2045)
			2025	2030	2035	2040	2045	
1	Sel zona sampah	1 zona	1 Paket	-	1 paket	-	1 paket	3 paket
2	Bangunan pemilah sampah	-	1 paket	-	-	-	-	1 paket
3	Bangunan workshop	-	1 paket	-	-	-	-	1 paket
4	Container sampah	24 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	25 unit
5	Mobil armroll	5 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	11 unit
6	Bangunan depo/TPST	1 unit	5 unit	-	5 unit	-	5 unit	15 unit
7	Hopper	-	6 unit	1 unit	5 unit	1 unit	5 unit	18 unit
8	Beko loader	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	5 unit
9	Excavator	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	5 unit
10	Bulldozer	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	2 unit
11	conveyor	1 unit	6 unit	2 unit	5 unit	2 unit	5 unit	20 unit
12	Mesin press	1 unit	5 unit	-	5 unit	-	5 unit	15 unit
13	Road Sweeper	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	5 unit
14	Mobil compactor	-	-	1 unit	-	1 unit	-	2 unit
15	Kendaraan roda tiga	18 unit	25 unit	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	225 unit
16	Mesin pencacah sampah	1 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	30 unit
17	Mesin pemilah	-	1 unit	2 unit	3 unit	2 unit	2 unit	10 unit
18	Mobil operasional pick up	3 unit	-	2 unit	2 unit	-	2 unit	6 unit
19	Incinerator sampah	-	-	2 unit	-	3 unit	-	5 unit
20	L-Truck	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	5 unit
21	Dump Truck	13 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	5 unit
22	Wood chipper	1 unit	1 unit	5 unit	6 unit	6 unit	6 unit	24 unit

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, 2023;

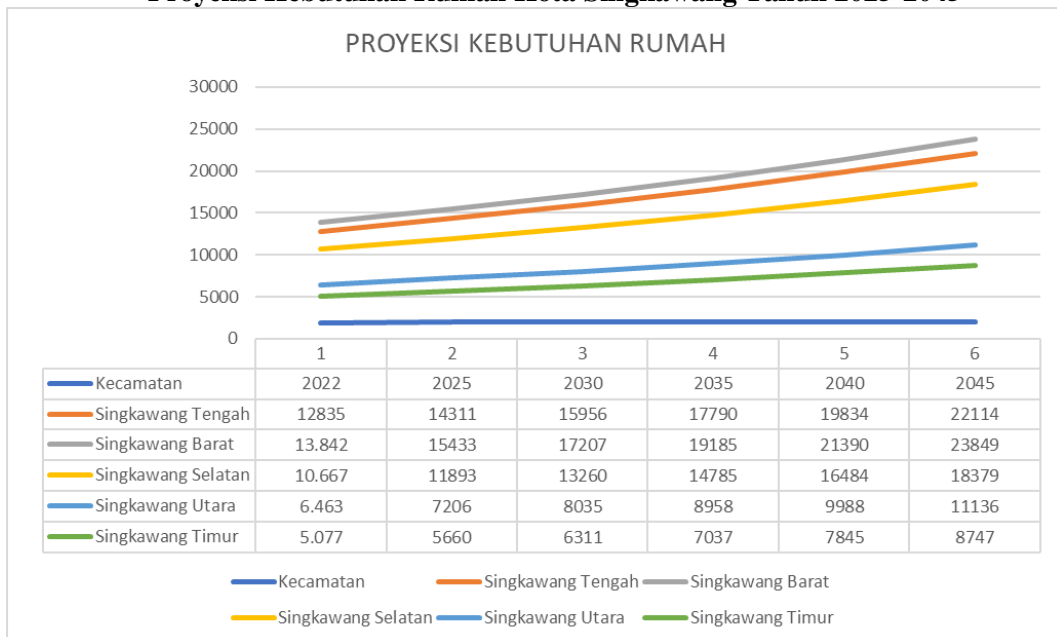
2.6.2.2. Rumah / Tempat Tinggal

Tabel 2.6.2.3
Proyeksi Kebutuhan Rumah Kota Singkawang Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Rumah				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Singkawang Tengah	12.835	14.311	15.956	17.790	19.834	22.114
2	Singkawang Barat	13.842	15.433	17.207	19.185	21.390	23.849
3	Singkawang Selatan	10.667	11.893	13.260	14.785	16.484	18.379
4	Singkawang Utara	6.463	7.206	8.035	8.958	9.988	11.136
5	Singkawang Timur	5.077	5.660	6.311	7.037	7.845	8.747
Jumlah		48.884	54.504	60.769	67.754	75.542	84.225

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, 2025-2045

Gambar 2.6.
Proyeksi Kebutuhan Rumah Kota Singkawang Tahun 2025-2045



Sumber: : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, 2025-2045

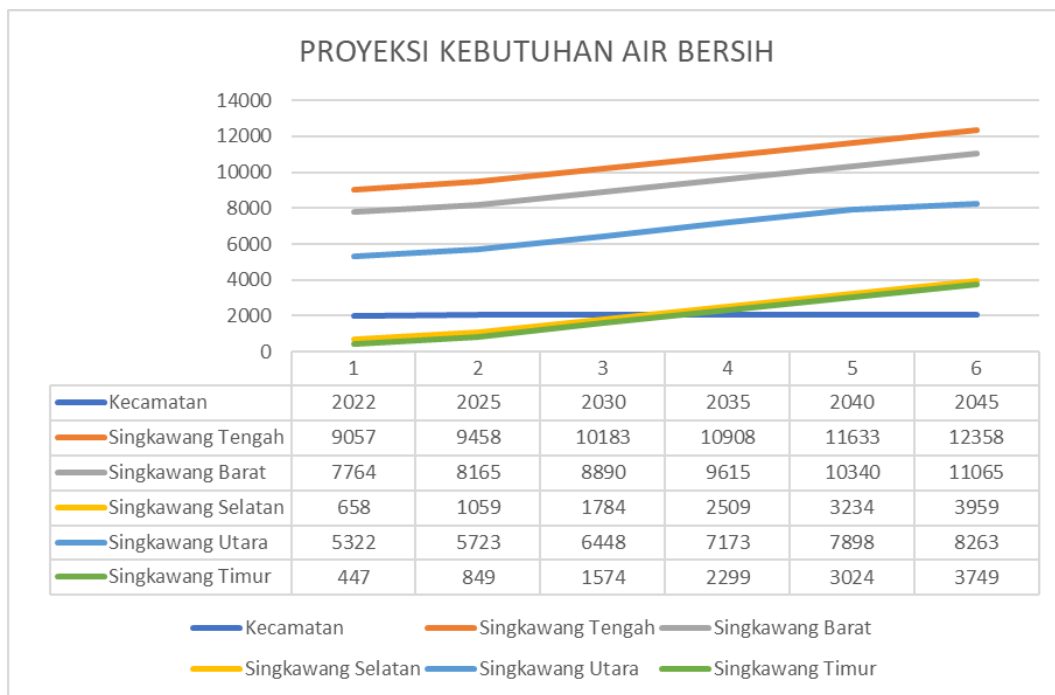
2.6.2.3. Air

Tabel 2.6.2.4
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih
Kota Singkawang Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (1/hr)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Singkawang Tengah	9057	9458	10183	10908	11633	12358
2	Singkawang Barat	7764	8165	8890	9615	10340	11065
3	Singkawang Selatan	658	1059	1784	2509	3234	3959
4	Singkawang Utara	5322	5723	6448	7173	7898	8263
5	Singkawang Timur	447	849	1574	2299	3024	3749
Jumlah		23248	25254	28879	32504	36129	39394

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, 2023;

Gambar 2.3
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Singkawang Tahun 2025-2045



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, 2023;

Rata-rata kebutuhan air bersih di kota singkawang dari tahun 2025-2045 mengalami peningkatan setiap periodenya. Dapat dilihat dari table diatas.

2.6.2.5. Energi / Listrik

Tabel 2.6.2.5
Proyeksi Kebutuhan Listrik
Kota Singkawang Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Listrik (KVA)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Singkawang Tengah						
2	Singkawang Barat						
3	Singkawang Selatan						
4	Singkawang Utara						
5	Singkawang Timur						
Jumlah			0	0	0	0	0

Sumber:

2.6.2.6. Infrastruktur Kesehatan

Analisis kebutuhan fasilitas Kesehatan merupakan aspek penting untuk mengukur proyeksi kebutuhan fasilitas Kesehatan suatu wilayah. Indikator yang menjelaskan proyeksi kebutuhan fasilitas Kesehatan kota singkawang pada

tahun 2025-2045 dalam range waktu sepuluh tahun Kota Singkawang diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 2.6.2.6
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
Kota Singkawang Tahun 2025-2045

No	Fasilitas Kesehatan (Unit)	Kondisi Eksisting (2022)	Proyeksi Fasilitas Kesehatan					Total
			2025	2030	2035	2040	2045	
1	Rumah Sakit	6	0	1	1	1	0	3
2	Puskesmas	10	0	0	1	1	1	3
3	Puskesmas Pembantu	18	1	1	1	1	1	5
4	Rumah Sakit Bersalin	1	1	1	1	1	1	5
5	Posyandu	158	3	3	3	3	3	15
6	Apotek	56	2	5	5	5	5	22
7	Klinik Pratama	20	3	3	3	3	3	15
8	Klinik Utama	2	2	2	2	2	2	10
Jumlah		249	7	11	12	12	11	53

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, 2023

2.6.2.7. Pasar

Tabel 2.6.2.7
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pasar
Kota Singkawang Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Kebutuhan Fasilitas Pasar (2022)	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pasar (Unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Singkawang Tengah	78	5	5	5	5	5
2	Singkawang Barat	27	1	1	1	1	1
3	Singkawang Selatan	0	0	0	0	0	0
4	Singkawang Utara	2	2	2	2	2	2
5	Singkawang Timur	2	2	2	2	2	2
Jumlah		109	10	10	10	10	10

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, 2023

2.6.2.8. Infrastruktur Pendidikan

Tabel xx
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Kota Singkawang Tahun 2025-2045

No	Fasilitas Pendidikan (Unit)	Kondisi Eksisting (2022)	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Unit)					Total
			2025	2030	2035	2040	2045	
1	TK / Sederajat	214	82	82	84	85	86	419
2	SD / Sederajat	1281	8	5	5	5	5	28
3	SMP / Sederajat	568	5	7	8	5	4	29
4	SMA / Sederajat	353	20	31	35	36	35	157
Jumlah		2416	115	125	132	131	130	633

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pengembangan pusat pertumbuhan diharapkan dapat memberikan dampak pada daerah. Penetapan pusat-pusat kegiatan melalui rencana tata ruang baik pada level nasional, provinsi, atau kabupaten/kota menjadi pintu masuknya berbagai program atau proyek strategis yang dapat memengaruhi perkembangan daerah.

Berdasarkan Pertauran Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042, arah pembangunan Kota Singkawang adalah sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata berwasan lingkungan hidup, kegiatan industri, serta perdagangan jasa berorientasi ekspor yang aman, nyaman, produktif, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam hal kebijakan penataan ruang kota yang terdiri atas kawasan pemerintah, pariwisata, budaya, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai kota wisata yang unggul serta pengembangan pusat pelayanan yang merata dan berhiraki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata. perlindungan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata. peningkatan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan. perwujudan dukungan untuk sektor pariwisata dengan kemudahan investasi pada sektor jasa, industri, dan perdagangan. pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan baik di wilayah kota maupun

di wilayah kabupaten yang berbatasan. perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dari rencana pengembangan pusat pertumbuhan wilayah yang berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah Kota Singkawang. Pengembangan sistem perkotaan tersebut dilaksanakan dengan berbagai program dan kegiatan. Berikut merupakan program dan kegiatan pada sistem perkotaan di Kota Singkawang.

Tabel 2.7.1.
Program Rencana Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah
Kota Singkawang Tahun 2022-2042

	PROGRAM	LOKASI
A.	Perwujudan Struktur Ruang	
1.	Perwujudan Pusat Kegiatan di Wilayah Kota	
1.1	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota (PPK)	
1.1.1	Percepatan Pengembangan PPK (Pusat Pelayanan Kota)	
	a. Pembangunan, pelebaran dan peningkatan struktur jalan kota	- Jalan Lingkar Barat - Jalan Lingkar Selatan, Jalan Lingkar Utara, Jalan menuju lokasi rencana bandara
	b. Pembangunan dan perbaikan sistem drainase kota	- Kecamatan Singkawang Tengah dan - Kecamatan Singkawang Barat
	c. Penataan taman	Kecamatan Singkawang Barat
	d. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Publik	- Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat
	e. Pelaksanaan Pembangunan dan Penataan Kawasan Kota Pusaka Singkawang	- Kecamatan Singkawang Tengah dan - Kecamatan Singkawang Barat
1.1.2	Mendorong Perkembangan bagian PPK yang belum memanfaatkan secara efisien	
	a. Penataan kawasan kumuh di Kelurahan Roban	- Kelurahan Roban

	PROGRAM	LOKASI
	b. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pengolahan sampah dan limbah B3	Kawasan TPA Wonosari, Kelurahan Roban
	c. Pembangunan, pelebaran dan peningkatan struktur jalan kota	- Kecamatan Barat dan Singkawang - Kecamatan Tengah Singkawang
	d. Pembangunan dan perbaikan sistem drainase kota	- Kecamatan Barat dan Singkawang - Kecamatan Tengah Singkawang
	e. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Publik	- Kecamatan Barat dan Singkawang - Kecamatan Tengah Singkawang
1.1.3	Revitalisasi dan percepatan pengembangan bagian strategis dari PPK	
	a. Pengembangan perumahan	- Kecamatan Tengah Singkawang
	b. Pembangunan, pelebaran dan peningkatan struktur jalan kota	- Kecamatan Tengah Singkawang
	c. Pembangunan dan perbaikan sistem drainase kota	- Kecamatan Tengah Singkawang
1.1.4	Pengendalian perkembangan bagian kawasan PPK berbasis mitigasi bencana	
	a. Program normalisasi Sungai Singkawang	Kelurahan Pasiran, Kuala, Sungai Wie, dan Sungai Garam
	b. Pembuatan tanggul	- Sungai Garam, Sungai Wie, Sungai Safioedin dan Parit Hasan - Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat
	c. Bangunan Pengendali Banjir	
1.2	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)	
1.2.1	Percepatan Pengembangan SPPK	
	a. Penyusunan RDTR WP I, WP II, WP III, WP IV, WP V, WP VI Kota Singkawang	- Kelurahan Pangmilang

	PROGRAM	LOKASI
		Kecamatan Singkawang Selatan; – Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan
	b. Pembangunan, pelebaran dan peningkatan struktur jalan kota	– Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara; – Kelurahan Pajantan dan Kelurahan Bagak Sahwa di Kecamatan Singkawang timur
	c. Pembangunan dan perbaikan sistem drainase kota	
	d. Penataan taman	
	e. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Publik	
1.2.2	Revitalisasi dan percepatan pengembangan SPPK	
	a. Pembangunan, pelebaran dan peningkatan struktur jalan kota	– Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan; – Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan; – Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara;
	b. Pembangunan dan perbaikan sistem drainase kota	– Kelurahan Pajantan dan Kelurahan Bagak Sahwa di Kecamatan Singkawang timur
1.2.3	Pengendalian SPPK berbasis mitigasi bencana	
	a. Penyusunan Rencana Kontijensi yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Multi Bencana	– Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan; Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan; – Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara;
	b. Restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir (Sungai Sedau)	– Kelurahan Pajantan dan Kelurahan Bagak Sahwa di Kecamatan Singkawang timur

	PROGRAM	LOKASI
	c. Penerapan sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir	
	d. Pengembangan Sistem peringatan dini bencana banjir bandang, gempa bumi, abrasi pantai, kebakaran hutan dan lahan	
	e. Penanaman mangrove di garis pantai yang berpotensi terkena abrasi dengan melibatkan Masyarakat sekitar kawasan tersebut	
	f. Penerapan aturan bangunan tahan gempabumi dalam pelaksanaan PBG di daerah	
	g. Penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor	
1.3	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	
1.3.1	Percepatan Pengembangan PL (Pusat-pusat Lingkungan yang berada di Kawasan Strategis)	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Naram (Kec. Singkawang Utara); - Kelurahan Maya Sopa (Kec. Singkawang Utara);
1.3.2	Revitalisasi dan percepatan pengembangan PL (Pusat-pusat Lingkungan yang berada relatif jauh dari daerah rawan bencana namun berpotensi cepat berkembang untuk meningkatkan keefektifan pelayanan kota)	- Kelurahan Sijangkung dan Kelurahan Sagatani (Kec. Singkawang Selatan)
1.3.3	Pengendalian PL berbasis mitigasi bencana (Pusat-pusat Lingkungan di daerah rawan bencana)	
1.3.4	Mendorong Pengembangan PL berbasis pemberdayaan masyarakat (Pusat-pusat Lingkungan di daerah yang kurang potensial atau relatif lambat kecenderungan perkembangannya)	
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana	
2.1	Sistem Jaringan Transportasi	
2.1.1	Sistem Jaringan Jalan	

	PROGRAM	LOKASI
	a. Jalan Umum	
	- Pengembangan Jaringan Jalan Nasional: Jalan Arteri Primer	- jalan Alianyang; - sebagian Jalan Tebas-Singkawang, sepanjang 49,72 km (empat puluh sembilan koma tujuh puluh dua kilometer); - Batas Kota Singkawang-Sungai Duri; dan - Sebagian jalan Ahmad Yani, sepanjang 0,14 km (nol koma empat belas kilometer).
	- Pengembangan Jaringan Jalan Nasional: Jalan Arteri Sekunder	- jalan Merdeka; jalan Diponegoro; sebagian jalan Ahmad Yani, sepanjang 1,23 km (satu koma dua puluh tiga kilometer); sebagian jalan Tebas-Singkawang sepanjang 1,45 km (satu koma empat puluh lima kilometer); jalan Yos Sudarso; jalan Terminal Induk; jalan Yohana Godang; jalan GM. Situt; jalan Setia Budi; jalan Kalimantan; jalan Hasan Saad; Jalan akses Bandara 1 Kota Singkawang melalui Kelurahan Sedau – Kelurahan Pangmilang; Jalan akses Bandara 2 Kota Singkawang melalui Kelurahan Pangmilang – Kelurahan Sijangkung; dan jalan Lingkar Barat (bypass).
	- Pengembangan Jaringan Jalan Nasional: Jalan Kolektor Primer	- Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Pahlawan.

	PROGRAM	LOKASI
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan jalan kewenangan kota berupa jalan kolektor sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> - jalan Baru; jalan Budi Utomo; jalan Bun Fui; jalan Conglongkong Trans; jalan Demang Akub; jalan Dr. Sutomo; jalan Firdaus HR; jalan Firdaus HR II; jalan Firdaus III; jalan GS. Lalanang; jalan Gunung Kaba'; jalan H. Bakar; jalan Hamid Matali; jalan Hermansyah; jalan Jembatan 25; jalan Kepol Mahmud; jalan Kridasana; jalan Kurau; jalan Lingkar Timur; jalan Mahad Usman; jalan Matang Lintang; - jalan Mesjid Raya; jalan Mesjid
		<ul style="list-style-type: none"> - Sei Bulan; jalan Niaga; jalan Nusantara; jalan P. Antasari; jalan Padat Karya Sungai Wie; jalan Pangmilang SP1-SP2; jalan Pelita; jalan Pemuda; jalan Pertanian; jalan Perwira; jalan Poros Pajintan; jalan Pramuka; jalan R. A. Kartini; jalan Raya Sagatani; jalan Raya Sebakuan; jalan Sama-Sama; jalan Saman Bujang; jalan Sanggau Kulor; jalan Sejahtera; jalan Semai; jalan SM. Tsjafioeddin; jalan Stasiun; jalan Tani SMP VII; jalan Trans Semelagi; jalan Trisula; jalan Veteran; jalan Veteran Ujung; jalan Wonosari; - dan jalan Yunus Yakob.
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan jalan kewenangan kota berupa jalan lokal sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> - Tercantum dalam Lampiran V
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan jalan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersebar di seluruh Kota Singkawang
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pengembangan Jaringan Jalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Tanjung Bajau dari

	PROGRAM	LOKASI
	Kewenangan Kota Berupa Jalan Khusus	Kawasan Wisata Palm Beach menuju Sinka Island Park
	c. Perwujudan Jalan Tol	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan tol yang menghubungkan Pontianak-Mempawah- Bengkayang-Singkawang - Pintu Tol Singkawang berada di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan
	d. Perwujudan Jalan Bebas Hambatan	Kota Singkawang
	e. Terminal Penumpang	
	- Perwujudan Terminal penumpang Tipe A	- Terminal Singkawang yang ditetapkan di Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah
	- Pengembangan terminal penumpang Tipe C	<ul style="list-style-type: none"> - Terminal Beringin di Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah; Terminal Pasiran di Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat; Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara; Kelurahan Pangmilang - Kecamatan Singkawang Selatan; dan Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur.
	f. Perwujudan Terminal Barang	- Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan
	g. Revitalisasi Jembatan Timbang Barang	- Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan
	h. Pembangunan Jembatan pada Daerah Perbatasan	Di seluruh wilayah Kota Singkawang
2.1.2	Sistem Jaringan Kereta Api	
	a. Penetapan secara definitif jalur untuk lintas rel KA dan stasiun KA	- Jalur Rel Kereta Api dari Bandara Supadio Pontianak– Mempawah– Singkawang – Batas Negara, melalui Kecamatan Singkawang

	PROGRAM	LOKASI
		Selatan, Kecamatan Singkawang Barat, Kecamatan Singkawang Tengah, dan Kecamatan Singkawang Utara
	b. Pengalokasian lahan untuk stasiun KA	- Stasiun Penumpang di Kecamatan Singkawang Utara; - Stasiun Operasi di Kecamatan Singkawang Selatan
	c. Pembangunan Prasarana Perkeretaapian	- Kecamatan Singkawang Selatan, - Kecamatan Singkawang Barat, - Kecamatan Singkawang Tengah, sampai Kecamatan Singkawang Utara
2.1.3	Sistem Jaringan Sungai dan Penyeberangan	
	a. Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau	- menghubungkan Kota Singkawang dengan Pelabuhan Pulau Tambelan
	a. Pelabuhan Penyeberangan	- Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan
2.1.4	Sarana Jaringan Transportasi Laut	
	a. Pengembangan Pelabuhan Pengumpul, yaitu Pelabuhan Singkawang	- Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat
	b. Peningkatan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan	- Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat dan Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.
2.1.5	Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	
	a. Pengembangan dan Pematapan Bandar Udara Umum Singkawang	- Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan
	b. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang Bandar Udara Khusus	- Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara
		- Kelurahan Pangmilang,

	PROGRAM	LOKASI
	c. Penataan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan	Kecamatan Singkawang Selatan
		- Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara
2.2	Sistem Jaringan Energi	-
2.2.1	Pengembangan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	- Jalan Raya Sedau; Jalan Batas Kota Singkawang-Sungai Duri; Jalan Ahmad Yani; Jalan Diponegoro; Jalan Merdeka; Jalan Bambang Ismoyo; Jalan Ratu Sepudak
2.2.2	Pengembangan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	
	a. Pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Sungai Wie	- Kelurahan Sungai Wie, Kelurahan Roban dan Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah
	b. Pemeliharaan SUTT	- Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapak Besar, Kelurahan Setapak Kecil, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Garam, dan Kelurahan Naram di Kecamatan Singkawang Utara; - Kelurahan Bukit Batu, Kelurahan Sungai Wie, dan Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Kuala, dan Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat; - Kelurahan Sedau dan Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Pajintan, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Nyarumkop di

	PROGRAM	LOKASI
		Kecamatan Singkawang Timur.
	a. Pengembangan SUTM dan SUTR	- Disepanjang jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal di Kota Singkawang; - Seluruh wilayah Kota Singkawang
	b. Pengembangan gardu induk/ gardu listrik sesuai dengan kebutuhan masyarakat	- Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah
	c. Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa tenaga surya, angin, biogas/biomassa dan mikrohidro	- Seluruh Wilayah Kota Singkawang
2.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi	
2.3.1	Pengembangan Jaringan Tetap	- Seluruh Wilayah Kota Singkawang
2.3.2	Pengembangan Jaringan Bergerak	
	a. Pengembangan Jaringan Bergerak Terrestrial	Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat
	b. Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler Berupa <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	- Kecamatan Singkawang Utara, Kecamatan Singkawang Selatan, Kecamatan Singkawang Barat, Kecamatan Singkawang Timur, dan Kecamatan Singkawang Tengah
2.4	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	
2.4.1	Sistem Jaringan Irigasi	
	a. Pemeliharaan dan mempertahankan jaringan irigasi primer	- Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur; dan - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang

	PROGRAM	LOKASI
		Tengah
	b. Pemeliharaan dan mempertahankan jaringan irigasi sekunder	<ul style="list-style-type: none"> - - Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Pajintan, Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Maya Sopa, dan Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur; - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah; dan - Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat.
	c. Pemeliharaan dan mempertahankan jaringan irigasi tersier	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Pajintan, Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, dan Kelurahan Maya Sopa di Kecamatan Singkawang Timur; dan - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah.
	d. Pembuatan sumur resapan dan biopori	Seluruh Wilayah Kota
2.4.2	Pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir berupa Kolam Retensi	- Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah
2.4.3	Bangunan Sumber Daya Air	

	PROGRAM	LOKASI
	a. Operasi dan Pemeliharaan Embung	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara; - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Pajintan di Kecamatan Singkawang Timur dan - Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan
	b. Peningkatan Pintu Air	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat; - Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, dan Kelurahan Maya Sopa di Kecamatan Singkawang Timur; dan - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah.

	PROGRAM	LOKASI
	c. Pengembangan Prasarana Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat; - Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, dan Kelurahan Maya Sopa di Kecamatan Singkawang timur; dan - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah
2.5	Infrastruktur Perkotaan	
2.5.1	Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM)	
	a. Jaringan Perpipaan	-
	- Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat; Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Maya Sopa di Kecamatan Singkawang Timur - Kelurahan Semelagi Kecil dan Kelurahan Sungai Bulan di Kecamatan Singkawang Utara

	PROGRAM	LOKASI
	- Pengembangan Jaringan Air Baku	- Kelurahan Maya Sopa, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Sanggau Kulor di Kecamatan Singkawang Timur; - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan dan Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara; - Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan;
	- Pengembangan Unit Produksi Berupa Instalasi Pengolahan Air (IPA)	- Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah, - Kelurahan Sungai Bulan dan Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara - Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan;
	- Pengembangan Unit Produksi Berupa Reservoir	- Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah
	- Pengembangan Jaringan Produksi	- Kelurahan Sanggau Kulor dan Kelurahan Pajintan di Kecamatan Singkawang Timur; dan - Kelurahan Roban, Kelurahan Condong, Kelurahan Sekip Lama, Kelurahan Jawa, dan Kelurahan Sungai Wie, di Kecamatan Singkawang Tengah; dan

	PROGRAM	LOKASI
		- Kelurahan Sungai Garam Hilir di Kecamatan Singkawang Utara
	- Pengembangan Unit Distribusi Berupa Jaringan Distribusi	- hampir di seluruh Kota Singkawang kecuali Kelurahan Maya Sopa di Kecamatan Singkawang Timur
	b. Pengembangan Bukan Jaringan Perpipaan terdiri dari Sumur Pompa	- Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, - Kelurahan Pajintan, Kelurahan Maya Sopa, dan Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur; dan - Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan
2.5.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	
	a. Pengembangan SPAL nondomestik	- Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Melayu di Kecamatan Singkawang Barat; - Kelurahan Roban, Kelurahan Sekip Lama, Kelurahan Sungai Wie, dan Kelurahan Condong di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, dan Kelurahan Sijangkung di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Setapak Kecil di Kecamatan Singkawang Utara; dan - Kelurahan Bagak Sahwa dan Kelurahan Sanggau Kulor di Kecamatan Singkawang Timur.

	PROGRAM	LOKASI
	b. Pengembangan sistem pembuangan air limbah domestik terpusat	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur; - Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Pangmilang dan Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan
	c. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat berupa penanganan limbah rumah tangga pada kawasan padat permukiman dengan pembangunan WC, septic tank rumah tangga atau septic tank bio filter	- Seluruh Kelurahan
2.5.3	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	- Di dekat kawasan pengolahan sampah perkotaan TPA Wonosari di Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah dan pada Kawasan Peruntukan Industri yang terdapat di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan
2.5.4	Sistem Jaringan Persampahan	
	a. Pemeliharaan dan Peningkatan kualitas TPS	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Setapak Besar, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Naram, dan Kelurahan Sungai Garam Hilir di Kecamatan Singkawang Utara; - Kelurahan Sungai Wie, Kelurahan Roban, dan Kelurahan Condong di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Melayu di Kecamatan Singkawang Barat; - Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan; dan - Kelurahan Pajintan di Kecamatan Timur

	PROGRAM	LOKASI
	b. Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah
	c. Peningkatan dan Pemeliharaan TPA	- Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah
	d. Pengadaan zona baru TPA	Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah
	e. Pengolahan sampah terpadu (3R), pemindahan lokasi TPA	Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah
2.5.5	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	
	a. Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	- jaringan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan di Kota Singkawang
	b. Pengembangan ruang evakuasi bencana	- lapangan olahraga, fasilitas umum, ruang terbuka hijau, kantor pemerintah dan bangunan besar lain yang aman dari bencana
2.5.6	Sistem Drainase	-
	a. Normalisasi jaringan drainase primer	- Sungai Singkawang, Sungai Sedau, Sungai Air Merah, Sungai Semelagi Kecil, Sungai Pinang, Sungai Selakau, Sungai Air Putih, Sungai Air Hitam, Sungai Setapuk Besar, Sungai Setapuk Kecil, Sungai Rasau, Sungai Bulan, Sungai Nangka, Sungai Garam, Sungai Wie, Sungai Sakok, Sungai Jamthang.
	b. Pengelolaan dan pengembangan jaringan drainase sekunder	- disepanjang kanan dan kiri jaringan jalan dengan fungsi arteri, kolektor dan sebagian lokal di Kota Singkawang.
	c. Pengembangan jaringan drainase tersier	- disepanjang kanan dan kiri jaringan jalan dengan fungsi jalan lokal di Kota Singkawang.
	d. Pengembangan sistem drainase terpadu antara sistem drainase primer, sekunder, dan tersier agar saling terkoneksi	- Seluruh Wilayah Kota

	PROGRAM	LOKASI
2.5.7	Jalur Sepeda	- Jalan Ahmad Yani, jalan Firdaus HR, Jalan SM. Tsjafoeddin, Jalan diponegoro, Jalan pemuda, Jalan merdeka, Jalan setiabudi, Jalan sejahtera, Jalan Kalimantan, Jalan sudirman, dan Jalan nusantara
2.5.8	Jaringan Pejalan Kaki	- Jalan Firdaus HR, Jalan Dr. Sutomo, Jalan P. Antasari, Jalan SM. Tsjafoeddin, Jalan Yos Sudarso, Jalan Aliyang, Jalan Ahmad Yani, Jalan Firdaus HR II, Jalan Diponegoro, Jalan Merdeka, Jalan Pemuda, Jalan Nusantara, Jalan Perwira, Jalan R.A Kartini, Jalan Satria, Jalan Bintara, Jalan Sudirman, Jalan Kalimantan, Jalan GS. Lalanang, Jalan Yohana Godang, dan Jalan GM. Situt.
B	Perwujudan Rencana Pola Ruang	
1	Perwujudan Kawasan Lindung	
1.1	Perlindungan terhadap badan air	- Sungai Singkawang Sungai Sedau Sungai Air Merah Sungai Selakau Sungai Setapak Besar Sungai Garam Sungai Wie Embung Pajintan Danau Serantangan
1.2	Perlindungan terhadap Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya	
1.2.1	Perlindungan terhadap kawasan lindung gambut	- Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan; dan - Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan.
1.3	Pelestarian Kawasan perlindungan setempat	
1.3.1	Pelestarian Kawasan sempadan pantai (100 m dari titik pasang tertinggi)	Kawasan Pantai di Kecamatan Singkawang Selatan

	PROGRAM	LOKASI
1.3.2	Pemasangan patok sempadan pantai guna pelestarian kawasan	- Pesisir Kota Singkawang
1.3.3	Pengendalian alih fungsi dengan penetapan sempadan sungai	- Sungai Acoi Sungai Garam Sungai Merah Sungai Pasi Sungai Sedau - Sungai Setapuk Besar Sungai Transad Sungai Wie - Sungai Singkawang
1.3.4	Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau atau waduk	- Danau Serantangan
1.4	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	
1.4.1	Pengadaan dan pembebasan lahan untuk RTH Publik	- Tersebar di 5 Kecamatan di seluruh Kota Singkawang
1.4.2	Pengembangan Rimba Kota	- Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat; - Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, Kelurahan Sedau, dan Kelurahan Sijangkung di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Roban dan Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Maya Sopa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Pajintan, dan Kelurahan Sanggau Kulor di Kecamatan Singkawang Timur; - Kelurahan Naram, Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Garam Hilir, dan Kelurahan Sungai Rasau di Kecamatan Singkawang Utara.

	PROGRAM	LOKASI
1.4.3	Pengembangan Taman Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Setapak Besar, Kelurahan Setapak Kecil di Kecamatan Singkawang Utara; - Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, dan Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan; - Kelurahan Pasiran, Kelurahan Melayu, dan Kelurahan Tengah di Kecamatan Singkawang Barat; dan - Kelurahan Roban, Kelurahan Jawa, dan Kelurahan Condong di Kecamatan Singkawang Tengah
1.4.4	Pengembangan Taman Kecamatan	Kelurahan Rasau, Kecamatan Singkawang Utara
1.4.5	Pengembangan Taman Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan, dan Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara; - Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat
1.4.6	Pengembangan pemakaman	- Seluruh Kota Singkawang
1.5	Pengembangan kawasan konservasi	
1.5.1	Perlindungan terhadap kawasan cagar alam Gunung Raya Pasi	Kecamatan Singkawang Selatan dan Kecamatan Singkawang Timur
1.6	Pengembangan kawasan ekosistem mangrove	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Kuala di Kecamatan Singkawang Barat; - Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Setapak Kecil, Kelurahan Setapak

	PROGRAM	LOKASI
		Besar, Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara; dan Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan
1.6.1	Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Ekosistem Mangrove	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah; - Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Kuala di Kecamatan Singkawang Barat - Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, dan Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara; dan - Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan
1.6.2	Pembuatan bangunan pengendali abrasi dan gelombang pasang	- Pesisir Kota Singkawang